

Tim Penyusun Dewan Harian Daerah  
Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45)  
Provinsi Kalimantan Selatan

# PROFIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

DARI P.M. NOOR SAMPAI SAHBIRIN NOOR



PROFIL GUBERNUR  
**KALIMANTAN**  
**SELATAN**



DARI P.M. NOOR SAMPAI SAHBIRIN NOOR



## **PROFIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**Dari P.M. Noor sampai Sahbirin Noor**

Tim Penyusun Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan  
Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi Kalimantan Selatan

Diterbitkan oleh

Arti Bumi Intaran (Anggota IKAPI)

Mangkuyudan MJ III/216 Yogyakarta

e-mail: artibumiintaran@gmail.com

bekerjasama dengan

Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45

(DHD 45) Provinsi Kalimantan Selatan

dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

Provinsi Kalimantan Selatan

Dimensi : 14,5 cm x 21 cm, 254 hlm

Cetakan I, Agustus 2024

ISBN: 978-623-8026-96-8

Penyunting : H. Kamarul Hidayat

Pemeriksa Aksara: H. Supiyannor

Desain Cover : Mursalin

Hak Cipta © pada Tim Penyusun

Dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

**TIM PENYUSUN**  
**PROFIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**Dari P.M. Noor sampai Sahbirin Noor**

**Penanggung Jawab**

Dr. H. Zulfadli Gazali, M.Si  
Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.H.  
Pangeran H. Sjachsam Sarkawi

**Ketua**

Drs. H. Wajidi, M.Pd

**Sekretaris**

H. Kamarul Hidayat

**Anggota**

Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd  
H. Supiyannor, S.Ag., M.A.  
Drs. Ahmad Barjie B.  
Mursalin, S.Pd., M.Pd

**SAMBUTAN**  
**KETUA UMUM DEWAN HARIAN DAERAH**  
**BADAN PEMBUDAYAAN KEJUANGAN 45 (DHD 45)**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Merdeka!



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT kami menyambut gembira terbitnya buku “Profil Gubernur Kalimantan Selatan, Dari P.M. Noor sampai Sahbirin Noor”. Penerbitan buku ini merupakan usaha yang patut dihargai sebagai salah satu upaya kita untuk mengenalkan para tokoh banua yang pernah menjabat Gubernur.

Banyak kiprah Gubernur Kalimantan dan/atau Provinsi Kalimantan Selatan namun tidak terpublikasikan dalam bentuk buku. Oleh karena itu, dengan adanya buku ini diharapkan kita bisa lebih mengenal profil dan sumbangsih para gubernur dalam pembangunan banua, bangsa dan negara.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap usaha dan pengabdian kita untuk banua dan negeri Indonesia tercinta. Tetap Merdeka!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

**Ketua Umum,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'N'.

**Dr. (H.C.) H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai banyak tokoh yang berkiprah di berbagai bidang, baik di skala lokal maupun nasional. Mereka mempunyai peran masing-masing dalam mendarmabaktikan dirinya kepada bangsa dan negara.

Adanya tokoh banua dengan beragam kiprahnya itu, merupakan kebanggaan yang menjadi inspirasi generasi muda untuk mengikuti jejak positifnya. Namun dari beberapa tokoh banua itu hanya sedikit yang terpublikasi di dalam media cetak, dunia elektronik, ataupun dunia maya. Kenyataan ini adalah pendorong perlunya disusun biografi tokoh Kalimantan Selatan.

Buku ini merupakan hasil kegiatan pengumpulan data dalam rangka “Penerbitan Naskah/Buku Biografi Para Tokoh Daerah” yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul: “Profil Gubernur Kalimantan Selatan, Dari P.M. Noor sampai Sahbirin Noor”.

Sesuai judul, maka buku ini memuat profil para tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur Kalimantan Selatan. Pemilihan tokoh ditentukan dengan parameter bahwa tokoh tersebut pernah menduduki jabatan gubernur. Diawali dengan profil Ir. Pangeran Mohamad Noor selaku Gubernur Provinsi Borneo [Kalimantan] atau Gubernur Provinsi Kalimantan Pertama yang dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, disusul dengan Gubernur Provinsi Kalimantan yang dibentuk sesudah pengakuan kedaulatan atau Gubernur Provinsi Kalimantan Kedua (dr. Mas Moerdjani & R.T.A.

Milono), dan para gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Sarkawi sampai gubernur sekarang, H. Sahbirin Noor). Mengapa nama provinsinya berbeda-beda? Penjelasan berikut memberikan pemahaman kepada kita.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Republik Indonesia yang disepakati oleh PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) meliputi bekas wilayah kolonial Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II. Wilayah itu pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif dibagi atas 8 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Borneo [Kalimantan], dengan gubernurnya Ir. Pangeran Mohamad Noor yang dilantik tanggal 2 September 1945.

Provinsi Borneo dengan sendirinya bubar menyusul ditetapkannya Persetujuan Linggarjati antara pihak Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 di Jakarta. Dalam Persetujuan ini, *Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera.*

Dengan Persetujuan Linggarjati, pemerintah Republik melepaskan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian (Papua). Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah kedudukan Gubernur Borneo tidak ada lagi, karena dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947, dan dengan sendirinya pula Ir. P.M. Noor berhenti menjadi Gubernur Borneo.

Belanda kembali menguasai pulau Kalimantan. Di bawah pemerintahan NICA dibentuk beberapa keresidenan yaitu Keresidenan Zuid Borneo, Keresidenan West Borneo, dan Keresidenan East Borneo. Namun demikian, dualisme pemerintahan terjadi antara pemerintahan NICA di

Keresidenan Zuid Borneo [Keresidenan Borneo Selatan] dengan Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Letkol Hassan Basry selaku Gubernur Tentara yang pada tanggal 17 Mei 1949 memproklamasikan berdirinya pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang melingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan menjadi bagian RI.

Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 dan menjelang kembalinya negara ke dalam bentuk negara kesatuan, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan penataan kembali pemerintahan di daerah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara 1950 Nomor 59). Pasal 1 PP itu membagi Wilayah Republik Indonesia atas 10 Provinsi dan satu diantaranya adalah Provinsi Kalimantan dengan gubernurnya dr. Mas Moerdjani (1950-1953).

Pada masa itu Provinsi Kalimantan terdiri atas 3 (tiga) keresidenan yaitu Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.

Pada masa pemerintahan Gubernur R.T.A Milono, Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Tetapi di dalam Pasal 93 disebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52/10/50 tanggal 12 Desember



1956 ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957. Ketiga provinsi ini dijalankan oleh masing-masing acting gubernur yang kemudian dilantik sebagai gubernur tanggal 9 Januari 1957 (Ideham, ed., dkk., 2003).

Gubernur pertama Provinsi Kalimantan Selatan adalah Sarkawi. Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin (bekas induk Provinsi Kalimantan) masih merayakan kelahiran atau Hari Jadi Provinsi Kalimantan (14 Agustus 1950) sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring waktu Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan menguatkannya dengan Surat Keputusan Ketua DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penetapan Hari Jadi Propinsi Kalimantan Selatan, yang menetapkan tanggal 14 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemekaran kembali terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957, sebagian besar daerah sebelah barat dan sebelah utara wilayah Kalimantan Selatan berdiri sendiri sebagai Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tambah menyempit lagi karena dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 bagian Utara dari Kabupaten Kotabaru, yaitu daerah Tanah Grogot dimasukkan ke dalam Provinsi Kalimantan Timur (Ideham, ed., dkk., 2003).

Sejak tahun 1959 itulah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan wilayah, dan tetap seperti adanya dengan tujuh Daerah Tingkat II. Adapun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang merupakan dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan terakhir

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menetapkan Provinsi Kalimantan Selatan beribukota di Banjarbaru.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah, maka terpisahkan urusan pusat dan daerah. Sesuai Undang-Undang tersebut, maka daerah di Indonesia dibagi atas Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) dan Daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Pada Daswati I ada dua jabatan yang terpisah yaitu Gubernur dan ada pula Kepala Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat (pemegang kendali Pemerintahan Umum) diangkat langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan Kepala Daerah (pemegang Kendali Otonomi) adalah Kepala Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I). Kepala Daerah dipilih melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil pemilu 1955 dengan berpedoman pada PP Nomor 44 Tahun 1957.

Kepala Daswati I Kalimantan Selatan pertama hasil pemilihan di DPRD Provinsi adalah H. Maksid, yang pada saat bersamaan Gubernur Kalimantan Selatan dijabat oleh Sarkawi.

Perkembangan selanjutnya dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah terjadi lagi perubahan tata pemerintahan daerah yang cukup prinsipil yaitu Kepala Daerah tidak hanya memegang kekuasaan Otonomi Daerah, tetapi juga memegang urusan Pemerintahan Umum Pusat.

Dengan Penetapan Presiden di atas, jabatan Gubernur dan Kepala Daerah yang semula dipisah, akhirnya dicabut karena pimpinan dalam bidang pemerintahan umum pusat di daerah dan pimpinan dalam bidang pemerintah daerah diletakkan di tangan seorang Kepala Daerah.

Ketika masa jabatan Sarkawi berakhir, maka H. Maksid adalah pemegang jabatan gubernur sekaligus kepala daerah sehingga saat itu jabatannya disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah bertanggal 01 September 1965, maka nama Daswati I berubah menjadi Provinsi dan Daswati II menjadi kabupaten/Kotamadya.

Gubernur Kepala Daerah, Gubernur KDH Tk.I, atau Gubernur Kalimantan Selatan selanjutnya adalah Aberani Sulaiman, Subardjo Soerosaroyo, Mistar Tjokrokoesoemo, Muhammad Said, M. Sjachriel Darham, Gusti Hasan Aman, Rudy Ariffin, dan Sahbirin Noor.

Dalam narasi juga dimuat selintas nama tokoh yang menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur seperti Abu Yazid Bustomi, Muhammad Yamani, Tarmizi Abdul Karim, Tursandi Alwi, dan Safrizal Z.A. yang mempunyai tugas antara lain mempersiapkan pemilihan gubernur/wakil gubernur.

Dalam narasi profil juga disebutkan nama-nama Wakil Gubernur (Imansyah periode tahun 1965-1967, Muhammad Said periode tahun 1981-1984, Soenarso periode tahun 1987-1992, Gusti Hasan Aman, periode tahun 1992-1995, Bachtiar Murad periode tahun 1995-2000, Husin Kasah periode tahun 2000-2005, M. Rosehan Noor Bahri periode tahun 2005-2010, Rudy Resnawan periode tahun 2010-2015 dan periode tahun 2016-2021, dan Muhidin periode 2021 s.d 2024) sebagai pasangan Gubernur KDH Tk. I di era pemerintahan Orde Baru, atau Gubernur Provinsi di era pemerintahan sesudah reformasi.

Buku ini sudah barang tentu tidak dapat merekam semua kiprah atau kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik, yang telah dilaksanakan oleh para gubernur. Namun paling tidak dapat memberikan informasi terkait profil tokoh

bersangkutan selama menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan, atau Gubernur Kalimantan Selatan.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan buku ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih disampaikan kepada para keluarga dan kerabat gubernur dan informan yang pada saat pengumpulan data memberikan informasi yang diperlukan.

Dengan segala kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan isi buku ini. Selamat membaca.

Banjarmasin, Juli 2024

**Tim Penyusun**

# DAFTAR ISI

**SAMBUTAN KETUA UMUM DHD 45 — iv**

**KATA PENGANTAR — v**

**DAFTAR ISI — xii**

**DAFTAR GAMBAR — xiii**

1. Pangeran Mohamad Noor — 1
2. Mas Moerdjani — 29
3. R.T.A. Milono — 45
4. Sarkawi — 59
5. Maksid — 77
6. Aberani Sulaiman — 91
7. Subardjo Soerosarojo — 109
8. Mistar Tjokrokoesoemo — 125
9. Muhammad Said — 133
10. Gusti Hasan Aman — 155
11. Sjachriel Darham — 169
12. Rudy Ariffin — 187
13. Sahbirin Noor — 205

**DAFTAR PUSTAKA — 227**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Ir. Pangeran Mohamad Noor, Gubernur Borneo [Kalimantan] — 4
- Gambar 2. Gubernur Borneo [Kalimantan], Ir. P.M. Noor bersama pimpinan ALRI Divisi IV — 7
- Gambar 3. Bioskop Rex yang Menjadi Saksi Bisu Rapat Umum — 9
- Gambar 4. Ir. P.Noor sebagai Gubernur Kalimantan Pertama — 14
- Gambar 5. Ir. P.M. Noor bersama mantan Presiden Drs. Moh. Hatta — 19
- Gambar 6. Wakil Presiden RI pertama Bung Hatta didampingi Ir. P.M. Noor — 21
- Gambar 7. Ir. P.M. Noor memimpin rapat pengerukan Sungai Barito — 22
- Gambar 8. Ir. P.M. Noor meninjau pengerukan Sungai Barito — 23
- Gambar 9. Ir. P.M. Noor bersama isteri — 25
- Gambar 10. Makam Ir. P.M. Noor dan Isteri di Komplek Pemakaman Sultan Adam — 26
- Gambar 11. Tugu di muka gubernuran di Jalan Tugu — 34
- Gambar 12. Gubernur Moerdjani menyambut kedatangan Presiden Soekarno — 37
- Gambar 13. Gubernur Moerdjani dan Presiden Soekarno di lapangan terbang Ulin — 38
- Gambar 14. Presiden Soekarno didampingi Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani — 39

- Gambar 15. Di tanah lapangan Merdeka Banjarmasin, ketika Bung Karno didampingi dr. Moerdjani — 40
- Gambar 16. Ir. D.A.W. Van Der Pijl. 1901-1974 — 42
- Gambar 17. R.T.A. Milono dan Isteri — 46
- Gambar 18. Gubernur Milono dalam sebuah aktivitas bersama wartawan — 48
- Gambar 19. Balai wartawan di Banjarmasin tahun 1960 — 52
- Gambar 20. Gubernur Milono menyalami Acting Gubernur Kalimantan Selatan, Sarkawi — 54
- Gambar 21. Bendera pertama Universitas Lambung Mangkurat — 56
- Gambar 22. Kiai Sarkawi di antara para pejabat pamongpraja bumiputera di Onderafdeling Barabai — 62
- Gambar 23. Lukisan perkawinan Sarkawi tahun 1928 — 63
- Gambar 24. Sarkawi selaku Bupati HSS pertama — 65
- Gambar 25. Gubernur Milono menyalami Acting Gubernur Kalimantan Selatan, Sarkawi — 66
- Gambar 26. Gedung Pemuda di Banjarmasin, 1960 dibangun oleh acting Gubernur Kalimantan Selatan, Sarkawi tahun 1957 — 69
- Gambar 27. Gubernur Sarkawi bersama anak isteri dan kerabat — 70
- Gambar 28. H. Sarkawi dan isteri, Hj. Masmulia — 72
- Gambar 29. Gubernur Sarkawi bersama isteri dan delapan anaknya — 74
- Gambar 30. Makam H. Sarkawi di Jl. Manjang Barabai — 75
- Gambar 31. Kedatangan Kolonel Achmad Yani, Deputi II KASAD — 81
- Gambar 32. Tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme — 82

- Gambar 33. Kolonel M. Yusi (selaku Pangdam X/LM, menggantikan H. Hassan Basry) — 83
- Gambar 34. Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, tahun 1960 — 84
- Gambar 35. Jenderal A.H. Nasution — 85
- Gambar 36. H. Maksid dan isteri — 86
- Gambar 37. H. Maksid dan isteri pada sebuah acara — 90
- Gambar 38. Mayor H. Aberani Sulaiman dengan pistol di pinggang, sedang berbincang dengan H. Damanhuri — 95
- Gambar 39. Dari kanan ke kiri: Mayor H. Aberani Sulaiman, Lettu A.M. Tobelo, Letnan Kolonel Hassan Basry (Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan), Lettu Daeng Lajida, Mayor P. Arya — 96
- Gambar 40. Letkol H. Aberani Sulaiman selaku Dan Rem Hulu Sungai ditugaskan memulihkan keamanan — 97
- Gambar 41. Pangdam X/LM Amir Machmud — 99
- Gambar 42. Gubernur H. Aberani Sulaiman melantik sumpah jabatan pemerintahan — 102
- Gambar 43. Suasana unjuk rasa para pelajar SMEP, SMP dan sekolah lainnya yang tergabung dalam KAPPI — 103
- Gambar 44. Pemakaman Hasanuddin HM — 105
- Gambar 45. Gubernur Subardjo bersama Isteri — 111
- Gambar 46. Gubernur Subardjo Soerosaroyo saat menyambut kedatangan Presiden Soeharto — 115
- Gambar 47. Gubernur Subarjo didampingi Mendikbud RI Dr. Daoed Joesoef meresmikan selesainya pembangunan gedung Museum Lambung Mangkurat — 116



- Gambar 48. Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin — 118
- Gambar 49. Penandatanganan kontrak pembangunan Masjid Sabilal Muhtadin oleh Gubernur Subardjo dengan kontraktor — 119
- Gambar 50. Gubernur Soebardjo dan Teks Prasasti Pemancangan Tiang Pertama Masjid Raya Sabilal Muhtadin — 120
- Gambar 51. Penentuan arah kiblat saat pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin — 121
- Gambar 52. H. Subardjo dan isteri, Hj. Syahrizada — 122
- Gambar 53. Putra-Putri H. Subardjo-Hj. Syahrizada — 123
- Gambar 54. Ramah Tamah dengan Mendagri Soepardjo Roestam — 126
- Gambar 55. Serah Terima Rektorat Universitas Lambung Mangkurat bantuan Presiden pada tanggal 21 Mei 1981 — 127
- Gambar 56. Peresmian Gedung Wanita — 130
- Gambar 57. Gubernur Ir. H. Muhammad Said bersama isteri Hj. Noorlatifah Said — 135
- Gambar 58. Ir. H.M. Said mendampingi Presiden Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko — 137
- Gambar 59. Momen pelantikan Ir. H. Muhammad Said sebagai gubernur periode kedua — 138
- Gambar 60. Gubernur Said dan Ibu saat berjabat tangan dengan Presiden Soeharto — 140
- Gambar 61. Gubernur Ir. H.M. Said, tengah, mendampingi Prof. Dr. Emil Salim — 141
- Gambar 62. Gedung Bundar Sultan Suriansyah yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Ir. H.M Said — 142
- Gambar 63. Jembatan Barito salah satu ikon Kalimantan Selatan — 144

- Gambar 64. Pak Said dan ibu Hj. Noorlatifah Said berhalal bil halal dengan karyawan/karyawati di gubernuran — 145
- Gambar 65. Ir. H.M. Said saat memberikan arahan dalam sebuah pertemuan — 146
- Gambar 66. Ir.H.M. Said menerima penghargaan dari Presiden Soeharto — 147
- Gambar 67. Ir.H.M. Said menerima penghargaan dari Presiden Soeharto — 149
- Gambar 68. Syekh Abdul Karim al-Banjari di kediaman beliau di Makkah, menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Said dan Ust Chairani Idris — 150
- Gambar 69. H.M. Said Bersama Prof Nurcholish Madjid didampingi KH. M Rafi'i Hamdie, Chairani Idris, di Banjarmasin — 151
- Gambar 70. Pasangan muda, Ir. H.M Said dan isteri — 151
- Gambar 71. Pengantin Baru, Ir. H.M Said dan Noorlatifah — 152
- Gambar 72. Ir. H.M. Said bersama isteri dan empat putra-putrinya — 153
- Gambar 73. . H. Gusti Hasan Aman bersama isteri Hj. Siti Farida — 156
- Gambar 74. Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman di Banjarmasin atas nama Presiden RI menyematkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) — 158
- Gambar 75. . Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman didampingi Bupati Hulu Sungai Utara H. Suhailin Muchtar —159
- Gambar 76. Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman, bersama pelajar — 161

- Gambar 77. Sjachriel Darham mendampingi Mendagri dan Otonomi Daerah, Soerjadi Soedirdja — 162
- Gambar 78. Bersama Presiden Soeharto — 163
- Gambar 79. Dengan Presiden Ketiga RI, Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie, pada saat pembukaan seminar 23 Maret 1999 — 165
- Gambar 80. H. Gusti Hasan Aman bersama K.H. Zaini Abdul Ghani (Guru Sekumpul) — 167
- Gambar 81. Gusti Hasan Aman bersama isteri, Hj. Siti Farida — 168
- Gambar 82. H. M. Sjahriel Darham mendampingi Mendagri dan Otonomi Daerah, Soerjadi Soedirdja saat kunjungan ke Kalimantan Selatan — 170
- Gambar 83. H.M. Sjachriel Darham bersama staf ketika di lapangan — 171
- Gambar 84. H.M. Sjahriel Darham saat berdialog dengan masyarakat — 172
- Gambar 85. Gubernur H. M. Sjahriel Darham atas nama Presiden RI di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin menyerahkan Anugerah Satya Lencana Karyasetya kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan — 174
- Gambar 86. Gubernur H.M. Sjahriel Darham dan isteri berinteraksi dengan warga — 175
- Gambar 87. Proyek Jalan dan jembatan yang dibangun di era Gubernur Sjachriel Darham — 177
- Gambar 88. Gedung Mahligai Alquran. Dibangun pada masa Sjahriel Darham — 178
- Gambar 89. H.M. Sjahriel Darham dalam momen panen jagung — 179

- Gambar 90. Gubernur H.M. Sjachriel Darham memimpin rombongan Tanah Bumbu dan Balangan menghadap Mendagri Hari Sabarno di Jakarta menyampaikan usul pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan — 180
- Gambar 91. Ketua PPKB Syachrani Ahing bersama Teras Narang, H. Baderani, H. Jayadi Hasan saat di Gedung DPR RI — 181
- Gambar 92. Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB) saat foto bersama di Gedung DPR RI Jakarta — 181
- Gambar 93. Sjachriel Darham bersama Sultan Hamengku Buwono X — 182
- Gambar 94. Sjachriel Darham saat melantik Walikota Banjarmasin, Sofyan Arpan — 184
- Gambar 95. H.M Sjahriel Darham bersama keluarga — 185
- Gambar 96. H. Rudy Ariffin bersama isteri — 189
- Gambar 97. Rudy Ariffin saat menerima lencana penghargaan — 190
- Gambar 98. H. Rudy Ariffin dalam keseharian — 191
- Gambar 99. H. Rudy Ariffin bersama anak-anak Pramuka — 192
- Gambar 100. H. Rudy Ariffin bersama pimpinan perusahaan EG Group — 193
- Gambar 101. H. Rudy Ariffin bersama Gusti Rusdi Effendi, Pimpinan Umum SK Banjarmasin Post Group — 194
- Gambar 102. H. Rudy Ariffin dikenal umara yang dekat dengan ulama — 195
- Gambar 103. H. Rudy Ariffin di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) yang dibangun di masa jabatannya sebagai Gubernur — 196
- Gambar 104. Rudy Ariffin bersama Bupati Tanah Bumbu saat peresmian selesainya proyek pembangunan — 197

- Gambar 105. Gubernur H. Rudy Ariffin pada saat pemancangan tiang proyek pembangunan — 198
- Gambar 106. Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru — 199
- Gambar 107. Kantor Gubernur di Banjarbaru — 200
- Gambar 108. H. Rudy Ariffin menghadiri pengukuhan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat — 201
- Gambar 109. H. Rudy Ariffin dan H. Anang Ardiansyah pada acara “Batanam Karya Baharum Banua” tahun 2008 di Banjarmasin — 202
- Gambar 110. Gubernur H. Rudy Ariffin menyerahkan beberapa buku sejarah/budaya lokal kepada Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Yogya — 203
- Gambar 111. Gubernur H. Rudy Ariffin yang juga Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) bersama warga tokoh warga Banjar di Palangkaraya — 204
- Gambar 112. H. Sahbirin Noor selaku Pembina Upacara dalam Apel Gabungan — 206
- Gambar 113. H. Sahbirin Noor (Paman Birin) bersama isteri, Hj. Raudatul Jannah (Acil Odah), saat menghadiri Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala — 208
- Gambar 114. H. Sahbirin Noor saat menggunting pita penyerahan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni — 209
- Gambar 115. Salah satu even hiburan menyambut Hari Kemerdekaan — 210
- Gambar 116. H. Sahbirin Noor saat penancangan gerakan menanam untukantisipasi dampak el Nino — 211
- Gambar 117. H. Sahbirin Noor bersama Wakapolri saat *ditapungtawari* oleh Guru Wildan Salman pada penanugerahan sebagai warga Banjar — 212

- Gambar 118. H. Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalimantan Selatan membuka Banua Ekonomi Syariah Expo — 214
- Gambar 119. Kegiatan Turdes ke desa-desa bersama jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan — 215
- Gambar 120. H. Sahbirin Noor dan Kapolda Kalimantan Selatan dalam kegiatan pemusnahan narkoba — 217
- Gambar 121. H. Sahbirin Noor saat mendampingi Wakil Presiden — 219
- Gambar 122. Gubernur H. Sahbirin Noor menerima penghargaan dari Bapak Presiden saat Musrenbangnas tahun 2024 — 220
- Gambar 123. Foto sketsa Paman Birin dan Acil Odah — 221
- Gambar 124. Gubernur H. Sahbirin Noor saat menerima penghargaan dari DHN 45 — 222
- Gambar 125. Gubernur H. Sahbirin Noor menerima penghargaan TPID Award Tahun 2024 — 224
- Gambar 126. Paman Birin saat melakukan penutupan 200 siswa Diksar Menwa di eks Lokasi Hari Pangan Sedunia — 225
- Gambar 127. Pesan H. Sahbirin Noor kepada Resimen Mahasiswa — 226



**PANGERAN MOHAMAD NOOR**  
**GUBERNUR BORNEO [KALIMANTAN] PERIODE 1945-1947**

Ir. H. PANGERAN MOHAMAD NOOR merupakan Gubernur Borneo [Kalimantan] yang pertama dan satu-satunya pasca proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, sebanyak 8 provinsi dibentuk. Salah satunya adalah Provinsi Borneo. Dia ditunjuk sebagai gubernurnya, setelah A.A. Hamidhan menolak jabatan itu. Namun, Provinsi Borneo ini hanya bertahan sampai 1947 yaitu ketika ditetapkannya Persetujuan Linggarjati. Pasal 1 persetujuan ini antara lain berbunyi *Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera*. Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggarjati adalah Kalimantan Selatan berada di luar wilayah Republik Indonesia, dan dengan sendirinya kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi, karena dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947.

Suatu ketika ia pernah mengoreksi dan mencoret satu huruf M dari nama Pangeran Mohammad Noor yang disodorkan Sekretaris Pribadi kepadanya, sehingga menjadi Pangeran Mohamad Noor. Tidak Muhammad, karena menurut anak-anaknya, Pak Noor merasa kedhaifannya untuk menyandang secara penuh nama Muhammad pada dirinya, nama Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Sehingga jadilah Pangeran Mohamad Noor sebagai nama yang resmi. Namun ia lebih menyukai menyingkat gelar aristokratnya Pangeran dengan P dan Mohamad dengan M sehingga namanya biasa ditulis P.M. Noor (Zuhri, 1981; Mansyur, dkk. 2019).

### **Masa Kecil, Pendidikan dan Karier**

P.M. Noor dilahirkan pada tanggal 24 Juni 1901 di Martapura. Jelas sekali, jika melihat nama dan tempat kelahirannya, terbesit satu hal, yaitu keturunan bangsawan.



Martapura adalah bekas pusat Kesultanan Banjar. Sudah barang tentu masih ada anak-cicit bangsawan yang bergelar Pangeran, Gusti, atau Antung.

Namun perlu diketahui, gelar bangsawan di Martapura sudah tidak seistimewa pada era kesultanan dulu. Status sosial para manusia “berdarah biru” itu tidak lebih tinggi dari pejabat Belanda. Bahkan berada di urutan terbawah; mulai dari bangsa Eropa, Timur Asing, lalu pribumi. Namun, karena para bangsawan ini masih mempunyai warisan kekayaan yang cukup, akhirnya mereka bisa “mengecap” bangku pendidikan. Oleh karena itu, tak jarang para bangsawan ini menjadi pegawai negeri atau istilah pada waktu itu adalah *ambtenaar* (Saleh, Asnawi, *et al.*, 1977; Saleh, Jamal, *et al.*, 1977).

Memang benar, dia adalah keturunan Bangsawan Banjar. Ayahnya bernama Pangeran Ali yang mempunyai garis keturunan sampai ke Sultan Adam Al Wasiqbillah. Sedangkan ibunya bernama Ratu Intan binti Pangeran Kesuma Giri. Jika melihat silsilah dari pihak ibu, berarti P.M. Noor juga keturunan bangsawan Kesultanan Pulau Laut. Karena Pangeran Kesuma Giri adalah anak dari Pangeran Jaya Sumitra, raja pertama Kesultanan Pulau Laut (Mansyur, 2017).

Pangeran Ali bekerja sebagai pegawai negeri (*ambtenaar*) dengan jabatan Kiai atau *Districthoofd* (Kepala Distrik). Sebuah jabatan yang bertugas memimpin sebuah distrik di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo. Selain itu, Pangeran Ali adalah anggota paling awal Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat) untuk Borneo.



Gambar 1. Ir. Pangeran Mohamad Noor, Gubernur Borneo [Kalimantan].  
Sumber: Hassan Basry (1961).

P.M. Noor mengenyam pendidikan di berbagai daerah. Pada tingkat *Volkschool*, dia bersekolah di Kotabaru lalu pindah ke Amuntai dan selesai tahun 1911. Kemudian dia melanjutkan sekolah ke *Hollands Inlandse School* (HIS) di

Banjarmasin (selesai tahun 1917), *Hogore Burger School* Surabaya (selesai tahun 1923), dan *Technische Hooge School* (THS) Jurusan Insinyur Sipil di Bandung, lulus tahun 1927 hingga mendapatkan gelar Insinyur (Ir) (Zuhri, 1981).

Naluri P. M. Noor sebagai seorang teknokrat tumbuh sejak dia berusia kanak-kanak. Noor kecil selalu pulang ke rumah (lain kepunyaan) orang tuanya di Pantai Hambawang setiap libur sekolah di HIS Banjarmasin dengan menumpang kapal sungai. Perjalanan Banjarmasin-Pantai Hambawang ditempuh dengan perahu (yang melalui Amuntai) atau bersepeda. Dalam perjalanannya itu, tak jarang dia mendapati bencana banjir yang menggenangi rute sungainya, termasuk di Amuntai. Rupa-rupanya bencana itu menyita pikirannya. Kelak, pikiran ini merupakan titik awal pengerjaan proyek Sungai Barito, bendungan serba guna Riam Kanan, Karang Kates Kalo Konto, Polder Amuntai, pengendali banjir, persawahan pasang surut, dan banyak gagasan besar lainnya untuk pengendalian air (Zuhri, 1981).

Kepedulian dan keberpihakannya kepada nasib rakyat terus dipupuk ketika dia tumbuh dewasa. Ketika sedang belajar di *Technische Hooge School* Bandung pada tahun 1927, dia terlibat aktif dalam pergerakan Jong Islamiten Bond (selanjutnya disingkat JIB). Salah satu tujuan JIB adalah mencerdaskan umat Islam dengan pendidikan (Abdul Rahman *et al.*, 2006).

Di JIB pula, bakat kepemimpinan P.M. Noor dimatangkan. Kondisi keragaman suku, pikiran dan tempaan dari kaderisasi JIB membentuk karakter P.M Noor menjadi seorang muslim yang cerdas dan tangkas. Selain itu, di JIB dia terbiasa menangani isu-isu tentang masyarakat yang membuat perspektif kebangsaannya utuh.

Dengan tempaan dan jejaring yang demikian, tidak mengherankan selepas lulus dari *Technische Hooge School*

Bandung, karirnya terus menanjak. Berikut jabatan yang diembannya sebelum proklamasi:

1. Insinyur sipil pada Departemen Burgelijke Openbare Werken (Departemen Pekerjaan Umum) sejak 1 Juli 1927;
2. Insinyur Irigasi dengan penempatan di Tegal pada 1 Juli 1927 – 1929;
3. Insinyur Irigasi dengan penempatan di Malang tahun 1929-1931;
4. Insinyur sipil pada Departemen Verkeer & Waterstaat (Departemen Jalan dan Pengairan) di Batavia tahun 1931-1933;
5. Lid Volksraad (dewan rakyat) perwakilan Kalimantan tahun 1931-1939;
6. Insinyur sipil pada Departemen Verkeer & Waterstaat Banjarmasin tahun 1933-1936;
7. Gedelegeerde Volksraad di Batavia tahun 1936-1937.
8. Insinyur Departemen Verkeer & Waterstaat di Bandung tahun 1937-1939;
9. Insinyur Irigasi di Lumajang tahun 1939-1941;
10. Sectie-Ingeniur di Banyuwangi tahun 1941-1942;
11. Kepala Irigasi di Bondowoso tahun 1942-1945;
12. Wakil *Sumobucho Doboku Gunseibu* (Sekjen Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum Pemerintah Pendudukan Jepang) tahun 1945.

## **Bapak Bangsa dari Kalimantan**

Menjelang proklamasi, Pangeran Mohamad Noor dipilih menjadi anggota BPUPKI (*Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; Dokuriztu Zyunbi Tyoosakai*). Namanya tercantum sebagai enam anggota baru dari 62 anggota BPUPKI. Dr. K.R.T. Radjiman

Wedyodiningrat, ketua sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, menyebut namanya dengan Tuan Mohammad Noor (Bahar *et al.*, 1992).



Gambar 2. Gubernur Borneo [Kalimantan], Ir. P.M. Noor bersama pimpinan ALRI Divisi IV di Tuban. Sumber: Hassan Basry (1961).

Kemudian pada sidang BPUPKI yang kedua, Radjiman membentuk panitia yang akan merancang “pembelaan tanah air” dan dia sendiri yang menjadi ketuanya. Radjiman Wedyoningrat sendiri menyebut nama-nama 22 orang anggota, di antaranya tertulis nama “Mohd. Noor” (Yamin, 1959). Tuan Mohammad Noor” atau tertulis “Mohd. Noor” dalam buku *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* dari Prof. Mr. H. Muh. Yamin (1959) orang yang sama, tidak lain adalah Ir. Pangeran Mohamad Noor sebagai wakil Kalimantan (Yamin, 1959).

Saat menjadi anggota BPUPKI, ada suatu peristiwa yang sangat diingatnya. Ia menyebutnya dengan nama “*Operation Kalimantan*” (Zuhri, 1981) yang mengharuskan dia

bergerak secara rahasia. Kondisi ini membuat P.M. Noor membawa bekal pakaian cukup seminggu. Pada operasi itu, dia diminta datang ke Surabaya untuk menemui Drs. Mohammad Hatta. Dan hasil kesepakatan dengan Hatta, pembicaraan dilanjutkan di Banjarmasin. Perjalanan tersebut direncanakan menggunakan pesawat angkut angkatan laut Jepang (Zuhri, 1981).

Di luar dugaannya di pesawat itu ada Panglima Tertinggi Angkatan Laut Jepang untuk Asia Tenggara, Admiral Shibata (Zuhri, 1981). Penerbangan yang seharusnya dapat ditempuh satu jam, malah terbang berputar-putar beberapa lama di atas laut di selatan Sampit (Zuhri, 1981). Menurut seorang juru bicara Jepang yang berbisik kepadanya, pesawat dilarang mendarat karena lapangan terbang Banjarmasin sedang dibom pesawat pembom B28 Sekutu.

Hal ini membuat "*Operation Kalimantan*" sungguh menegangkan. Tidak terbayangkan kalau pesawat-pesawat pemburu Sekutu mengetahui posisi mereka, "pesawat pasti ditembak jatuh", kenang P.M. Noor (Zuhri, 1981). "Syukur *alhamdulillah*, Tuhan Yang Maha Esa melindungi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung Hatta terhindar dari marabahaya." Kata P. Noor dengan perasaan lega (Zuhri, 1981). Akhirnya, pesawat yang mereka tumpangi itu bisa mendarat dengan selamat. Bukan di lapangan terbang Ulin, melainkan di sebuah lapangan terbang dekat Pelaihari (lapangan terbang Maluka) (Wajidi, 2014).

Pertemuan lanjutan itu akhirnya jadi dilakukan di Banjarmasin. Pada malam hari setelah kedatangan, rapat umum segera dilaksanakan di Bioskop Rex. Tempat itu sengaja dipilih untuk mengelabui sekutu. Antusias rakyat Banjarmasin menjadi-jadi ketika mengetahui Bung Hatta hadir. (Zuhri, 1981). "Waktu memasuki gedung rapat (bioskop Rex), saya sudah dapat merasakan, bahwa '*Operation Kalimantan*'

sudah mencapai sukses.” Kata P. Noor dengan mata berbinar dan perasaan syukur (Zuhri, 1981).



Gambar 3. Bioskop Rex yang Menjadi Saksi Bisu Rapat Umum. Sumber: Twitter @potretlawas.

Hanya dengan melihat wajah Bung Hatta semangat rakyat sudah meluap-luap.”Ketika rapat baru akan dimulai, sirine berbunyi tanda bahaya. Rupanya Balikpapan sedang dibom Sekutu. Rapat bubar. Tapi setelah tanda “semua aman” (*all clear*), rakyat yang masih berkerumun di halaman di depan tempat kedua mereka menginap, sempat mendapat sedikit wejangan dari Bung Hatta. Waktu itu suasana agak kegelap-gelapan, tetapi sangat memuaskan rakyat Kalimantan dan seraya menyerukan bahwa mereka berada di belakang Republik Indonesia (Zuhri, 1981).

Pagi harinya mereka juga harus mencari perlindungan di Gubernuran karena Banjarmasin telah dibom sekutu. Setelah semua aman, ada pembagian tugas di antara kedua pelaksana “*Operation Kalimantan*”. P.M. Noor bertemu dengan pemimpin-pemimpin/wakil-wakil rakyat di Balai Kota. Sesudah pertemuan selesai P.M. Noor berkeyakinan bahwa “ misi

Hatta ke Banjarmasin telah sukses seperti yang diharapkan. Rakyat di Kalimantan akan berdiri sepenuhnya di belakang Negara Republik Indonesia yang akan dibentuk” (Zuhri, 1981).

Rupanya “*Operation Kalimantan*” yang berbahaya itu mengajarkan P.M. Noor dalam masa Perang Kemerdekaan nanti untuk melakukan “*clandestine operation*” serupa tapi tidak sama. Sebagai Gubernur Kalimantan pertama ia mengirim infiltran-infiltran bersenjata ke Kalimantan dari Yogyakarta lewat pelabuhan-pelabuhan Tegal, Gresik, Tuban dan Purbolinggo (Zuhri, 1981).

Rupanya ada hal yang sangat berkesan bagi P.M Noor ketika ia bersama Bung Hatta dalam perjalanan dari lapangan terbang dekat Pelaihari ke Banjarmasin yang berjarak kurang lebih 60 km. Mereka melihat suatu daerah padang alang-alang yang luasnya sejauh-jauh mata memandang. Ucapan dan saran Bung Hatta menggugah P.M. Noor sebagaimana diakuinya dalam tulisannya:

*Spontan Bung Hatta meminta kepada saya untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai seorang insinyur irigasi untuk menjadikan padang alang-alang itu sawah-sawah yang subur. Lupa perang, lupa pemboman, hanya pembangunan yang diperhatikan! Sejak saat itulah berkembang idée cita-cita ke arah suatu konsepsi untuk pembangunan Kalimantan [tentunya Indonesia seluruhnya] (Zuhri, 1981).*

Ide-ide dan konsep-konsep itu yang kelak dikembangkannya antara lain dalam Proyek Sungai Barito. (*Barito River Authority*). Hanya saja bukan semata-mata karena itu. Mimpi dan imajinasinya pada masa kecil ketika melihat kehidupan rakyat kecil yang melarat turut memberi warna dalam ide-ide pemikirannya.



## Gubernur Borneo [Kalimantan]

Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, wilayah Republik Indonesia yang disepakati oleh PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*) meliputi bekas wilayah kolonial Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II. Wilayah itu pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan secara administratif dibagi atas delapan Provinsi dengan Gubernurnya masing-masing:

1. Jawa Barat (Sutardjo Kartohadikusumo)
2. Jawa Tengah (R. Pandji Suroso)
3. Jawa Timur (plus Madura) (R.A. Soerjo)
4. Sumatra (Mr. Teuku Mohammad Hassan)
5. Celebes [Sulawesi] ( Dr. G.S.S.J. Ratulangie)
6. Sunda Kecil (*Kleine Sunda Eilanden*) (Mr. I Gusti Ktut Pudja)
7. Maluku (termasuk Papua) (Mr. J. Latuharhary)
8. Borneo [Kalimantan] (Ir. Pangeran Mohamad Noor).

Diangkatnya P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan tidak terlepas dari penolakan A.A. Hamidhan (wakil Kalimantan dalam PPKI) untuk menduduki jabatan Gubernur Kalimantan yang ditawarkan kepadanya. Penolakan Hamidhan untuk menjadi gubernur tentu mengherankan para peserta sidang yang hadir, sampai-sampai Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta bertanya: “Dan bagaimana dengan Saudara?” tanya Bung Hatta pada Hamidhan. Dengan tegas A.A Hamidhan menjawab bahwa ia tetap berjuang di bidangnya sebagai wartawan (Wajidi, 2023).

Otto Iskandar Dinata yang kala itu khusus ditugaskan untuk mengadakan *feeling* pengangkatan para Gubernur Daerah di luar Jawa berkata: “Saya heran, hanya saudara yang tidak menerima untuk dijadikan Gubernur, sedangkan lain-lain utusan tidak ada yang menolak. Kalau begitu,

siapakah yang saudara usulkan?” tanya Otto dengan segala keheranan (Wajidi, 2023). Lalu A.A. Hamidhan mengusulkan nama P.M. Noor untuk menduduki jabatan tersebut. Padahal anggota PPKI dari luar Jawa semuanya bersedia menjadi Gubernur, kecuali A.A. Hamidhan yang menyatakan ingin tetap di posisinya sebagai wartawan, walau ia kemudian diangkat menjadi anggota KNIP (Wajidi, 2023).

Selaku Gubernur P. M. Noor segera membentuk stafnya antara lain: Gusti Ibrahim (Kepala Bagian Umum), Masri (Sekretaris), Nachli (Kepala Bagian Keuangan), Imansyah dan M. Saleh (Staf Khusus/Pribadi), Abdurachman (Bagian Keamanan), Gusti Malioner, Gusti Charidji Kesuma, Gusti Mayor (Zuhri, 1981).

Tiga orang putra P.M. Noor ikut serta juga membantu ayahanda mereka: Mansyuri Noor membantu pekerjaan sehari-hari ayahnya, Roesli Noor menjadi anggota gerakan di bawah tanah di bawah pimpinan tokoh intel Zulkifli Lubis, dan Rizali Noor bergabung pada Biro Perjuangan Seberang pada Kementerian Pertahanan di Yogyakarta (Zuhri, 1981).

Semula Kantor Gubernur Kalimantan berkedudukan di Jakarta (sekarang lokasinya kantor Mahkamah Agung RI, Jalan Lapangan Banteng Timur). Terdorong oleh rasa tanggung jawab yang besar, Gubernur P. M. Noor berusaha untuk berangkat ke ibu kota Banjarmasin menempati posnya. Bekerjasama dengan (BPOG) (*Badan Pembantoe Oesaha Goebernoer Republik Indonesia Daerah Borneo*), P.M. Noor bersama staf dan sejumlah ± 120 orang pemuda Kalimantan pada akhir Oktober 1945 merencanakan berangkat dari Surabaya dengan menggunakan kapal *Merdeka*. Rombongan ini juga mendapat bantuan dari Radio Surabaya berupa dua pemancar radio dan anggota-anggota Palang Merah seperti Tjilik Riwut, Abdurrachman dan A. Barmawi Thaib. Akan tetapi rombongan itu gagal berangkat. Kapal mereka tertembak

Sekutu (NICA) karena dalam waktu yang hampir bersamaan Surabaya terperangkap dalam pertempuran 10 November 1945 yang terkenal itu (Nila Suseno, 2003).

Setelah peristiwa itu belum ada lagi usaha ke Kalimantan. Sementara itu ketika Jakarta karena tekanan pendudukan Belanda, Pemerintah RI menjadi tidak aman. Pada tanggal 4 Januari 1946 Pemerintah RI, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menterinya, termasuk Gubernur-Gubernur Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil beserta semua stafnya ikut pindah ke Yogyakarta. Yogyakarta dipilih menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. P.M. Noor selaku Gubernur Kalimantan membuka kantornya di Jalan Pakualaman 2.

Tjilik Riwut dalam testimoninya, mengatakan:

*“Gubernur Kalimantan Pertama Ir. Pangeran Mohammad Noor telah mengkoordinir langsung semua perjuangan pada saat itu. Beliau yang mengatur siasat perjuangan untuk merebut Kalimantan dari tangan penjajah. Maka dengan demikian pada tempatnyalah dalam tulisan ini kami menyatakan hormat yang setinggi-tingginya atas segala jasa/bhakti beliau dalam memimpin/menyatukan perjuangan saat itu.....”* (Zuhri, 1981).

Selama menjabat Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta, P.M. Noor telah menggunakan segala daya upaya untuk mengawal Kalimantan tetap sebagai bagian dari NKRI. Strategi untuk kembali menguasai Kalimantan dari blokade Belanda, diatur dengan cermat oleh P.M. Noor dari Yogyakarta. Setidaknya P.M. Noor mendukung unitarisme dan menolak keras federalisme.

Atas inisiatif Gubernur Kalimantan P.M. Noor, KSAU Suryadharma, Mayor Tjilik Riwut membentuk “Pasukan

Payung RI Kalimantan”. Latihan dilakukan seadanya di Maguwo tentang pendaratan dari udara, teori tanpa praktik. Semuanya putra Kalimantan. Berangkat tanggal 17 Oktober 1947 sejumlah 14 pemuda jam 1.30 dari Maguwo. Komandan pasukan kecil itu dipercayakan kepada Letda Iskandar. Mayor Tjilik Riwut karena ia menjadi Komandan dari pasukan MN 1001 dan ia juga harus menyiapkan penerjunan, berikutnya tidak ikut terjun. Pasukan payung itu terjun di daerah Kota Waringin. Dari 14 orang anggota, seorang gagal. Peristiwa terjun payung dengan korban pihak Indonesia merupakan peristiwa heroik dalam perlawanan di Kalimantan yang menelan korban di pihak Indonesia. Penerjunan pasukan payung ini adalah yang pertama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia (Ideham *et al.*, 2003).



Gambar 4. Ir. P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan Pertama. Di belakang berdiri A. Sinaga. Sumber: koleksi Wajidi.

Melalui koordinasi Gubernur Kalimantan, beberapa ekspedisi lintas laut ke Kalimantan berlangsung secara bergelombang. Tercatat beberapa ekspedisi lintas laut dari Jawa ke Kalimantan, antara lain ekspedisi rombongan TKR Laut Tegal, ekspedisi rombongan Husin Hamzah dan Firmansyah, ekspedisi rombongan PMC, ekspedisi pimpinan Mayor Tjilik Riwut, ekspedisi rombongan “9 pelopor”, ekspedisi I dan II pimpinan Letnan Asli Zuchri, ekspedisi III pimpinan Mustafa Ideham, ekspedisi IV pimpinan Kapten Danussaputera (Ideham *et al.*, 2003). Selain itu ekspedisi juga dilakukan oleh rombongan Haji Abdul Hamid, kelahiran Martapura, berangkat dari Pekalongan 2 Februari 1946 dan tiba di daerah Air Hitam Kecil, Kalimantan bagian Selatan pada tanggal 17 April 1946 (Nawawi, 1980; Wajidi, 2015).

Di antara ekspedisi adalah sekelompok kecil yang dipimpin oleh Hassan Basry, seorang guru agama Islam di Ponorogo asal Kandangan. Ia mula-mula dikirim oleh PRIK Surabaya sewaktu memuncaknya pertempuran dengan pasukan Inggris pada bulan November 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945, ia berangkat dengan Perahu Layar Bintang Tolen menuju Banjarmasin (Wajidi, 2015).

Kemudian pada 18 November 1946, Hassan Basry mendirikan Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan di Haruyan. Batalion ini berinduk kepada Markas Besar Divisi IV ALRI di Jawa yang pembentukannya diresmikan P.M. Noor bersama-sama dengan Laksamana Moh. Nazir di Malang (Wajidi, 2015, 2017, 2023).

Selain Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan, terdapat Batalion lainnya yakni Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “B” di Kalimantan Barat, Batalion Rahasia Divisi IV “C” di Kalimantan Timur dan Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “D” di Riau.

Mengenai MN 1001, pasukan ini dibentuk oleh Gubernur Borneo/Kalimantan P.M. Noor saat berkedudukan di Yogyakarta sebagai bagian dari TRI (Suriani, 1993). MN 1001 berarti seribu satu macam cara untuk merebut kembali Kalimantan dari pendudukan Belanda atau seribu satu akal untuk mencapai kemerdekaan bagi Kalimantan (Suriani, 1993; Zuhri, 1981; Antemas, 1988)

P.M. Noor mengirim rombongan pasukan-pasukan bersenjata (ekspedisi) dengan perahu-perahu dari pelabuhan-pelabuhan di pantai utara pulau Jawa ke Kalimantan. Hasil perjalanan keseluruhannya terbentuk pasukan MN 1001 di 68 tempat (terhitung Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat) (Zuhri, 1981).

Pasukan MN 1001 telah beberapa kali mengalami pergantian atau perubahan nama, yakni dari nama MN 1001 menjadi MTK dan kemudian menjadi MTKI (Mandau Telabang Kalimantan Indonesia). Perubahan nama ini, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu.

## Melawan Federalisme Van Mook

Setelah Konperensi Malino, Belanda melanjutkan odengan Perundingan Linggarjati tanggal 11 November 1946. Dalam Perundingan ini pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

Dengan Persetujuan Linggajati pihak Belanda dengan gigihnya menyodorkan politik negara federal seperti memaksakan berdirinya “Negara Kalimantan (Borneo)” dengan terlebih dahulu membentuk daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang dilengkapi dengan Dewan Banjar (Wajidi, 2023).

Menyikapi perundingan Linggarjati, para utusan SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) yaitu E.S. Handuran, A.

Sinaga, dan A.A. Rivai menemui Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohamad Noor di Ibukota RI, Yogyakarta, untuk melaporkan keadaan perjuangan di Kalimantan Selatan. Mereka juga menemui Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta berupa dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia bertanggal 20 November 1946.

P.M. Noor harus menyesuaikan diri dengan yang ada. Menurutnya, setelah infiltrasi bersenjata, kini ia memasuki fase infiltrasi politik ke daerah pendudukan Belanda di Jakarta. Berkedok dibalik sebuah yayasan, P.M. Noor sebagai pemrakarsa sekaligus sebagai Ketua bersama dua *founding fathers* lain, Sukardjo Wirjopranoto dan Prof. Dr. Mr. Soepomo masing-masing sebagai anggota mendirikan Yayasan Dharma dengan motto "Pembangunan, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan".

Sementara itu van Mook berhasil juga membentuk negara Pasundan, Jawa Timur, dan Madura untuk mengepung wilayah Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Selain itu, di luar Jawa ia membentuk Negara Indonesia Timur untuk daerah-daerah yang pada jaman kolonial disebut *Groote Oost* (Timur Besar).

Berbeda dengan pembentukan negara-negara bagian seperti yang sudah disebutkan di atas, di Kalimantan van Mook menggunakan cara-cara lain yang tidak langsung. Ia memulai dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai persiapan pembentukan Negara Borneo yang telah ia rencanakan. Van Mook menyiapkan lebih dahulu daerah-daerah otonom dalam bentuk dewan-dewan seperti: Daerah Istimewa Borneo Barat tanggal 9 Mei 1947, Dewan Banjar di Kalimantan Selatan 14 Januari 1948, Dayak Besar, 7 Desember 1946, Borneo Tenggara, 8 Januari 1947, Borneo Timur, 12 Mei 1947. Mengenai Dewan Kota Waringin, para anggota dewan sebagian besar akan dipilih (Zuhri, 1981).

Pada tanggal 27 Januari 1948 Belanda melangsungkan Konferensi Borneo dengan tujuan membentuk Negara Borneo. Utusan dari Borneo Selatan tidak hadir karena pada daerah tersebut terdapat organisasi-organisasi pro-republik seperti SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) dan SERMI (Serikat Muslimin Indonesia) masih kuat. Konferensi itu mengeluarkan resolusi pembentukan sebuah badan pekerja yang akan merancang suatu tatanegara bagi Negara Borneo. Rencana itu harus segera disampaikan kepada semua Dewan Daerah singga pada konferensi berikut Negara Borneo dengan perwakilannya sudah terbentuk.

Untuk mewujudkan Negara Borneo [Kalimantan], maka putra-putra Kalimantan yang pro federalisme yang berada di Jawa, telah mempersiapkan calon-calon Presiden Negara Kalimantan yang disebut juga dengan gelaran “Wali Negara Kalimantan”. Ir. Pangeran Mohamad Noor adalah satu calon dari tiga lainnya, yaitu: Sultan Hamid II, Sultan Parikesit dari Kutai, dan Mr. Tajuddin Noor (Wajidi, 2023).

Akan tetapi sampai terbentuk dan bubarnya Republik Indonesia Serikat, negara bagian Borneo itu tidak pernah terbentuk dan Presiden Negara Borneo tidak pernah dipilih. Sejak tentara Australia resmi ditarik dari Kalimantan tanggal 15 Juli 1946, tentara NICA harus menghadapi sendiri perlawanan-perlawanan rakyat. Semua perundingan-perundingan diplomatik sejak dari Hoge Veluwe, Malino, Linggajati dan lain-lain yang bertujuan membentuk Negara Borneo tidak menyurutkan perlawanan bersenjata rakyat Kalimantan. Rupanya perlawanan-perlawanan bersenjata yang dilancarkan baik melalui ekspedisi-ekspedisi dari pulau Jawa yang dikordinasi oleh P.M. Noor, terlebih-lebih perlawanan rakyat yang berada di pulau Kalimantan sendiri, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, maupun Kalimantan Timur sejak awal-awal kemerdekaan Agustus



1945 sampai dengan pertengahan tahun 1949 turut memberikan andil bagi kegagalan itu semua. Di Kalimantan Selatan, misalnya berbagai macam laskar, pasukan, gerilyawan, muncul sampai kepada MPK (Markas Pertahanan Kalimantan) ALRI Divisi IV di bawah pimpinan PU (Pimpinan Umum) Hassan Basry ikut menentukan gagalnya proyek Negara Borneo-nya van Mook (Ideham *et al.*, 2003).



Gambar 5. Ir. P.M. Noor bersama mantan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta saat melakukan kunjungan ke Waduk PLTA Riam Kanan (kini Waduk PLTA P.M. Noor) didampingi Ir. M. Said (kelak Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Selatan). Sumber: Anonim.

### **P.M. Noor dan Prestasinya**

P.M. Noor telah mengisi usianya dengan perjuangan dan pengabdian yang bermanfaat tidak saja bagi diri dan keluarganya, tapi lebih luas lagi dari pada itu untuk kemaslahatan orang banyak, bagi Negara dan bangsa. Sebagai seorang Insinyur (Sipil) idée dan pemikirannya senantiasa dilandasi oleh hal-hal yang pragmatis sehingga

apapun yang dipikirkan dan dilakukannya dapat menghasilkan karya-karya yang nyata dan berguna.

Ia adalah anggota BPUPKI satu-satunya asal Kalimantan. Bersama-sama dengan anggota-anggota lain ia ikut menyiapkan kemerdekaan bagi bangsa dan tanah air Indonesia.

Sebagai gubernur Kalimantan pertama (1945). Ia menggunakan segala kecerdasan dan kemampuannya untuk mengawal Kalimantan tetap sebagai bagian dari wilayah Negara kesatuan Indonesia.

Tanggal 20 Oktober 1945 pembentukan pasukan “MN 1001”. Namanya menjadi sebutan abadi untuk pasukan “MN 1001” (“Mohamad Noor, seribu satu” macam cara untuk merebut kembali Kalimantan dari Belanda/NICA).

Ia adalah pencetus *ide* pasukan payung (*para toops*) yang terjun di Kalimantan sebagai salah satu cara menembus blokade laut oleh Belanda.. Idenya disambut antusias oleh Kepala Staf AU Komodor S. Suryadharma. Setelah melalui latihan darurat (*crash program*), dilaksanakan (*action*) tanggal 17 Oktober 1947.

Bersama Laksamana Muda AL Moh. Nazir membentuk Divisi IV ALRI untuk Kalimantan di Malang. Kerjasama antara pasukan MN 1001 dan Divisi ALRI “A” merupakan dua kekuatan bersenjata terbesar di Kalimantan Selatan menghadapi Belanda. Mereka bekerjasama dengan A.H. Nasution (kemudian Jenderal Besar) menyiapkan ekspedisi-ekspedisi bersenjata ke Kalimantan.

Ir. P.M. Noor berperan aktif dalam pengambilalihan Kantor *Kotubu Bonsitsu* (ex- V & W) dari tangan Jepang di Bandung tanggal 25 September 1945 (sekarang disebut Gedung Sate) dan dijadikan Kantor Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Ia dipercayakan memimpin kantor tersebut sebagai Direktur Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Pada tanggal 4 Oktober 1945 tentara Sekutu disertai serdadu Belanda/NICA mulai memasuki kota Bandung dan membuat kekacauan. Atas inisiatif Ir. P.M. Noor segenap pegawai PU di bawah pimpinannya pada tanggal 20 Oktober 1945 mengangkat Sumpah Setia kepada Pemerintah R.I. Ini menumbuhkan rasa patriotisme di kalangan Gerakan Pemuda PU. Tanggal 3 Desember 1945 pecah pertempuran antara pemuda-pemuda PU yang mempertahankan kantor itu melawan serdadu Belanda/NICA yang menyerang dengan senjata berat sehingga jatuh korban tujuh orang pemuda PU yang tewas. Sejak itu setiap tanggal 3 Desember peristiwa heroik itu selalu diperingati sebagai Hari Kebaktian Pekerjaan Umum.



Gambar 6. Wakil Presiden RI pertama Bung Hatta (depan kiri) didampingi Ir. P.M. Noor (depan tengah) berkenan mengunjungi Proyek PLTA Riam Kanan. Sumber: Anonim.

Membentuk Yayasan Dharma sebagai Ketua bersama Sukardjo Wirjopranoto dan Prof. Dr. Mr. Soepomo masing-

masing sebagai anggota. “Tiga serangkai” meluncurkan majalah republikan yaitu *Mimbar Indonesia* di daerah pendudukan Belanda di Jakarta tanggal 10 November 1947 (Antemas, 1988). Majalah itu merupakan media pencerahan tentang arti kemerdekaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (unitarisme).

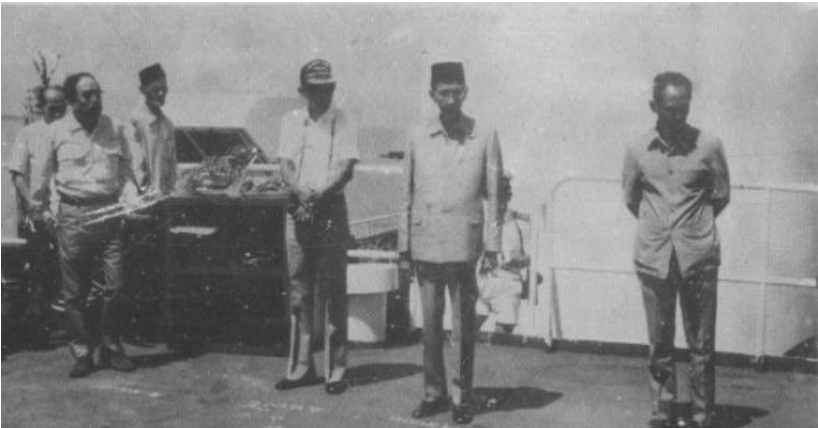
Pemrakarsa gagasan *Proyek Sungai Barito*, yang lebih dijabarkan dengan nama *Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Barito (Barito River Basin Development Project)*. Berhasil merampungkan pembangunan PLTA (*Hydro Electric Power Station*) Riam Kanan di Kabupaten Banjar yang dibiayai dari pampasan perang Jepang, berkapasitas penuh 30 Mega Watt dan masih surplus 20 Mega Watt; sehingga di kemudian hari tersedia fasilitas air bersih yang berlebihan untuk PAM di kota Banjarmasin dengan *in take*-nya yang berlokasi di Sungai Tabuk (20 km dari Banjarmasin); pengerukan muara/ambang Sungai Barito yang memungkinkan kapal-kapal samudra berukuran 6000 DWT, draft 21 feet, dengan leluasa masuk-keluar pelabuhan samudra Banjarmasin.



Gambar 7. Ir. P.M. Noor memimpin rapat pengerukan Sungai Barito. Sumber: Asikin Zuhri (ed.), 1981.

Pemrakarsa gagasan *Proyek Pasang-Surut* untuk meningkatkan usaha transmigrasi (*Trans- Sumatra Waterway* dan *Kalimantan Coastal Canal*)

Pemrakarsa Proyek Perluasan Persawahan Pasang-Surut. Sejak tahun 1974 secara besar-besaran sudah masuk dalam program pemerintah/Departemen Pekerjaan Umum (Pelita II): 250.000 hektar. Pada masa sedang giat dilaksanakan dan ditingkatkan.



Gambar 8. Ir. P.M. Noor meninjau pengerukan Sungai Barito. Sumber: Asikin Zuhri (ed.), 1981.

Telah dicetuskan gagasan yang mutakhir dengan judul *Proyek Tiga Serangkai*, yang terdiri atas tiga proyek sebagai “*one package deal*” (satu paket yang tidak terpisah-pisah), yaitu: (a). pembangunan sebuah pelabuhan khusus untuk kayu (*log harbor*) dengan segala fasilitasnya; (b). pembangunan sebuah *industrial/real estate* (kawasan industri dan kawasan pemukiman/perumahan), yang akan merupakan faktor penarik utama bagi penanaman modal di Kalimantan Selatan, khususnya, di sekitar kota Banjarmasin yang merupakan suatu sentrum ekonomi di daerah Kalimantan

Selatan; (c). pembangunan sebuah *Banjarmasin By-Pass*, yang sebagai suatu konsekuensi logis akan menghubungkan industrial/*real estate* tersebut sub-b dan Pelabuhan Samudra Trisakti Banjarmasin dengan daerah pedalaman (*hinterland*) yang mempunyai potensi kekayaan alam yang sangat besar dan *by-pass* itu merupakan satu-satunya saran yang efektif bagi perkembangan kota Banjarmasin, yang dalam situasi sekarang seolah-olah sudah tidak bisa bernapas lagi.

Selain menjadi Gubernur pertama Kalimantan, semula berkedudukan di Jakarta kemudian pindah ke Yogyakarta, P.M. Noor merangkap anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RI. Bersamaan dengan itu antara 1945-1946 diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam Kabinet Presidentil I. Kemudian antara 1950-1956, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Sementara (DPRS), dan antara 1956-1959, menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Karya. (Zuhri, ed. 1981)

Dari berbagai prestasi yang ditorehkan P.M. Noor sebagai seorang insinyur sipil maupun saat menduduki jabatan penting di pemerintahan, sebagaimana tergambar di atas, maka tidaklah mengherankan para tokoh dan masyarakat di Kalimantan menganugerahinya gelar: "*Abah Pembangunan*".



Gambar 9. Ir. P.M. Noor bersama isteri, Gusti Aminah. Sumber: koleksi Wajidi.

### **Akhir Hayat**

Pada usia 77 tahun, tepatnya pada 15 Januari 1979, Ir. P.M. Noor dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ia

dimakamkan disamping istri tercinta Gusti Aminah yang sudah mendahuluinya di TPU Karet Jakarta. Jenazahnya mendapat upacara kenegaraan, dan disemayamkan di gedung MPR/DPR Senayan. Upacara pelepasan dipimpin oleh Ketua DPR/MPR Daryatmo. Tiga puluh satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2010, atas permintaan keluarga, kerangka Ir. P.M. Noor dan isterinya kemudian dipindahkan ke Komplek Pemakaman Sultan Adam, Martapura, Kalimantan Selatan. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TK/Tahun 2018 pada tanggal 06 November 2018, Ir. P. H. M Noor ditetapkan sebagai pahlawan nasional.



Gambar 10. Makam Ir. P.M. Noor dan Isteri di Komplek Pemakaman Sultan Adam, Martapura. Sumber: wikipedia.org.

Perjalanan hidup Ir. P.M. Noor merupakan pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Segala aspek perjuangan dan pengabdianya bagi negara dan bangsa dapat menjadi suri teladan. Berkat kecerdasannya ide-ide besarnya jika bisa



dilaksanakan sebagian, apalagi bila seluruhnya akan menjadikan negara dan bangsa ini makmur sejahtera. Tapi ia menyadari betul bahwa itu mustahil direalisasikan dalam satu atau dua generasi. Namun ia telah meninggalkan *cetak-biru* (*blue print*) bagi generasi penerus. Terserah kita mau mengikuti atau tidak. Pembangunan negara dan bangsa harus selalu berlanjut—sebuah estafet panjang dan melelahkan. Maka bukan kebetulan jika pada akhir-akhir hayatnya ia memberikan pesan berselubung bahwa pekerjaan (*gawi*) belum usai (*tuntung*). Dan tidak akan pernah usai karena itulah dinamika kehidupan. Ada generasi-generasi berikutnya yang akan terus melanjutkannya seperti mengalirnya kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan pengabdian. Bisa diartikan pesan simbolik dari P.M. Noor, "*Teruskan...Gawi kita balum tuntung.*"



**MOERDJANI**  
GUBERNUR KALIMANTAN (1950 – 1953)

Dokter Mas MOERDJANI dikenal sebagai seorang dokter lulusan STOVIA tahun 1932, yang kemudian dipercayakan pemerintah untuk menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan periode 1950-1953. Provinsi Kalimantan di sini adalah salah satu provinsi yang dibentuk sesudah pengakuan kedaulatan (*transfer of sovereignty*) oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

## Keluarga dan Pendidikan

Moerdjani kelahiran Surabaya Jawa Timur tahun 1902 dari keluarga pangrehpraja (Antemas, 1988). Tempat tinggal orang tuanya di sekitaran daerah Bubutan, daerah Kepanjen, daerah Jembatan Merah (Artha, 1975).

Mengutip tulisan Artum Artha (1975), Moerdjani pernah bersekolah di *Europesche Lagere School* (ELS) di Surabaya, terus melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), kemudian ke *Algemene Middelbare School* (AMS). Setamat dari AMS meneruskan studinya ke sekolah pendidikan dokter pribumi di Batavia (kini Jakarta) yaitu STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*) selesai pada tahun 1932 setelah menempuh pendidikan selama lebih kurang 6 tahun.

Tak lama kemudian, di tahun 1932 ia langsung dipekerjakan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Magelang. Ilmu pengetahuannya tentang kesehatan dicurahkan kepada masyarakat. Moerdjani mempunyai jiwa sosial yang tinggi, suka mengunjungi masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Tidak lama di Magelang, ia dipindahkan ke Bali. Di Pulau Dewata ia mengorganisasi Partai Parindra dan Perguruan Taman Siswa (Antemas, 1988).

## Aktifis Pergerakan

Sejak tahun 1919 Moerdjani remaja sudah menjadi anggota organisasi Indonesia Muda (IM) dan Jong Islamieten Bond di Jakarta, kemudian menjadi anggota partai politik. Bermula dari organisasi Budi Utomo hingga Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), kemudian Partai Indonesia Raya (Parindra) bersama-sama dr. Sutomo, dr. Wahidin Sudirohusodo, M.Husni Thamrin, Sukarjo Wiryopranoto dan lain-lain tokoh partai politik (Antemas, 1988; Artha, 1975).

Pada tahun 1944 saat Jepang berkuasa, dr. Moerdjani diangkat sebagai Bupati dalam keresidenan Indramayu. Setelahnya ia diberi tugas jabatan sebagai Residen dalam keresidenan Cirebon tahun 1945. Pergulatan hidup dan politik pemerintahan sekitar 1944 dan tahun 1945 ketika memegang jabatan Residen, membawa karir dan cita-citanya lebih mantap. Moerdjani kian dekat dengan rakyat yang harus dibinanya.

Aktivitas pergerakan kebangsaan Moerdjani mencapai kematangannya ketika ia bergabung dalam organisasi Parindra sebagai salah seorang Ketua Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) Parindra (partai Indonesia Raya di Surabaya. Di Organisasi ini, sejak 1939 ia berjuang bersama dengan dr. Sutomo.

Ia semestinya diutus oleh Pedoman Besar Parindra ke Banjarmasin untuk memimpin Kongres Parindra ke-3 di Bioskop Eldorado (kini eks Bioskop Merdeka) Pasar Lama Banjarmasin Namun keberangkatannya batal, karena sudah mengendus adanya penolakan dari pihak pemerintah terhadap kongres itu. Terbukti, rapat umum yang diselenggarakan sebelum puncak acara Kongres Parindra yang seharusnya dibuka tanggal 10 Mei 1940 itu dibubarkan oleh Polisi PID

(*Politieke Inlichtingen Dienst*) tanpa syarat apa-apa (Artha, 1975; Wajidi, 2023).

Selama menjadi seorang Parindrist di Surabaya, Moerdjani aktif dalam pers dan jurnalistik bersama dr. Sutomo seperti menerbitkan Harian Tempo, Harian Umum dan majalah bulanan "Soeara Parindra". Moerdjani menyayangi wartawan dan membina pers nasional. Itulah pula sebabnya dia sewaktu kelak bertugas di Banjarmasin, ia disegani para wartawan.

dr. Moerdjani masih tetap di Surabaya namun kemudian ia diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat berkedudukan di Bogor sekitar tahun 1946. Dan ketika itu masa pemerintahannya terbilang sangat singkat, atau kurang dari setahun, namun ia berhasil membereskan sesuatu hal yang pelik karena keadaan politik. Semenjak itu ia diberikan julukan oleh kawan-kawannya sebagai Gubernur politik. Sebagai seorang Gubernur politik, tentunya pula banyak memakan dan meminum asam garam politik, sosial-ekonomi dan sosial kebudayaan dalam arena politik kebangsaan Indonesia.

Moerdjani adalah sahabat baik Soekarno, Presiden Pertama RI, sebab sama-sama tergabung dalam organisasi politik PNI. Oleh karena itu, Soekarno mempercayainya untuk mengemban jabatan dalam pemerintahan. Tidak lama di Jawa Barat, Pemerintah RI kemudian mempercayakan kepadanya untuk mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Timur antara tahun 1947-1949 berkedudukan di Surabaya.

Kembali mengutip tulisan Artum Artha (1975), setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur, ia membuka praktik umum sebagai dokter masyarakat. Kepada pasien yang tidak mampu membayar ongkos pengobatan di rumah sakit Karang Menjangan dan poliklinik lainnya, diberikannya bantuan ala kadarnya atau dibebaskan biaya pengobatannya. Namanya

kian populer di kalangan masyarakat umum. Oleh masyarakat, Moerdjani dapat lagi gelar: dokter masyarakat.

Selama 12 tahun pengalamannya jadi dokter praktik umum, selama itu pula ia tahu dan dekat dengan rakyat yang menderita macam-macam sakit dan penyakit. Ia pun mengerti sebab-musabab keadaan dan kedunguan kaumnya, bangsanya dan daerahnya, sehingga menguatkan semangat kebangsaan yang melekat kuat dalam hatinya untuk berjuang memajukan bangsanya.

Sampai menjelang awal tahun 1950 ia masih di Surabaya. Saat itu, Pemerintah RI menaruh perhatian terhadap Kalimantan yang sejak lama lowong pimpinan pemerintahan sejak P.M. Noor tak dapat lagi menjabat sebagai implikasi Persetujuan Linggarjati yang menjadikan Kalimantan secara de facto dan de jure di bawah kekuasaan Belanda.

## Gubernur Kalimantan

Selepas pengakuan kedaulatan dan terbentuknya RIS, beberapa daerah ciptaan Belanda seperti daerah-daerah Banjar, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kotawaringin bergabung ke Pemerintah Republik. maka Pemerintah RI kembali memilih Moerdjani untuk mengemban tugas sebagai Gubernur Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Pada tanggal 14 Mei 1950 ia bersama Menteri Dalam Negeri RI, Mr. Soesanto Tirtoprodjo tiba di Banjarmasin. Oleh Menteri ia ditunjuk dan dilantik untuk mengatur jalannya pemerintahan selaku Gubernur Kalimantan (Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun, 1962). Ia dibantu oleh Residen Winarno untuk Keresidenan Kalimantan Selatan (Antemas, 1988).

Di Banjarmasin, Moerdjani dan isteri menempati rumah bekas kediaman Gubernur Dr. H. J. Haga (Gubernur Gewest Borneo). Rumah ini menghadap jalan Resident de Haanweg yang pada masa pemerintahan Moerdjani diganti namanya dengan Jalan Tugu (kini Jalan Jenderal Sudirman). Sebab di tepi jalan ini ada sebuah bangunan tugu nasional yang melambangkan tugu proklamasi kemerdekaan (Artha, 1975).



Gambar 11. Tugu di muka gubernuran di Jalan Tugu (kini Jalan Jenderal Sudirman). Sumber: koleksi Wajidi.

Sebagai “Gubernur Politik”, tugas Moerdjani cukup berat, karena ia mesti merintis jalannya pemerintahan republik dengan beragam persoalan seperti mengatasi gangguan keamanan oleh gerombolan bersenjata yang tergabung dalam KRlyT pimpinan Ibnu Hadjar. Ibnu Hadjar masuk hutan tahun 1950. Ia menolak pimpinan militer termasuk gubernur dijabat orang luar daerah. Pada tahun 1953, Ibnu Hadjar bersedia berdamai dengan Pemerintah atau kembali bersama TNI,

namun ia mengajukan syarat, salah satunya adalah meminta pemerintah Pusat mengangkat Ir.P.M. Noor sebagai Gubernur Kalimantan menggantikan Moerdjani (Laily Mansur, 2018).

Moerdjani juga menghadapi sejumlah ketidakpuasan beberapa kalangan di daerah pasca RIS kembali ke bentuk negara kesatuan, yaitu kekecewaan rakyat atas status daerah sebagai “Daerah Administrasi” saja. Rakyat menuntut agar daerah mereka dijadikan daerah yang otonom kembali (Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun, 1962).

Agar tidak muncul gejala yang tidak diinginkan maka selaku Gubernur Kalimantan dr.Moerdjani mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 tentang Pembentukan beberapa Kabupaten, Daerah Istimewa dan Kotapraja pada tanggal 14 Agustus 1950. Kemudian tanggal 7 Januari 1953 dikukuhkan pula dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1953. Dengan kebijakan itu, terbentuklah daerah-daerah otonom sesuai tuntutan rakyat (Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun, 1962).

Pemerintah Pusat kemudian melakukan penataan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 Nomor 8) dan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara 1953 Nomor 9) tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan dan tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan.

Guna mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban, dr. Moerdjani segera memulai serangkaian pembicaraan dengan anggota-anggota yang terpenting dari kalangan pamong praja dan angkatan kepolisian, alim ulama, wakil-wakil partai politik dan pemimpin masyarakat lainnya di



Kalimantan Selatan. Gubernur mengajak kepada para alim ulama agar mengeluarkan fatwa kepada pengikut KRlyT agar mau dan bersedia untuk berdamai dan mengemukakan “pintu untuk menyerah masih terbuka”. Tetapi ketika berakhir sebulan, dr. Moerdjani yakin metode bujuk telah gagal dan satu-satunya cara yang ditempuh adalah melakukan aksi militer (Van Dijk, 1983).

Baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, Moerdjani selaku gubernur menyambut kedatangan Presiden Soekarno untuk pertama kalinya ke Kalimantan. *Sang Putera Fajar* tiba di Lapangan Terbang Ulin, tanggal 13 September 1950 pukul tiba jam 15.30 siang.

Mengutip isi pemberitaan Surat Kabar Pengharapan Tahun 1, edisi Kamis, 14 September 1950 yang ditulis dua wartawan kawakan, Zainal dan Artum Artha, usai berpidato di hadapan rakyat di Lapangan Merdeka, eks Benteng Tatas (kini kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin) di Banjarmasin. Soekarno pun melanjutkan lawatannya ke Barabai dan Amuntai.

Di masa Moerdjani menjabat gubernur Kalimantan, Presiden Soekarno kembali berkunjung ke Kalimantan pada akhir Januari 1953 dalam rangka pemeriksaan daerah-daerah pusat kekacauan di Indonesia. Soekarno mengunjungi Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Negara, Barabai dan Amuntai. Masalah pokok selama kunjungan ke Kalimantan Selatan adalah kedudukan Islam dalam masyarakat dan masalah hangat apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau tidak, beserta masalah keamanan yang merupakan tema utama pidato-pidato Soekarno (Van Dijk, 1983).

Gubernur Moerdjani memulai serangkaian pembicaraan dengan wakil-wakil partai politik untuk membicarakan penyusunan. Partai-partai politik menggunakan kesempatan

ini untuk mengeluarkan pernyataan, supaya pemerintah melakukan tindakan keras terhadap pemberontak.



Gambar 12. Gubernur Moerdjani menyambut kedatangan Presiden Soekarno di lapangan terbang Ulin tanggal 13 September 1950. Sumber: koleksi Wajidi.

Bila pada masa Gubernur Ir.Pangeran Mohamad Noor menghasilkan suatu gagasan dan pada waktu itu belum sempat dilaksanakan, maka pada masa kepemimpinan Gubernur dr.Moerdjani inilah memulai berpemerintahan secara nyata.



Gambar 13. Gubernur Moerdjani dan Presiden Soekarno di lapangan terbang Ulin tanggal 13 September 1950. Sumber: koleksi Wajidi.

Di Banjarmasin, masyarakatnya sering memperhatikan Moerdjani sewaktu-waktu berjalan kaki, masuk kampung dan keluar kampung. Barangkali maksudnya demikian untuk mengetahui keadaan masyarakat Banjar yang sebenarnya. Ia berjalan pagi waktu pagi benar, kemudian kembali ke rumah sekitar jam 07.00. Duduk di kursi gubernuran mulai jam 07.30 sampai jam 10.00. Sesudah itu suka keliling ruangan kantor untuk mengetahui pegawai. Kembali bekerja mulai jam 11.00 sampai jam 13.00 (Artha, 1975).



Gambar 14. Presiden Soekarno didampingi Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani dan Letkol Sukanda Bratamenggala saat berada di lapangan Merdeka Banjarmasin tanggal 13 September 1950 sore. Sumber: koleksi Wajidi.

Disamping upaya Gubernur dr. Moerdjani mengatasi gangguan keamanan, peranan dr. Moerdjani yang patut diingat dalam pembangunan di Kalimantan Selatan antara lain idenya untuk menjadikan Banjarbaru sebagai ibukota Propinsi Kalimantan melalui program yang dikenal *Moerdjani Plan* (Artha, 1975).

Selama di Kalimantan bukti kerjanya mengadakan proyek polder bersama Ir. Schophuijs, mengadakan Moerdjani Plan dengan membangun Daerah Gunung Apam Banjarbaru. Menyiapkan pusat pemerintahan di Banjarbaru dan Puruk Cahu, menyiapkan pembangunan lapangan udara Sungai Durian- Pontianak.

Dengan keuangan negara yang serba terbatas, berikut pengalaman yang minim, namun dengan semangat yang

tinggi Moerdjani membuat perencanaan secara mikro berupa pembukaan persawahan dengan sistem polder, sebagaimana yang dilaksanakan di Negara Belanda.

Polder-polder ini terutama dibangun di daerah rawa-rawa, apakah itu rawa monoton atau rawa pasang surut yang banyak terdapat di daerah terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nama proyeknya adalah Polder Plan Kalimantan. Moerdjani dibantu seorang tenaga ahli di bidang pertanian yaitu Ir.Schopuijs. Di Kalimantan Tengah pada waktu itu sempat membangun polder Mentaren. Sedangkan di Kalimantan Selatan, dimulai pembangunan polder Alabio.



Gambar 15. Di tanah lapangan Merdeka Banjarmasin, ketika Bung Karno didampingi dr. Moerdjani (Gubernur Kalimantan) berpidato di depan rakyat berpuluh ribu banyaknya. Sumber: koleksi Wajidi.

Adapun idenya adalah mengurung rawa dengan tanggul. Dan di beberapa tempat ada pintu air masuk dan ada pintu air keluar yang dilengkapi dengan mesin pompa. Dengan sistem

itu dapat dilaksanakan sistem tata air yang dipolder (dikurung) tersebut.

Sayangnya bersamaan dengan dimulainya ide tersebut, terjadi situasi kabinet pemerintahan jatuh bangun, sehingga proyek ini tersendat-sendat. Disamping itu perencanaan juga sering berubah-ubah, dan hingga saat ini boleh dikatakan kedua pilot proyek tersebut tidak pernah selesai.

Khusus untuk polder Alabio, misalnya terjadi antara keinginan pemerintah selalu tidak sejalan dengan sebagian keinginan rakyat setempat, disamping masalah tanah yang sudah sangat sulit untuk ditertibkan.

Selain itu, ada juga areal yang harus dikorbankan, yaitu tetap menjadi rawa atau sekitar sepertiga bagian, yang oleh sebagian masyarakat setempat hal ini belum dimengerti. Apalagi belum ada kejelasan siapa yang harus menanggung beban biaya pompa yang setiap tahun harus dijalankan, baik untuk memasukkan maupun dan mengeluarkan air di polder tersebut.

Belum lagi untuk pompanya sendiri sulit mendapatkan suku cadang, mengingat pabrik mesin pompa itu sendiri berasal dari Italia yang sudah bubar. Namun gagasan besar berupa sistem polder ini, oleh beberapa kalangan berpendapat barangkali masih perlu untuk dikaji ulang kembali. Terutama untuk beberapa areal di kawasan tertentu yang sulit untuk dilakukan pengeringannya.

Karya Gubernur Moerdjani lainnya adalah dimulainya rencana pembangunan kota Banjarbaru sebagai kota yang benar-benar baru yang diharapkan dapat menjadi ibukota Provinsi Kalimantan. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu seorang ahli perencanaan tata kota bernama Van der Pijl.



Gambar 16. Ir. D.A.W. Van Der Pijl. 1901 – 1974. Sumber: koleksi Museum LM.

Permasalahan kesehatan lingkungan sebagai salah satu alasan pemindahan kantor Gubernur dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Sebagai seorang dokter yang menjabat sebagai gubernur yang suka masuk dan keluar kampung, dan ditambah pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat (1946) dan Gubernur Jawa Timur (1947), ia memahami keterkaitan kondisi lahan Banjarmasin dengan kesehatan lingkungan saat itu.

Sebagai dokter sekaligus gubernur, dr. Moerdjani menganggap kondisi lingkungan kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibukota provinsi dan merencanakan pemindahannya ke daerah Gunung Apam, Banjarbaru sekarang, yang meski mendapat tantangan dari masyarakat, akhirnya dibenarkan manfaatnya (Antemas, 1988).

Banjarmasin berada nol meter di bawah permukaan laut, sering dipengaruhi oleh pasang surut laut yang merendam lahan dan jalanan di kota Banjarmasin, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas jalan darat yang saat itu jalan darat tidak sebanyak sekarang.

Menurut M.P. Lambut yang mengalami masa pemerintahan Moerdjani, ada alasan lain bagi Gubernur Moerdjani menjadikan Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yaitu sebagai nasionalis ia ingin ibukota Provinsi Kalimantan dari negara Indonesia merdeka dibangun sebagai kota yang benar-benar baru yang terlepas dari pengaruh jajahan. Jelas sekali alasan dipakai selain faktor geografis, lingkungan dan kesehatan adalah juga spirit nasionalisme yang tidak ingin mempertahankan Banjarmasin karena kota bekas jajahan.

Rencana pemindahan ibukota provinsi ke Banjarbaru berupa penyiapan kantor pemerintahan dan perumahan pegawai merupakan salah satu dari tiga Agenda Moerdjani (*Moerdjani Plan*). Dua agenda lainnya adalah pengelolaan sumber daya air (sungai dan rawa) dalam bentuk pembuatan anjir, waduk, dan penataan lingkungan air/rawa untuk memberantas penyakit malaria, dan agenda untuk meningkatkan sarana dan kualitas pendidikan rakyat di Kalimantan (Artha, 1975: 27-28).

Meski Agenda Moerdjani itu menimbulkan pro dan kontra saat itu sebagaimana tercermin pada pemberitaan surat kabar Suara Kalimantan, edisi 1 September 1953; rencana Moerdjani untuk memindahkan ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru terus dilanjutkan oleh gubernur berikutnya, yakni Raden Tumenggung Ario Milono, Gubernur ketiga Provinsi Kalimantan (1953-1957).



## Akhir Hayat

dr. Moerdjani mempunyai seorang isteri yang cekatan kebetulan berprofesi sebagai dokter kesehatan bernama: dr. Sri Sumeni. Pernah menjabat sebagai Kepala/Pimpinan Rumah Sakit Umum Ulin di Banjarmasin.

Beberapa tahun setelah dr. Moerdjani menjalani hak pensiun pegawai negeri, kemudian pada tahun 1958 meninggal dunia dalam usia lebih kurang 60 tahun, dimakamkan di Surabaya. Untuk mengenang jasa Moerdjani selaku Gubernur Kalimantan maka Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan mengabadikan namanya pada sebuah lapangan/taman dengan nama: Taman Moerdjani Banjarbaru.



**R.T.A. MILONO**  
GUBERNUR KALIMANTAN (1953 – 1957)

Nama aslinya RADEN TUMENGGUNG ARIO MILONO, namun dalam keseharian lebih dikenal dengan nama sebutan Milono. Beliau dilahirkan di Pekalongan pada 31 Maret 1896 dan tercatat telah meninggal dunia pada 10 Februari 1973 di Bogor. Milono adalah Gubernur Provinsi Kalimantan periode 1953 – 1957 pengganti Moerdjani yang mengundurkan diri karena sakit. Ia berjasa memekarkan Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi baru yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga berperan besar membentuk provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam catatan karirnya sebagai Gubernur, juga pernah menjabat dan dipercaya menjadi Kepala Daswati I Jawa Timur antara 1958 – 1959, berkedudukan di Surabaya.

### Keluarga dan Pendidikan

Milono diketahui putra seorang bangsawan yang berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Europesche Lagere School (ELS) yang dikhususkan untuk putra bangsawan tinggi di Pekalongan dan lulus pada 1910. Ayahnya bernama Pangeran Ario Notodirdjo. Ibunya bernama Raden Adjeng Sri Chajat. Dari pasangan ini melahirkan tiga anak, masing-masing Raden Emile



Gambar 17. R.T.A Milono dan Isteri

Moeljadi, Raden Soedarsono Moeljono, dan Raden Tumenggung Ario Milono.

Diketahui kemudian Milono melanjutkan pendidikan ke sekolah OSVIA bagian 2 di Magelang, dan mendapatkan diploma pada tahun 1917.

Setamat dari OSVIA, dia melanjutkan pendidikan ke Bestuurschool di Batavia dan mendapatkan diploma pada tahun 1931. R.T.A. Milono mengawali karirnya sebagai Wedono di Slawi, dan Tegal. Beberapa saat kemudian diangkat menjadi Mantri Polisi Tegal, Mantri Polisi Lebaksiu, Mantri Polisi Kelas I Brebes, dan Sekretaris Kelas I Banyumas.

Semenjak tanggal 10 Maret 1936, Milono diangkat menjadi Bupati Pati. Namun setelah itu tidak diketahui lagi tentang jabatannya setelah dipercaya menjadi Bupati Pati.

Pada masa pergerakan, Milono aktif dalam organisasi Persatuan Indonesia Raya (PIR). Saat di Semarang ia aktif bersama aktivis pergerakan Mr. Tajudin Noor, dan Mr. Wongsonegoro, dan sesudah kemerdekaan ia aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Ketua PBNU Dr. KH. Idham Chalid.

## Gubernur Kalimantan

Kedatangan Milono sebagai seorang yang berlatar bangsawan yang diangkat sebagai gubernur dengan beslit resmi dari Presiden RI, sempat diragukan kemampuannya dalam menjalankan misi politik pemerintahan di Kalimantan terutama di tengah masyarakat Banjarmasin yang berjiwa egaliter dan dinamis.



Kedatangannya bersama seorang isteri yang cekatan lagi pula ramah tamah, di sertai keluarganya sempat ditantang keras oleh surat kabar Suara Kalimantan dan oleh sebagian komponen masyarakat. Selebaran penolakan terhadap Milono bahkan beredar di Nyamplungan Surabaya. Wajar saja tantangan itu ditujukan kepada pribadi Milono sebab dia baru saja menginjak kota Banjarmasin.

Sebagaimana terjadi di lapangan militer berupa gejolak karena posisi penting diisi oleh tentara dari Jawa, maka di lapangan politik terjadi riak penolakan serupa. Terjadi sedikit demonstrasi menolak Milono. Namun Milono adalah orang yang sudah banyak makan asam garam politik pemerintahan. Oleh karenanya pula ia pantang mundur walau setapak. Ia menerima tugas dan kewajiban dari Kepala Negara RI. Ia harus bertekad melaksanakan program Pemerintah dalam keadaan bagaimana juapun dan apa pun yang harus dihadapinya, demikian kenang Artum Artha (1975).



Gambar 18. Gubernur Milono dalam sebuah aktivitas bersama wartawan. Sumber: koleksi Wajidi.

Milono adalah seorang pamongpraja yang sederhana namun keras dalam disiplin (Antemas, 1988). Milono menjawab keraguan sebagian kalangan dengan kerja nyata. Ia menegaskan bahwa sebagai Gubernur Kalimantan yang harus memimpin penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ia patut tampil di tengah-tengah masyarakat luas. Bukan hanya Kalimantan, akan tetapi juga Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah atau daerah terakhir ini yang di namakan Daerah Dayak Besar. Oleh sebab itu Milono dengan tegas menyatakan saya datang di Banjarmasin dan Kalimantan ini untuk melaksanakan tugas suci. Milono berjuang. Ia mempunyai program pembangunan. Ia juga bermaksud untuk meneruskan cita-cita bekas Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani (Artha, 1975).

Milono melakukan riset di lapangan dan mempelajari konsepsi bekas Gubernur Kalimantan Moerdjani. Ia mengetahui bahwa Moerdjani memegang tiga prinsip. Pertama pembangunan gedung-gedung pemerintahan dan rumah-rumah kesejahteraan pegawai negeri. Kedua penguasaan atas air yang mengandung benih penyakit malaria dan membahayakan tanaman rakyat. Ketiga nilai pendidikan rakyat se Kalimantan.

Atas dasar ketiga prinsip itu, Milono melanjutkan program yang dirintis Gubernur Moerdjani berupa penyiapan Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dibentuk kemudian (Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalbar, Kalimantan Selatan, dan Kaltim). Untuk itu, Gubernur R.T.A. Milono telah berhasil membangun beberapa sarana perkantoran di Banjarbaru, di antaranya: gedung Kantor Gubernur, Kantor Pekerjaan Umum, Kantor Pertanian Rakyat,

Kantor Perindustrian Rakyat, dan Kantor Perikanan Darat (Artha, 1975: 29).

Pada tahun 1954, Gubernur R.T.A. Milono membuat surat dengan Nomor: Des-19930-41 tertanggal 9 Juli 1954 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tentang pengusulan agar Menteri Dalam Negeri RI menyetujui penetapan kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dibentuk kemudian.

### **Dijuluki Gubernur Pendidikan**

Setelah Gubernur dr. Moerdjani berhenti dan diganti oleh Milono, cita-cita pembangunan gedung-gedung sekolah tetap menjadi prioritas pertama pembangunan di Kalimantan Selatan. Milono memprakarsai perkampungan Pelajar Mulawarman di Banjarmasin. Nama “Mulawarman” diberikan oleh Menteri PP&K Mr. Mohammad Yamin diambil dari nama Raja Kutai Lama yaitu Raja Mulawarman seorang raja kerajaan tertua di Indonesia (Nusantara) ini. Karena telah mendirikan kampung pelajar Mulawarman yang diimpikan bukan hanya masyarakat Banjarmasin melainkan juga rakyat Kalimantan maka Gubernur Milono diberi gelar kehormatan oleh masyarakat Banjar sebagai “Gubernur Pendidikan” atau “Bapak Pendidikan Kalimantan” (Artha, 1975; Barjie B, ed. 2020).

Di kompleks pelajar Mulawarman ini dibangun Sekolah Dasar Putera, Sekolah Dasar Puteri, SMP SMI dan SMA Pembangunan, dan SKP, sehingga untuk belajar di SMA tidak perlu lagi ke Jawa. Juga dibangun beberapa rumah untuk tempat tinggal para guru atau pengajar, lapangan olahraga serta gedungnya (tribun), tanaman penghijauan dan jaringan lampu listrik. Atas bantuan Amir Hasan Bondan, seorang budayawan, jalanan dalam kompleks diberi nama antara lain:

Batu Tiban dan Kinibalu. Dalam kampus pun terdapat lagi semacam museum margasatwa. Sejak tahun 1954 sampai 1957 berturut-turut dibangun bermacam gedung sekolah dan perumahan dan bahkan pada tanggal 17 Agustus 1957 diresmikan pembukaan sebuah Masjid dengan nama “Masjid 17 Agustus” untuk keperluan ibadah para pelajar dan masyarakat lainnya (Artha, 1975).

Beliau juga mendidik para pelajar untuk hidup bermasyarakat dengan baik, seperti menyiapkan Walikota dan pembantu-pembantunya di kompleks pelajar tersebut, guna mengatur kehidupan masyarakat pelajar setempat. Para pejabat itu, dipilih Milono diantara pelajar itu sendiri. Beberapa orang pegawai yang dianggap mampu dan cakap dikirimkan ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan.

Beliau dikenal sebagai sosok yang rajin mengunjungi dan berdialog dengan pelajar di SMA Mulawarman (1953-1956). Dan bersamaan dengan itu pula berdiri Milono Foundation dan Yayasan Kesejahteraan Pelajar Kalimantan (YKPK) yang banyak memberikan bea siswa kepada pelajar Kalimantan yang melanjutkan kuliahnya ke pulau Jawa hingga kelak menjadi orang yang berpendidikan. Yayasan ini juga membangun sarana dan prasarana pendidikan serta lainnya yang ada kaitannya dengan pendidikan. Sayangnya lembaga ini akhirnya lenyap tanpa bekas.

Gubernur Milono juga berperan dalam pembangunan gedung Balai Wartawan di tepi jalan Jenderal Sudirman dengan menyumbangkan biaya pembangunannya sebesar Rp 80.000 melalui Walikota Aidan Sinaga sebagai modal pertama untuk pelaksanaan pembangunannya. Namun disayangkan pula, bangunan ini juga sudah tidak ada lagi, karena di lokasinya sudah menjadi Hotel Batung Batulis, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.





Gambar 19. Balai wartawan di Banjarmasin tahun 1960 - an, dibangun dengan modal pertama Rp 80.000 oleh Gubernur Milono, sekarang dijadikan Hotel Batung Batulis. Sumber: koleksi Museum LM.

Karya Milono lainnya adalah ia bersama tokoh-tokoh pergerakan dan kaum pengusaha swasta nasional membentuk Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan (APK) yang mana dalam kepengurusan duduk sebagai pelindung. Tanggal 7 Februari 1957 yayasan ini berhasil mendirikan Akademi Perniagaan Kalimantan (APK). Selain itu, pada saat Milono meninjau hasil reuni Divisi Lambung Mangkurat di Kandangan tahun 1954 lahir keputusan mendirikan perguruan tinggi. Milono dengan APK, kemudian dilebur hingga menjadi Perguruan Tinggi dengan nama Universitas Lambung Mangkurat (disingkat UNLAM, namun di kemudian hari berubah menjadi akronim ULM) terletak di tepi jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin (Artha, 1975; Antemas, 1988; Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun, 1962; Nawawi (ed.). 1992 )

Perguruan tinggi tertua di Kalimantan ini merupakan universitas perjuangan, karena tidak terlepas dari organisasi dan gerakan para mantan pejuang yang tergabung dalam Dewan Lambung Mangkurat, dan untuk rektor pertama [saat itu disebut Presiden] Milono mendukung figur Kolonel (waktu itu) H. Hassan Basry, seorang pejuang dan mantan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

## **Pencetus Pemekaran Provinsi**

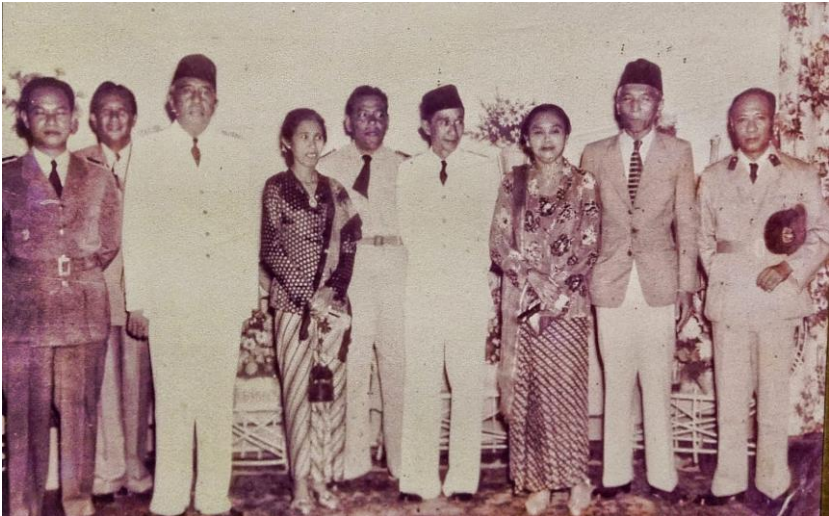
Beberapa waktu setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan (14 Agustus 1950) telah muncul aspirasi rakyat di daerah Keresidenan Kalimantan Timur dan Keresidenan Kalimantan Barat. Rakyat merasa kurang diperhatikan ketika melihat pesatnya perkembangan Kalimantan Selatan, karena ibukota provinsi di Banjarmasin maka porsi pembangunan seperti membangun gedung-gedung perkantoran dan lainnya semuanya disalurkan ke Kalimantan Selatan. Tuntutan menjadikan kedua keresidenan untuk menjadi presiden tersendiri menguat (Hassan, 1994).

Akhirnya tuntutan membuahkan hasil. Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 65 Tahun 1956) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956 (Ideham, ed., dkk, 2023).

Tiap-tiap provinsi dipegang oleh putra daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut maka berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, maka pada tanggal 9 Januari 1957 dengan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah dilakukan serah terima kekuasaan pemerintahan di

Banjarmasin antara Gubernur Kalimantan (Milono) dengan Acting [pejabat sementara] Gubernur Kalimantan Selatan Sarkawi, Acting Gubernur Kalimantan Barat Adji Pangeran Afloes [di beberapa pustaka namanya tertukar dengan A.R. Afloes, tokoh Kaltim], dan Acting Gubernur Kalimantan Timur Adji Pangeran Temanggung Pranoto. Pada kesempatan ini telah diresmikan pula oleh Menteri Dalam Negeri Kantor Gubernur Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin (Ideham ed., dkk., 2003; Antemas, 1988, Hassan, 1994).

R.T.A. Milono juga dikenal sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Karena selama menjabat Gubernur Kalimantan, ia juga menyiapkan banyak hal seperti mendirikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin.



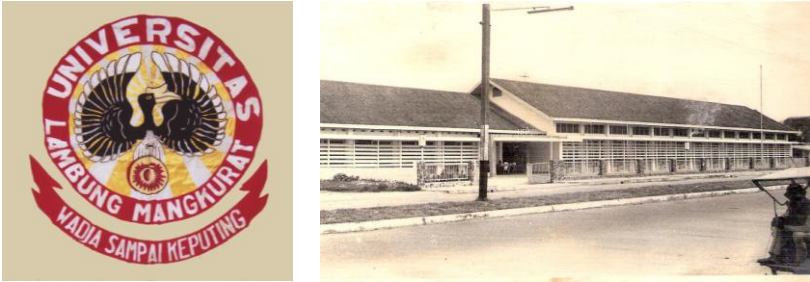
Gambar 25. Foto bersama setelah serah terima jabatan Gubernur Kalimantan dari R.T.A. Milono kepada Sarkawi selaku Acting Gubernur Kalimantan Selatan (kelak menjadi Gubernur Kalimantan Selatan). Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Selepas tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Milono diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri berkedudukan di Banjarmasin. Ia diminta melanjutkan persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Saat itu ia masih bertempat tinggal di Gubernuran di Jalan Tugu (kini Jalan Jenderal Soedirman) yaitu di Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah di Banjarmasin.

Usaha yang ia persiapkan membuahkan hasil. Menteri Dalam Negeri menyetujui pula pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dia diangkat menjadi Gubernur Kalimantan Tengah definitif dari 1 Januari 1957 sampai 30 Juni 1958. Seperti provinsi lain di Kalimantan, ia juga berhasil mengangkat putra daerah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu Tjilik Riwut.

Di kemudian hari nama R.T.A. Milono diabadikan sebagai nama jalan di Kota Palangkaraya karena peran beliau dalam pembentukan provinsi ini. Palangkaraya dibangun sebagai kota baru dari sebuah desa bernama Pahandut. Pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden Soekarno memancang tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya. Kata M.P. Lambut, desain tata kotanya mengikut Kota Saint Petersburg di Uni Soviet [kini Rusia] sebagaimana dikehendaki oleh Bung Karno yang pernah berkunjung ke Saint Petersburg.

Selepas menjabat sebagai Kepala Daswati I Jawa Timur antara 1958 – 1959, ia kembali ke Kalimantan Selatan. Di sini pada tahun 1963, Milono diangkat sebagai Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang kedua, menggantikan Hassan Basry selaku Presiden Universitas Lambung Mangkurat yang pertama.



Gambar 21. Bendera pertama Universitas Lambung Mangkurat (kiri). Kampus ULM menempati bekas bangunan ELS (Europese Lagere School) di Jalan Lambung Mangkurat, tahun 1965 (kanan). Sumber: koleksi Museum LM.

Drs. Kustan Basri (belakangan Prof) dosen yang punya hubungan pribadi dan kedinasan yang cukup intens dengan Milono selaku Rektor ULM menyatakan bahwa Milono adalah seorang yang penuh energi dan gagasan serta berhasil membangun pendidikan di Kalimantan Selatan, namun dihadapkan pada kondisi perekonomian negara yang terpuruk, anggaran kecil, peralatan dan alat mobilitas yang kurang saat menjabat rektor (Barjie B, ed., 2020).

Sebagai rektor, gaji Milono lebih kecil daripada pada gaji Pak Djahmur, pegawai senior yang bertugas membuka tutup gerbang pintu ULM, karena Milono hanya dengan isteri tanpa anak, sehingga akumulasi gajinya kecil ketimbang Pak Djahmur yang memiliki tunjangan beberapa orang anak. Sementara saat itu belum ada tunjangan jabatan rektor (Barjie B, ed., 2020).

Tahun 1967, Milono berhenti sebagai rektor karena selain sudah sampai waktunya juga sudah terlihat sangat uzur. Milono menikmati masa pensiun sebagai pegawai negeri di Bogor bersama isterinya dalam keadaan yang amat sederhana, padahal Milono seorang yang pernah menjabat Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan Tengah, Kepala

Daswati I Jawa Timur, Rektor ULM, dan sejumlah jabatan lainnya. Kata Artum Artha (1975) beberapa orang Banjar yang datang menjenguknya kadang tak kuasa menahan air mata ketika melihat kehidupan Milono saat pensiun. Tak berapa lama ia jatuh sakit, dan pada tahun 1973 di rumah kecil yang sederhana itulah ia menghembuskan nafas menuju haribaan sang pencipta.



**SARKAWI**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN (1957 – 1959)**

H. SARKAWI adalah Gubernur pertama Provinsi Kalimantan Selatan, hasil pemekaran Provinsi Kalimantan. Beliau ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat untuk menjabat gubernur. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Desember 1907. Berdasarkan buku *Stamboek soerat asal oesoel van Ahmad Dahlan Geborente di Barabai. Afdeling Kandangan Afdel 13 Radjab1288* ditulis sebagai berikut : Ayahda Sarkawi adalah Kiai Ahmad Dahlan, seorang Kiai di Barabai dengan pangkat terakhir sebagai Kepala District Kelas Satu. Sedangkan kakeknya yang bernama Demang Yuda Negara pernah menjabat sebagai Kiai di Labuan Amas Barabai. Datunya bernama Kiai Martapati yang pada zaman kerajaan Banjar menjadi Patih di watas Labuan Amas, Afdeling Kandangan.

Selain itu, diketahui pula bahwa ibunda Sarkawi bernama Gusti Bintang Swasa, putri dari Gusti Abdullah dari Palimbangan Amuntai.



Adapun kakeknya bernama Pangeran Tamjidillah, bergelar Pangeran Ngantung yang merupakan keturunan kerajaan Banjar.

Dari perkawinan Kiai Ahmad Dahlan dengan Gusti Bintang Swasa, melahirkan 5 orang anak, masing-masing bernama Ajang, Masrah, Abdul hamid (Anang Basar), Sarkawi (Anang Acil)



dan yang terakhir Abdul Galib, yang juga dikenal sebagai salah seorang pejuang.

Masa kecil Sarkawi banyak dilaluinya di Amuntai. Namun ketika ayahnya ditugaskan menjadi kiai di district Batang Alai Lok Basar Barabai, maka masa remaja Sarkawi banyak dijalannya di sana sejak menempuh pendidikan formal HIS yang kemudian melanjutkannya ke Banjarmasin untuk masuk MULO serta meneruskan ke OSVIA di Makasar.

Mengutip pemberitaan Harian *Indonesia Merdeka*, Senin 30 April 1951 berjudul “Pengangkatan Bupati<sup>2</sup>”, Lulusan OSVIA Makassar diantaranya Sarkawi bin Achmad Dahlan lahir di Amuntai 15 Desember 1907, Kiai Kepala Klas I terhitung 1 Maret 1951 sebagai pejabat Bupati Hulu Sungai di Kandangan. Rekan beliau sesama lulusan OSVIA adalah Basuni bin H. Mohammad Arsyad lahir di Barabai 31 Agustus 1904, Kiai Kepala Klas I, Acting “Bupati Banjarmasin” diperbantukan pada Gubernur Kalimantan; Achmad Ruslan lahir di Banjarmasin 31 Januari 1902, Kiai Kepala Banjarmasin, “Bupati Banjarmasin” berkedudukan di Banjarmasin.

Bila dilihat dari garis keturunan ayahnya, maka dapat dikatakan bahwa asal usul keluarga Sarkawi adalah orang-orang yang selalu memperoleh kepercayaan dari pihak pemerintah untuk menduduki posisi strategis dan penting, baik pada masa kekuasaan kerajaan Banjar maupun pada masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Terbukti Sarkawi menjadi Gubernur Kalimantan Selatan 1957 – 1959.



Gambar 22. Kiai Sarkawi, duduk di tengah, di antara para pejabat pamongpraja bumiputera di Onderafdeling Barabai. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Setelah mengikuti pendidikan OSVIA di Makasar, Sarkawi segera pulang ke kampung halaman dan karirnya sebagai seorang pamong praja dimulai dari pengangkatannya sebagai *Bestuurdienst* di Paringin pada tanggal 25 Juli 1928 oleh *Resident Der Zunder En Staraf Deeling Borneo*. Sekalipun pada waktu itu masih dalam zaman penjajahan kolonial Belanda yang dilanjutkan dengan zaman pendudukan Jepang, serta masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, tidak berarti pamong yang satu ini lebih berpihak kepada penguasa. Secara diam-diam ia juga anggota SKI dan membantu gerakan rahasia bersenjata ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.



Gambar 23. Lukisan perkawinan Sarkawi tahun 1928. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Setelah menjalankan tugasnya dengan baik di Paringin, terhitung mulai tanggal 24 Mei 1929 dalam jabatan yang sama

yakni *Bestuurdienst*, Sarkawi dipindahkan ke Amuntai. Begitu juga terhitung mulai tanggal 3 Februari 1930 ia dipindahkan ke Barabai. Dan sejak tanggal 9 Maret 1932 Sarkawi dipercaya sebagai *Onder District* di Barabai hingga tahun 1939 dan penempatannya pun berpindah-pindah dari Barabai ke Batumandi, kemudian kembali lagi ke Barabai.

Pada zaman pendudukan Jepang, sejak tahun 1941 seluruh wilayah Kalimantan berada dibawah kekuasaan Pemerintah Angkatan Laut Jepang. Pada masa itu Sarkawi pernah menempati beberapa pos jabatan penting, yakni diangkat sebagai *Foekoe Goentjo* di Batumandi oleh *Dins Banjarmasin Sjo – Tjo* terhitung ulai tanggal 25-05-2603 (sesuai penanggalan Jepang). Berikutnya diangkat *Foekoe Goentjo di Kandangan oleh Borneo MinseiboetjokanBanjarmasin* sesuai surat keputusan Nomor 1561/1588/27 terhitung mulai tanggal 03-06-2603. Dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, berdasarkan surat keputusan Nomor 2151/2468/27 terhitung mulai tanggal 18-8-2603 Sarkawi diangkat menjadi *Goentjo* di Kelua.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 2 September 1945 Ir.Pangeran Mohamad Noor diangkat menjadi Gubernur Kalimantan yang pada waktu itu disebut Borneo. Kedudukan provinsi tersebut hanya sebagai daerah administrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Perkembangan pemerintahan sempat mengalami beberapa kali pergantian seiring masuknya Belanda bersama NICA, serta perubahan bentuk negara dari RIS yang kemudian kembali menjadi negara kesatuan RI.

Selama periode tersebut, Sarkawi sempat mengalami beberapa kali pergantian jabatan diantaranya terhitung mulai tanggal 31 Januari 1946 diangkat sebagai *Districthoofd* di Kelua. Berdasarkan keputusan *Resident Zuid Borneo* Nomor 4881/II/2 terhitung mulai tanggal 22 November 1946 diangkat

menjadi Kiai Kepala di Barabai. Belum sampai satu tahun dalam jabatan itu, ia kemudian diangkat menjadi Kiai Kepala di Koeala Kapoeas terhitung mulai 27 September 1947 sesuai surat dari *Groot Dayak Raad* Nomor 68/1/24/GDR. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 25 Mei 1950 diangkat menjadi Wakil Kiai Kepala Kelas Satu Afdeling Banjarmasin, sesuai surat Menteri Dalam Negeri RIS Nomor 1063 dan enam bulan kemudian ia diangkat menjadi Kiai Kepala.



Gambar 24. Sarkawi selaku Bupati HSS pertama menyambut kedatangan Wakil Presiden Mohammad Hatta, 7 Juli 1952. Sumber: koleksi ANRI-Depo Arsip Hulu Sungai Selatan.

Sejak terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan dari RIS menjadi NKRI, maka pada tanggal 2 Desember 1950 Gubernur Kalimantan mengangkat dan melantik Sarkawi sebagai Pejabat Bupati Hulu Sungai yang pertama di Kandangan. Demikian juga melantik Anggota Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) berdasarkan hasil pemilihan pada tanggal 9 Desember 1950. Adapun lima orang

Anggota DPDS tersebut adalah H.Morhan, H.Darham Hidayat, Abdul Hamidhan, Basyuria, dan Hasbullah. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 DPDS tersebut diketuai oleh Bupati yang dalam hal ini dijabat oleh Sarkawi.

Pada tanggal 1 Oktober 1954, sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240/M, Sarkawi dipercaya menjadi Residen Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin. Setahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembagian Provinsi Kalimantan menjadi 3 (tiga) provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, ternyata mengantarkan Sarkawi yang dikenal sangat sederhana ini menjadi Acting Gubernur Kalimantan Selatan.



Gambar 25. Gubernur Milono menyalami Acting Gubernur Kalimantan Selatan, Sarkawi. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Peristiwa tanggal 9 Januari 1957 adalah saat paling bersejarah bagi kehidupan Sarkawi dan keluarganya dengan dilakukannya serah terima jabatan dari Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono kepada Sarkawi selaku Acting Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam perkembangan berikutnya ditetapkan menjadi Gubernur Kalimantan Selatan sesuai surat keputusan Presiden RI Nomor 504/M Tahun 1957 tanggal 26 September 1957.

### **Dualisme Pimpinan Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 menentukan bahwa di daerah tingkat I ada dua pejabat pimpinan yang melaksanakan fungsinya, yaitu seorang berfungsi sebagai Gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat, dan seorang lagi Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pemerintah daerah (Hassan, 1994).

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 berlaku, H. Sarkawi sudah diangkat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, dan yang menduduki Kepala Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) adalah H.Maksid yang dipilih dan disetujui DPRD Kalimantan Selatan. Istilah swatantra adalah otonomi untuk masa sekarang.

Sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah dalam mana terdapat ketentuan bahwa Gubernur merangkap juga sebagai Kepala Daerah (Hassan, 1994).

Dengan regulasi itu, daerah-daerah harus dipangku oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah. Dalam penjelasan pasal 14 Penpres Nomor 6 Tahun 1959, maka hapuslah adanya dualisme dalam pimpinan pemerintahan daerah. Tidak ada lagi Gubernur, tidak ada lagi Kepala Daerah sebagai hasil

pemilihan umum daerah 1957. Oleh karena itu harus segera dilaksanakan pemilihan Gubernur Kepala Daerah.

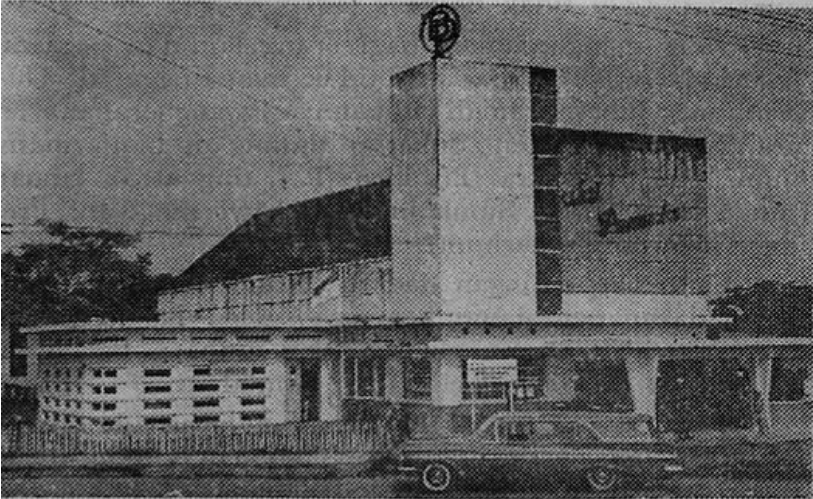
Dua orang calon maju ke sidang DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru yaitu H. Sarkawi dan H. Maksid. Sebagai hasil terakhir pemilihan menunjukkan angka kemenangan berada di tangan H. Maksid. Meskipun demikian nasib yang menimpa Sarkawi, ia sebagai pegawai tinggi yang membawahi H. Maksid (waktu itu berpangkat Wedana), bagi Sarkawi diterimanya dengan senyum kesadaran (Artha, 1975).

Kembali mengutip Artum Artha (1975) Sarkawi tetap sebagai Gubernur, tapi pangkat saja dan sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri berkedudukan di Banjarmasin untuk melakukan tugas urusan pemerintahan yang memegang jabatan Gubernur/Kepala Daerah ialah Haji Maksid. Sarkawi tidak begitu aktif lagi bekerja. Kemudian memajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk minta hak pensiun umum.

## **Bapak Pemuda**

Selama menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, banyak upaya yang ia lakukan untuk memajukan pemerintahan dan membangun daerahnya. Beliau aktif menyatukan organisasi pemuda-pemudi se Kalimantan Selatan berhimpun dalam organisasi Pekan Pemuda. Oleh karena besarnya perhatian terhadap perkembangan pemuda ketika itu, maka Sarkawi dinobatkan menjadi “Bapak Pemuda Kalimantan Selatan” yang dianugerahkan oleh kesatuan pemuda-pemudi pada tanggal 17 Agustus tahun 1957 dan sekaligus menandai diresmikannya Gedung Pemuda di Banjarmasin.





Gambar 26. Gedung Pemuda di Banjarmasin, 1960 dibangun oleh acting Gubernur Kalimantan Selatan, Sarkawi tahun 1957. Sumber: koleksi Museum LM; Artum Artha, 1975.

Dari dua prasasti yang tersisa sampai kini dan tetap diabadikan di Gedung Pemuda diantaranya disebutkan nama Sarkawi sebagai Pelindung/Pelopor Pendirian Gedung Pemuda Banjarmasin. Sedangkan pada prasasti lainnya terlihat nama Sarkawi sebagai Acting Gubernur Kalimantan Selatan terlibat dalam penanaman tiang pertama Gedung Pemuda tanggal 17 Agustus 1957, bersama-sama dengan nama Milono Gubernur Kalimantan dan Kusno Utomo Panglima Teritorial VI Tanjungpura.

Begitu juga menandai peresmian Gedung Pemuda tersebut tanggal 17 Agustus 1959, terlihat nama Sarkawi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan bersama-sama dengan nama H.Maksid sebagai Kepala Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Kalimantan Selatan dan nama A.W.Sjachrani selaku Komandan Kodam Kalimantan Selatan.

Peran Sarkawi lainnya adalah bersama Milono dan tokoh-tokoh lainnya adalah membentuk Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan (APK) yang dalam susunan kepengurusan, Sarkawi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan duduk sebagai Dewan Pengurus (Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun, 1962).

Tak hanya itu, dalam tahun 1958 nama Sarkawi Gubernur Kalimantan Selatan juga tercatat sebagai Ketua I Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat yang ketika itu Ketua Umumnya adalah Letkol H. Hassan Basry, dan pada tanggal 21 September 1958 Panitia Persiapan tersebut berhasil meresmikan berdirinya Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Setelah berdiri, ULM juga mempunyai Dewan Kurator yang diketuai oleh Sarkawi (Barjie B, ed., 2020).



Gambar 27. Gubernur Sarkawi bersama anak isteri dan kerabat. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Suatu ketika para mahasiswa Kalimantan di Jakarta yang tergabung dalam Kesatuan Mahasiswa Lambung Mangkurat (Kemala), merasakan besarnya biaya *in de kost* di Jakarta. Mereka memohon kepada Gubernur Kalimantan Selatan agar dibelikan rumah untuk dijadikan asrama. Kustan Basry yang saat itu duduk sebagai bendaharawan Kemala menceritakan bahwa Gubernur Sarkawi menyetujui mencari rumah untuk dibeli. Yang membeli adalah Yayasan Kesejahteraan Pelajar Kalimantan (YKPK) bentukan Milono, namun saat itu diketuai Gubernur Sarkawi. Rumah yang dibeli dijadikan Asrama Mahasiswa Lambung Mangkurat di Jalan Rawamangun Nomor 44 dekat dengan kampus UI Salemba (Barjie B, ed., 2020).

Gubernur Sarkawi adalah juga pemrakasa pendirian Jembatan 9 November (dahulu jembatan Empat Zaman) yang menghubungkan Pasar Lama dengan kampung Seberang Masjid. Guna membangun jembatan ini beliau mengutus tim yaitu Artum Artha yang saat itu menjabat ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin bersama Burhan Afghanie menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (Ir. Pangeran Mohamad Noor) di rumahnya di Kebayoran Baru untuk mengurus biaya pembangunannya (Wajidi, 2008).

Biaya waktu itu di rencanakan sekitar Rp. 17.500.000. Tetapi Pemerintah Pusat hanya menyediakan sekitar Rp.7.500.000. Sebab itu Gubernur Sarkawi terpaksa memanggil Kepala P.U. Provinsi Kalimantan Selatan (Kwee Hoo Lock). Bantuan biaya diterima, tetapi ukuran jembatan terpaksa di perkecil. Sebelum akhir 1959, Sarkawi memajukan tambahan biaya. Karena perubahan kenaikan harga-harga barang keperluan jembatan. Biaya ditambahkan sekitar Rp. 5.000.000. Jembatan selesai dalam tahun 1961 (Artha, 1975).

Mengutip tulisan Artum Artha (1975), sekitar bulan Juni 1957 Sarkawi aktif sebagai Penasehat Konperensi Kebudayaan se Kotamadya Banjarmasin. Menganjurkan Musyawarah Kerakatan Kalimantan Selatan, dan ia sendiri langsung memimpin musyawarah yang pertama di Gedung Wanita jalan Taman Sari. Mengadakan percobaan perkebunan ubi kayu di Tambang Ulang, Pelaihari. Untuk kemanfaatan ubi kayu ini didirikannya pabrik tapioka di Binuang. (Sayang hasilnya tidak memuaskan dan akhirnya pabrik itu ditutup).



Gambar 28. H. Sarkawi dan isteri, Hj. Masmulia. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

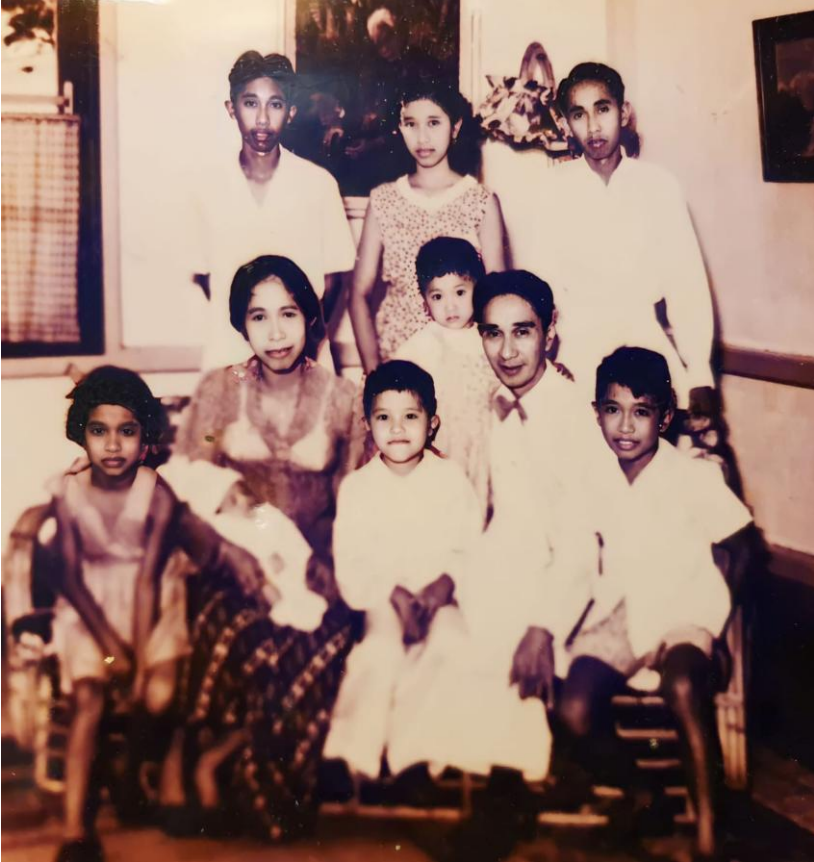
Sarkawi juga turut membentuk berbagai yayasan seperti Yayasan Akademi Perniagaan Kalimantan (APK), Yayasan

Dok dan Pengangkutan Sungai, dan Yayasan Perumahan Rakyat. Ia membangunkan beberapa buah rumah di Banjarbaru khusus untuk para pegawai negeri. Semuanya itu juga bertujuan untuk membangun daerah. Segala yang dibentuknya dan usahanya itu memang agak terlantar di kemudian hari, karena masa jabatannya cuma lebih kurang dua tahun saja. Sesudah itu tangan lain harus meneruskan.

Sarkawi adalah sosok yang sangat sederhana. Berdasarkan kesaksian Artum Artha (1975), sebagai seorang Gubernur hidupnya biasa. Tidak menyolok berkelebihan. Tidak tampak kekayaan yang di simpannya. Bahkan belum mempunyai rumah kediaman yang pantas. Ada sebuah rumah yang dibelinya dari pemerintah, akan tetapi tak sempat ia tempati. Yang mengherankan bagi orang lain dan pegawai pemerintahan ialah Sarkawi tidak mau tinggal di Gubernuran.

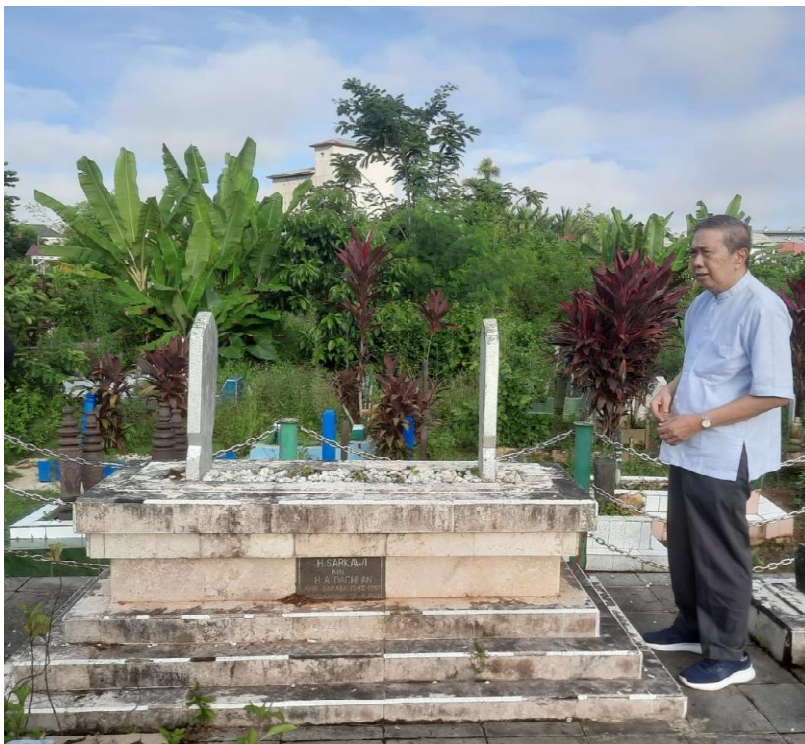
Sarkawi adalah pribadi yang sangat merakyat. M.P. Lambut seringkali menyaksikan Gubernur Sarkawi naik sepeda keliling pelosok kota Banjarmasin. Sarkawi pernah terlihat *menyoto* (menyantap soto Banjar) di pinggir kali yang ia beli dari penjual soto dengan perahu rombongan.

Dari perkawinan H.Sarkawi dengan Hj. Masmulia melahirkan 9 orang anak, masing-masing bernama Kohinoor (alm.) dimakamkan di Martapura, H.Hoesin Sarkawi bermukim di Surabaya, Hj.Etna Setiatin bermukim di Surabaya, Taberi Yudha Negara (alm.) dimakamkan di Barabai, Hj.Retnati Faudah bermukim di Banyuwangi, Sjachriel Sarkawi bermukim di Sydney Australia, Hidayat Sarkawi bermukim di Jakarta, H.Sjachsam Sarkawi bermukim di Banjarmasin, dan Syahrizal Sarkawi bermukim di Banjarbaru.



Gambar 29. Gubernur Sarkawi bersama isteri dan delapan anaknya. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.

Sarkawi yang selalu mengobarkan semangat nasionalisme itu, kini telah tiada. Ia dipanggil pulang menghadap sang pencipta dan jenazah almarhum dimakamkan di alkah keluarga di Jalan Manjang Barabai. Semoga arwahnya mendapatkan kedamaian di sisi Allah SWT.



Gambar 30. Makam H. Sarkawi di Jalan Manjang Barabai. Sumber: koleksi Pangeran H. Sjachsam Sarkawi.



**MAKSID**

**GUBERNUR/KEPALA DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

**(1959 - 1963)**

**5**



Putera daerah Kalimantan Selatan ini bernama H. MAKSID BIN MOEHAMMADIAH (biasa disingkat M.Diah), lahir di Amawang Kandungan tanggal 7 Desember 1917 meninggal di Surabaya, 23 Maret 1999 dikenal sebagai seorang politikus Indonesia, yang berkiprah di Kalimantan Selatan. Pendidikan terakhirnya adalah MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) tahun 1935. Dalam menjalani karir politiknya H.Maksid pernah menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 1957 hingga 1959. Selanjutnya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Kalimantan Selatan periode masa jabatan 1959 – 1963.

H. Maksid merupakan orang pertama yang menjabat sebagai Gubernur sekaligus Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, sehingga disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dalam mana terdapat ketentuan bahwa Gubernur merangkap juga sebagai kepala daerah (sebelumnya hanya sebagai Gubernur saja atau Kepala Daerah saja).

### **Masa Kecil dan Pekerjaan**

Maksid adalah pemegang bintang gerilya dari pemerintah karena jasa turut serta aktif dalam gerakan rahasia bawah tanah melawan penjajah Belanda. Ia sebagai anggota MN-1001/MTKI yang berada di bawah pimpinan Ir. Pangeran Mohamad Noor yang berpusat di Jogja. Dalam tahun 1946 ia masih tetap bekerja pada pemerintahan pendudukan NICA-Belanda di Banjarmasin sebagai pegawai Pos dan Telegraph.

Sebagai pegawai pos dan telegraph, ia membocorkan rahasia yang merugikan pihak NICA. Lantas ia ditangkap dan diperiksa tapi tidak divonis hukum, namun Maksid harus berhenti dari jabatannya. Setelahnya Maksid bekerja pada

NV. SDB (*Naamloze Vennootschap Serikat Dagang Borneo*) sebagai pegawai. Tahun 1948 ia turut membantu Kongres Ummat Islam di Amuntai sambil mengadakan aksi diam-diam menggeroti usaha politik pemerintahan Belanda khususnya di kota Banjarmasin (Artha, 1975).

Meski aktif dalam perjuangan, pasca pengakuan kedaulatan Maksid memutuskan tidak turut aktif sebagai anggota TNI. Ia hanya orang biasa, sebagai tetap pegawai NV. SDB. Namun dengan pengalaman perjuangan itulah Maksid berani tampil sebagai calon Kepala Daerah dan Gubernur/ Kepala Daerah. Dan ia mendapat dukungan penuh dari Partai Nahdlatul Ulama dan Panglima Daerah Militer X/LM, Kolonel Hassan Basry.

## Gubernur/Kepala Daerah

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 bahwa di daerah tingkat I ada dua pejabat pimpinan yang melaksanakan fungsinya, yaitu seorang Gubernur dan seorang lagi Kepala Daerah. Jabatan Gubernur dipisahkan dengan jabatan Kepala Daerah. Dalam hal ini jabatan Gubernur ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk jabatan Kepala Daswati I (Daerah Swatantra Tingkat I) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan oleh Presiden RI.

Dalam upaya memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut, diketahui H.Sarkawi dipercaya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Sedangkan H.Maksid dipilih dan disetujui DPRD Kalimantan Selatan ketika itu untuk menjadi Kepala Daerah Swatantra Tingkat I (Daswati I) Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dalam perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, yang semula menerapkan pemisahan jabatan Gubernur dan Kepala Daerah, akhirnya dicabut. Dan dengan

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dalam mana terdapat ketentuan bahwa gubernur merangkap juga sebagai kepala daerah, maka kedua jabatan tersebut disatukan kembali ke dalam satu orang yang menjabat Gubernur/Kepala Daerah. Dengan alasan sistem dualisme tersebut dinilai tidak efektif.

Oleh karena itu dilakukanlah pemilihan untuk menduduki jabatan Gubernur/Kepala Daerah di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Ada dua calon Gubernur Kepala Daerah yaitu Sarkawi dan Maksid. Hasilnya 17 suara untuk Sarkawi dan 11 suara untuk Maksid. Namun kenyataan yang diangkat oleh Presiden RI ialah Maksid bin Diah (Artha, 1975).

Sarkawi yang masih menjabat gubernur tidak aktif lagi bekerja dan di kemudian hari permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk minta hak pensiun. Sesuai Penpres Nomor 6 Tahun 1959 maka kemudian jabatan gubernur dan kepala daerah disatukan sehingga H. Maksid menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Selatan (wakil pemerintah pusat sebagai pemegang kendali Pemerintahan Umum sekaligus kepala daerah yang memegang Kendali Otonomi).

### **Penentang Keras Komunisme**

Saat H. Maksid menjabat Gubernur/ Kepala Daerah Kalimantan Selatan situasi politik di tanah air semakin tidak kondusif karena rongrongan PKI. Di Kalimantan Selatan, sepak terjang para tokoh PKI seperti Amar Hanafiah, dan kawan-kawan dengan ormas di bawahnya (*onderbouw*). semakin menguatirkan.



Gambar 31. Kedatangan Kolonel Achmad Yani, Deputi II KASAD, ketika tiba di Lapangan Terbang Ulin. Sumber: koleksi Wajidi.

Dalam suatu pertemuan pada malam hari sekitar bulan Maret atau April 1960 di Kediaman Pangdam X/Lambung Mangkurat, Kolonel Achmad Yani (waktu itu sebagai Deputi II KASAD) dengan dihadiri oleh Pangdam X/LM (Letkol Hassan Basry sebagai Penguasa Perang Daerah, Kepala Staf Penguasa Perang Daerah Mayor H. Aberani Sulaiman, Kepala Staf KODAM X/LM Letkol M. Yusi, Kolonel Achmad Yani menggambarkan situasi politik Nasional secara panjang lebar, bahwa PKI sedang berusaha merongrong Angkatan Darat dalam rangka untuk mendominasi politik di Tanah Air dan disampaikan juga bahwa Presiden Soekarno telah mulai terpengaruh oleh fitnahan PKI karena disekeliling Presiden telah berkeliaran orang-orang PKI. Presiden juga akan membubarkan Masyumi dan PSI, sedangkan PKI tidak akan dibubarkan walaupun terkena Penpres Nomor 7 Tahun 1959.

Dengan tegas pula Kolonel Hassan Basry mengatakan bahwa “Tidak ada jalan mundur, karena sudah saya janjikan pada Pak Nasution”. Rupanya telah ada kontak sebelumnya dengan Jenderal Nasution. (Wajidi, dkk., 2018).

Hassan Basry membuktikan ucapannya dengan mengeluarkan Keputusan Penguasa Perang Daerah Nomor 140/S/K.P./tahun 1960 Tentang Penghentian Kegiatan P.K.I. Keputusan bertanggal Banjarmasin, 22 Agustus 1960 itu ditandatangani Kolonel H. Hassan Basry Pangdam X Lambung Mangkurat selaku Penguasa Perang Daerah (PEPERDA) Kalimantan Selatan (Manihuruk, 1984). Langkah pembubaran itu, ternyata mendapat dukungan semua pihak di daerah ini, dan diikuti oleh PEPERDA Provinsi Sulawesi Selatan dan PEPERDA Provinsi Sumatera Selatan sehingga dikenal sebagai “Peristiwa 3 Selatan”.



Gambar 32. Tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme. Kolonel H.Hassan Basri, H. Maksid, Letnan Kolonel M. Yusi. Sumber: koleksi Wajidi; keluarga H. Maksid.

Kolonel Hassan Basry (Pangdam X/LM, Kepala PEPERDA), H. Maksid (Gubernur/Kepala Daerah) dan Letnan

Kolonel M. Yusi (Kepala Staf Kodam X/LM) merupakan tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme. H. Maksid sebagai Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan dibantu oleh Staf Senior Pemerintah Daerah yaitu Johan Ariffin, H. Hasbullah dan A. Gaffar Hanafiah (Ideham, ed., dkk., 2003).

Pada awal September 1960, Kolonel Hassan Basry dipanggil menghadap Presiden dan meminta agar PKI diperbolehkan bergerak kembali, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya menolak kegiatan PKI. Pendirian Hassan Basry ini kompak didukung oleh H. Maksid dan Kolonel M. Yusi yang sama-sama teguh pendirian dalam menentang faham komunis.



Gambar 33. Kolonel M. Yusi (selaku Pangdam X/LM, menggantikan H. Hassan Basry) bersama Gubernur/Kepala Daerah H. Maksid dalam sebuah rapat. Sumber: koleksi Wajidi.



Gambar 34. Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, tahun 1960. Sumber: koleksi Museum LM.

Keputusan PEPERDA membekukan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya di Kalimantan Selatan itu, sangat menjengkelkan Presiden RI Soekarno, sehingga berakibat dicopotnya para pejabat daerah, mulai dari Panglima hingga Kepala Daerah.



Gambar 35. Jenderal A.H. Nasution. Sumber: koleksi Wajidi.

Dalam perkembangan berikutnya, Presiden RI Soekarno memerintahkan agar Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya di Kalimantan Selatan untuk dihidupkan kembali. Seandainya Bung Karno ketika itu, tetap merestui tindakan yang dilakukan pejabat Kalimantan Selatan, yang kemudian diketahui pula diikuti para pejabat di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) di seluruh Indonesia, maka kemungkinan tragedi nasional yang dinamakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/PKI) tidak akan terjadi di tanah air Indonesia.



Saat H. Maksid memegang jabatan Gubernur/Kepala Daerah ia menjalankan pemerintahan dengan sekedar kemampuannya. Mengutip tulisan Artum Artha (1975), Gubernur Maksid berperan dalam membantu Keuangan Fakultas Publisistik Universitas Islam Antasari dimana ia duduk sebagai Ketua Umum. Oleh karena perannya dalam pendirian IAIN Antasari, maka oleh Rektor IAIN, Prof. Drs. H.M. Asywadie Syukur, Lc, kepada H. Maksid diberikan penghargaan bertanggal 20 November 1998 sebagai salah satu tokoh pendiri IAIN Antasari.

H. Maksid adalah juga pelopor pertama rencana pembangunan Masjid Raya Banjarmasin yang semula batu pertamanya di muka Hotel Banjar. Tidak lupa dia membantu usaha-usaha perbaikan beberapa buah masjid dan surau yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu juga membantu Universitas



Lambung Mangkurat. Banyak orang tahu bahwa usahanya di lapangan pembangunan gedung-gedung kurang berhasil hal ini antara lain disebabkan tidak cukup tersedianya keuangan, baik keuangan daerah sendiri maupun keuangan yang diberikan-bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi ekonomi dan politik (Artha, 1975).

Gambar 36. H. Maksid dan isteri.  
Sumber: koleksi keluarga H. Maksid.

## Dalam Pusaran Badai Politik

Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Selatan H. Maksid adalah seorang yang teguh pendirian terlebih dalam hal melarang kegiatan PKI di Kalimantan Selatan ia bersikap keras dan tegas. Oleh sebagian orang, Maksid dikenal sebagai orang yang keras hati dan keras kemauannya sejak muda (Artha, 1975). Terbukti meski berpangkat Wedana ia berani mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah hingga terpilih. Barangkali karena ia teguh memegang prinsip itulah maka ada sebagian pihak tidak menyukainya dengan menyebarkan fitnah termasuk dari anasir golongan PKI yang ia tentang keras penyebarannya. H. Maksid dicari-cari kesalahannya kemudian dicopot dan diadili (Said, 1999).

Mengutip buku Sejarah Banjar (Ideham, ed., dkk., 2003) dan buku Autobiografi M. Said (1999) sekitar Januari 1963 banyak surat-surat kaleng dan surat terbuka ditujukan kepada Kolonel Amir Mahmud yang melaporkan bahwa H. Maksid telah menyelewengkan uang Pemerintah Daerah dalam perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan. Perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan merupakan usaha patungan antara Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dengan Kho Sek Beng, seorang WNI keturunan Tionghoa.

Walaupun laporan tersebut belum jelas kebenarannya tapi Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH mengatakan sudah ada bukti yang mengarah ke tindak pidana penyelewengan itu. Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH menyarankan agar sebelum diadakan penangkapan terhadap H. Maksid maka Presiden Direktur Perusahaan Pelayaran Tanjung Selatan harus ditangkap lebih dahulu. Kemudian Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH minta agar tindakannya di-*back up* oleh Pangdam X/LM

Akhirnya Kho Sek Beng ditangkap bersama beberapa saksi lainnya. Pemeriksaan secara intensif terus dilakukan,

tapi belum ada bukti jelas yang mengarah terlibatnya Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan H. Maksid. Mungkin agar lebih cepat menemukan bukti-bukti maka kadang-kadang interogasi dilakukan dengan keras dan tidak wajar, dan kabar ini sampai kepada Deputy Wilayah Koanda Kalimantan Brigjen Hassan Basry dan beliau sangat marah. Pada akhir April 1963, beliau mengerahkan 2 (dua) Kompi Baret Hijau (Raiders Kalimantan) dipimpin oleh Kapten M. Yunan untuk mengepung rumah tahanan dan membebaskan Kho Sek Beng. Rumah Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH di kepung, dan beruntung yang bersangkutan tidak ada di rumah. Keadaan semakin tegang, karena Pangdam X/LM juga mengerahkan seluruh jajaran pasukan termasuk pasukan yang ada di daerah-daerah (KODIM), Kepolisian, Angkatan Laut, Angkatan Udara karena jabatan Pangdam X/LM juga menjabat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin dapat dikuasai kembali termasuk menguasai lapangan udara (sekarang Syamsuddin Noor).

Pasukan Raiders kembali ke markasnya, karena mereka mengetahui kekuatan yang tidak berimbang. Selanjutnya hubungan telpon ke rumah Brigjen Hassan Basry dan Kolonel M. Yusi diputus dan kedua pejabat tersebut di perintahkan dengan status tahanan rumah (huis-arrest). Jaksa Tinggi M.D. Harahap, SH diperintahkan juga meninggalkan Banjarmasin dan tidak kembali lagi ke pos-nya sebagai Jaksa Tinggi Kalimantan Selatan dan menurut berita, yang bersangkutan dipindahkan ke Jawa Timur.

Kho Sek Beng Affair akhirnya ditangani oleh Jaksa Agung di Jakarta dan Kho Sek Beng dipindahkan ke Jakarta, demikian pula H. Maksid dipanggil oleh Kejaksaan Agung ke Jakarta dan tidak kembali lagi ke Banjarmasin. Kembali terdengar bocoran dalam interogasi dimana kedua tersangka

diperlakukan dengan tidak wajar dan ditahan di ruang tahanan yang tidak sepatasnya.

Kemudian Brigjen Hassan Basry dipindahkan ke Jakarta, dan sementara menunggu penggantinya maka Kepala Staf Kolonel Wahman memegang tugas sehari-hari.

Pada tanggal 26 Agustus 1963, Menteri Panglima Angkatan Darat melantik Deputy Wilayah yang baru, Brigjen M. Panggabean dilantik menjadi Mayjen dan kemudian dilantik sebagai Deputy Wilayah Kalimantan. Kemudian Deputy Wilayah Kalimantan melantik Kolonel Munadi sebagai Kepala Staf Komandan Antar Daerah Kalimantan (KOANDA)



menggantikan Kolonel Wahman. Pada tahun 1964 perkara Kho Sek Beng dan H. Maksid ini diadili di Jakarta dan dibebaskan dari tuntutan karena tidak bersalah. H. Maksid sendiri kedudukannya direhabilitasi kembali sebagai Pegawai Negeri dan diangkat sebagai Staf Ahli Mendagri bidang Pembangunan Masyarakat Desa.

## Akhir Hayat

Sepeninggal H.Maksid sekitar bulan Mei 1963, Pemerintah RI menunjuk dan menetapkan Kolonel Abu Yazid Bustomi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur/Kepala Daerah Kalimantan Selatan, yang diantaranya diberi tugas untuk melakukan pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan definitif,

hingga kemudian terpilihlah Letnan Kolonel H. Aberani Sulaiman pada tahun itu juga.

Dalam perjalanan karir politik H.Maksid kemudian, sempat pula berkiprah di tingkat nasional, yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Jakarta sejak 1 Oktober 1982 hingga 30 September 1987 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan dari partai Golongan Karya (Golkar).

Di bidang sosial kemasyarakatan lainnya, H.Maksid juga pernah dipercaya menjadi Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.

Pada tanggal 23 Maret 1999 atau bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1419 H dalam usia 82 tahun, putra terbaik Kalimantan Selatan itupun meninggal dunia yang lengkap dengan segala pengalaman dan kenangan berharga bagi daerah Kalimantan Selatan.



Gambar 37. H. Maksid dan isteri pada sebuah acara. Sumber: koleksi keluarga H. Maksid.



**ABERANI SULAIMAN**  
GUBERNUR KDH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN  
(1963 – 1968)

Nama H. ABERANI SULAIMAN ini sangat dikenal masyarakat Kalimantan Selatan. Terlebih pada masa revolusi fisik merebut kemerdekaan RI, khususnya di daerah Hulu Sungai Tengah.

H. Aberani Sulaiman adalah seorang gubernur yang bukan berlatar belakang birokrat atau bangsawan. Ia berasal dari kalangan rakyat kebanyakan yang merasakan pahit getir sebagai rakyat jajahan. Oleh karena sejak remaja ia sudah menerjunkan diri dalam perjuangan bersenjata melawan Belanda sampai kemudian menjadi gubernur.

Putera dari pasangan H.Sulaiman dan Hj.Jamilah ini mengawali perjuangannya dengan membentuk GERPINDOM sebuah organisasi yang bergerak dibawah tanah untuk mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945.

GERPINDOM ini dibentuk oleh tiga serangkai, yakni H.Aberani Sulaiman, Abdul Rahman Karim, dan Anwaruddin yang berkedudukan di Birayang. Dengan terbentuknya GERPINDOM ini berbagai gerakan rahasia yang dilaksanakan oleh para pemuda di Hulu Sungai dapat dikoordinasikan menjadi salah satu kekuatan perjuangan.

H.Aberani yang pada waktu itu masih muda belia, tidak sabar lagi merasakan perjuangan yang dianggapnya lamban dilakukan oleh para tokoh pergerakan, sehingga ia memutuskan untuk berjuang mengangkat senjata. Santri dari Madrasah Persatuan Perguruan Islam (PPI) Birayang ini mengusahakan pengumpulan senjata api untuk menggempur militer Belanda, yang ketika itu selalu berbuat semena-mena terhadap rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan.

Setelah bertukar pikiran dengan Abdul Rahman Karim yang kemudian dikenal dengan sebutan AR.Haka, mereka menugaskan kepada Anwaruddin untuk mengembangkan sayap organisasi GERPINDOM ini hingga ke Banjarmasin. Sedangkan tugas untuk mencari dan mengumpulkan senjata

diserahkan kepada H.Damanhuri untuk berangkat ke Kalimantan Timur.

Sementara itu H.Aberani Sulaiman terus bergerak menumbuhkan kesadaran masyarakat di wilayahnya akan pentingnya perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Ia pun kemudian berhasil mendapatkan dukungan dari para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Setelah Anwaruddin berhasil mengembangkan sayap organisasi ke beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Demikian juga H.Damanhuri berhasil mendapatkan bantuan senjata api dari Kalimantan Timur, maka disusunlah rencana dan strategi perjuangan dengan menggunakan sistem gerilya. Sejak itulah, H.Aberani Sulaiman dan kawan-kawan mulai melakukan penyerangan ke tangsi-tangsi polisi Belanda untuk membebaskan para tahanan serta melakukan penyanggulan terhadap patroli militer Belanda. Para Kepala Desa yang menjadi mata-mata Belanda juga diculik dan dibunuh, sehingga suasana ketika itu menjadi semakin mencekam.

Dalam suasana yang demikian itulah H.Aberani Sulaiman disertai beberapa pejuang berani mati diantaranya H.Damanhuri, Jamhar Rasidi, Daeng Ladjida, Suni, Ibur, Utuh Dungku dan Utuh Kandangan, menyanggul iring-iringan mobil pasukan Belanda di Hambawang Pulasan Batumandi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan atau hari Rabu pertengahan bulan Mei 1947 sekitar pukul 09.00 pagi. Inilah kontak senjata pertama kali yang terjadi antara pasukan gerilya yang dipimpinya dengan militer Belanda di Kalimantan Selatan.

Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Hambawang Pulasan. Dalam peristiwa itu Made Kawis seorang pejuang yang berasal dari Tabanan Bali gugur sebagai kesuma bangsa. Peristiwa yang banyak memakan



korban dari pihak Belanda itu membuat suasana kian mencekam. Karena setelah itu, militer Belanda melakukan pengejaran dan penangkapan serta penyiksaan dan penahanan terhadap siapa saja yang dicurigai memberi dukungan atau berpihak kepada para pejuang. Akibatnya rakyat yang menjadi kekuatan perjuangan pun segera mengungsi ke pedalaman.

Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan itu, H.Aberani Sulaiman dan Abdul Rahman Karim segera memutuskan untuk memindahkan markas GERPINDOM yang ada di Birayang, ke desa Mandam Cukanlipai, yang pada waktu itu disebut sebagai Markas Kudahuya.

Dalam episode yang lain, ketika melakukan perjalanan ke Kotabaru untuk menghubungi para pejuang yang tersebar di berbagai tempat, ternyata H.Aberani Sulaiman sempat bertemu dengan Hassan Basry yang ditugaskan oleh Divisi ALRI Tuban Jawa Timur untuk membantu perjuangan di Kalimantan Selatan. Hassan Basry yang semula berniat ingin kembali ke Jawa, segera membatalkan rencananya dan menyatakan bergabung dengan pasukan GERPINDOM. Dan dalam beberapa waktu kemudian seiring dengan dinamika perjuangan, GERPINDOM dilebur menjadi Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Hassan Basry dan H.Aberani Sulaiman.



Gambar 38. Mayor H. Aberani Sulaiman berbincang dengan H. Damanhuri (berbaju dan celana putih) dan Lettu A.M. Tobelo, memegang berkas di luar gedung GPI (Gedung Permufakatan Indonesia) di belakang Boom, Banjarmasin. Sumber: foto dok. Artum Artha; Wajidi, 2023.

Jiwa patriotik yang mengalir dalam darah Aberani Sulaiman terukir dalam sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Hal tersebut dalam dilihat pada teks Proklamasi 17 Mei 1949 yaitu pada kalimat “*dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan*”. Kalimat itu ditambahkan oleh H.Aberani Sulaiman sebelum teks tersebut ditanda tangani oleh Hassan Basry sebagai Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.



Gambar 39. Dari kanan ke kiri: Mayor H. Aberani Sulaiman, Lettu A.M. Tobelo, Letnan Kolonel Hassan Basry (Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan), Lettu Daeng Lajida, Mayor P. Arya. Sumber: koleksi Iron Noviar; Wajidi, 2023.

Dalam kelanjutan perannya sebagai tentara pejuang yang melebur diri dalam Tentara Nasional Indonesia, maka pada tahun 1962, H. Aberani Sulaiman ketika itu dengan pangkat Mayor diangkat menjadi Komandan Korem di Kandangan. Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) melalui Jenderal Ahmad Yani memberi tugas khusus kepada Mayor Aberani Sulaiman untuk memulihkan keamanan di Kalimantan Selatan, terkait dengan adanya pemberontakan oleh Ibnu Hadjar.



Gambar 40. Letkol H. Aberani Sulaiman selaku Dan Rem Hulu Sungai ditugaskan memulihkan keamanan. Tampak berseragam loreng Ibnu Hadjar, pimpinan KRlyT, sahabat seperjuangan namun berbeda haluan. Sumber: koleksi Wajidi.

Tugas tersebut sungguh berat baginya, sehingga harus berkali-kali mengadakan pertemuan dengan sahabat seperjuangan yang sangat dikenalnya itu.

*Urang* Birayang yang lahir di Rangas pada tanggal 2 Agustus 1925 itu, pada tahun 1963-1965 terpilih dan diangkat menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, yang pada waktu itu usianya baru mencapai 38 tahun.

Pengangkatan Aberani Sulaiman menjadi gubernur Kalimantan Selatan berlangsung di tengah politik nasional di pusat dan daerah yang tidak stabil.

## Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah

Pelantikannya menjadi gubernur diwarnai “Kasus Pengangkatan Gubernur Kepala Daerah”. Setelah habis masa jabatan Gubernur Maksid, sejak Mei 1963 roda pemerintahan dipegang Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Selatan.



Sebelum Brigjen H. Abu Yazid Busthomi sebagai Pjs, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Kalimantan Selatan ditunjuk A.A. Rivai untuk beberapa bulan. Sebagai pejabat Gubernur, Abu Yazid ditugaskan untuk mempersiapkan pemilihan gubernur yang diambil dari putra daerah melalui pemilihan di DPRD Provinsi.

Di forum DPRD masuk dua orang calon Gubernur. Pertama Haji Aberani Sulaiman. Kedua Haji Zafry Zamzam. Keduanya itu adalah pejuang kemerdekaan. Rupanya dalam pemilihan, kedua calon gubernur itu sama-sama mendapatkan jumlah suara yang sama. Artum mengatakan bahwa kenyataan menunjukkan suara-suara yang didapat oleh keduanya sebagai suara berimbang (Artha, 1975).

Karena hasil pemilihan berimbang, ada yang mengkuatirkan jika salah satu ditetapkan oleh presiden bisa muncul gejolak ketidakpuasan dari salah satu calon gubernur. Suara-suara yang menghendaki hasil pemilihan ditiadakan atau bahkan diulang. Suara itu muncul dalam Rapat Catur Tunggal Kalimantan Selatan pada akhir Agustus 1963, yang

membicarakan perlunya ditetapkan seorang Gubernur yang definitif sebagai salah satu opsi kepada pemerintah pusat. Hasil pembicaraan dalam rapat ini bahwa diusulkan : Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sebagai Gubernur Kepala Daerah, dan Letkol H. Aberani Sulaiman sebagai Wakil Gubernur.

Abu Yazid meneruskan berkas pemilihan kedua calon Gubernur itu dengan opsi lain berupa Rapat Catur Tunggal Kalimantan Selatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.



Gambar 41. Pangdam X/LM Amir Machmud. Atas Prakarsa Gubernur Aberani Sulaiman dan Pangdam telah dilaksanakan Rapat Panca Tunggal menyikapi Peristiwa G.30.S./PKI. Sumber: koleksi Wajidi.

Pada tanggal 19 September 1963, pejabat Gubernur Kolonel H. Abu Yazid Busthomi meminta dengan sangat agar diadakan Rapat Catur Tunggal malam itu juga, karena Pejabat Gubernur Kolonel H. Abu Yazid Busthomi sudah menerima Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Letkol H. Aberani Sulaiman menjadi Gubernur Kepala Daerah Tk. I Kalimantan Selatan, dan berita ini sangat

bertentangan dengan berita yang berkembang sebelumnya (yang sumbernya juga dari Kolonel H. Abu Yazid Busthomi) bahwa sudah hampir bisa dipastikan bahwa Kolonel H. Abu Yazid Busthomi yang menjadi Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.



Berita selanjutnya bahwa dengan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, pelantikan dilakukan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ipiq Gendamana pada tanggal 27 September 1963. Dari pembicaraan yang berlangsung dalam Rapat Panca Tunggal, terlihat jelas kekesalan dan kekecewaan Kolonel H. Abu Yazid Busthomi (Ideham, ed., dkk., 2003).

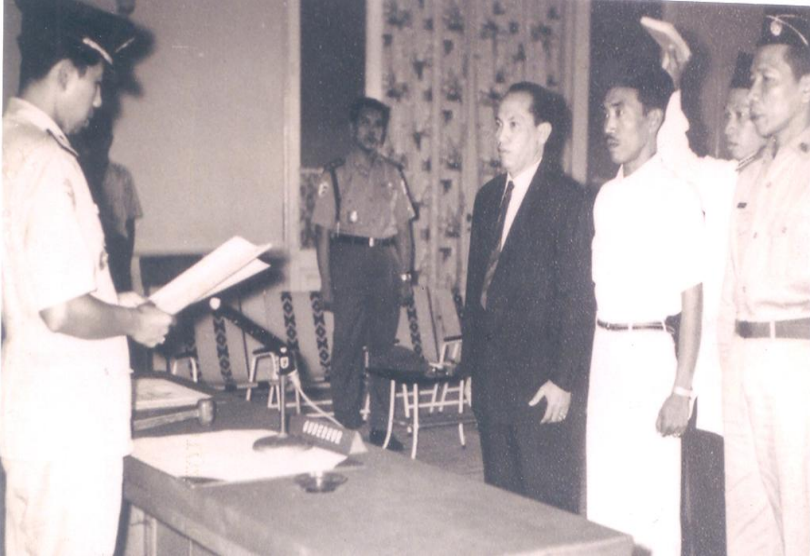
Bertolak belakang dengan suara-suara kekuatiran jika salah satu calon ditetapkan karena suara yang berimbang. Ternyata kedua tokoh pejuang, Zafri dan Aberani, keduanya saling unjuk salam dan hormat, dan bahkan Zafry menitipkan pesan agar mutu pendidikan ditingkatkan, termasuk mutu perguruan tinggi apalagi Perguruan Tinggi Islam (Universitas Islam Antasari). Aberani menerima titipan pesan tokoh Wartawan Republik itu. Ia mengharapkan bantuan selanjutnya dan tegur sapa serta nasehat agar selama ia memegang pimpinan pemerintahan daerah tidak tergelincir dari kekhilafan (Artha, 1975).

Sedikitnya ada tiga hal yang menjadi obsesi Aberani Sulaiman pada waktu ia menjadi Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu pemindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru. Pembangunan Masjid Agung di Kota Banjarmasin. Dan pembangunan stadion olahraga.

Selama menjabat gubernur, Aberani Sulaiman sangat memperhatikan dunia pendidikan. Ia sangat prihatin dengan kurangnya tenaga guru. M.P. Lambut menceritakan bahwa ia dipanggil Gubernur Aberani Sulaiman untuk mendiskusikan mengatasi kekurangan guru. Atas sokongan Gubernur Aberani maka dibentuklah FKIP di bawah Universitas Lambung Mangkurat yang semula adalah IKIP Bandung Cabang Banjarmasin.

Pada waktu memimpin provinsi Kalimantan Selatan, keadaan ekonomi negara terbilang sangat parah, sehingga mengharuskan setiap wilayah dalam membangun daerah, istilahnya dilakukan dengan cara berdiri di atas kaki sendiri atau BERDIKARI. Konsekuensinya tiap-tiap daerah harus membuat peraturan sendiri, untuk memungut dana guna kepentingan membiayai pembangunan. Ketika itu semua barang yang masuk maupun keluar dari Kalimantan Selatan dikenai pungutan resmi.





Gambar 42. Gubernur H. Aberani Sulaiman melantik sumpah jabatan pemerintahan. Di tengah H. Abdul Ganie Madjedi (pakai baju & celana putih) yang sempat menjadi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber: koleksi Wajidi.

Bersamaan dengan kebijakan itu, di Kalimantan Selatan berdiri Badan Dana Prasarana (BADANA) untuk membiayai operasional pembangunan KOBIMA (Komando Bina Marga) dan KOAIR (Komando Pengairan). Dengan adanya badan tersebut, maka berbagai ruas jalan dan jembatan serta pengairan rakyat berangsur dapat diperbaiki. Sekalipun dalam pelaksanaan dan realisasinya cukup sulit, akan tetapi sejumlah ruas jalan penting di Kalimantan Selatan masih bisa ditembus, disamping usaha pertanian rakyat tetap bisa dipertahankan.



Gambar 43. Suasana unjuk rasa para pelajar SMEP, SMP dan sekolah lainnya yang tergabung dalam KAPPI. Sumber: koleksi Wajidi.

Pada masa jabatan Gubernur Kalimantan Selatan H. Aberani Sulaiman inilah terjadi peristiwa yang disebut dengan Gerakan 30 September (G.30.S/PKI) dan kemudian lahirnya Orde Baru. Dalam kondisi transisi seperti itu, saat memimpin daerah, dibantu oleh seorang Wakil Gubernur bernama H. Imansyah yang mulai bertugas pada Juni 1965. Namun kemudian pada tahun 1967 H. Imansyah mengundurkan diri dari jabatannya karena tuntutan para demonstran (Said, 1999). Dia mengundurkan diri karena menurut para demonstran dasar pengangkatannya tidak demokratis, tidak melalui forum DPRD Kalsel (Artha, 1975).

Gubernur H. Aberani Sulaiman dalam pemerintahannya menghadapi gejolak politik berupa demonstrasi para pelajar, mahasiswa, yang tergabung dalam beberapa organisasi seperti KAMI, KAPPI, KAPAK, juga para sarjana yang

tergabung dalam KASI atau Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan KAWI atau Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (Said, 1999).

Pada tanggal 10 Februari 1966 dalam demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa ke Konsulat Republik Rakyat Cina (RRC) di Jalan Pecinan Laut (sekarang Jalan Piere Andreas Tendean), staf Konsulat tidak mau menerima pernyataan mahasiswa dan menghadapi perwakilan mahasiswa dengan sikap tidak sopan sehingga memicu kemarahan mahasiswa. Para demonstran terus berjalan sambil meneriakkan yel-yel mengutuk Komunis dan keterlibatan RRC, dan pada saat rombongan berada di jembatan Sudimampir (Antasari) di pertigaan Toko Minseng terjadilah Tragedi Berdarah, seorang mahasiswa yang bernama Hasanuddin Haji Madjedi (Hasanudin Madjedi) tewas tertembak dan beberapa orang lainnya luka-luka.

Menyikapi tewasnya Hasanuddin, Muspida Kalimantan Selatan melakukan rapat di kediamanan Gubernur di jalan Jenderal Sudirman, Pal Nol. Hasanudin ditetapkan sebagai Sarjana Muda Anumerta, dan belakangan namanya diabadikan sebagai nama gelanggang Remaja dan nama masjid di dekat bundaran Kayu Tangi, Banjarmasin (Barjie B, ed., 2020).

Hasanuddin H.M. adalah korban pertama di kalangan mahasiswa Indonesia dalam memperjuangkan Tritura, dan kepadanya dianugerahkan gelar Pahlawan Ampera serta sebagai tanda penghargaan jenazahnya disemayamkan di Pemakaman Pahlawan Perang Banjar di Jalan Masjid Jami Banjarmasin (Wajidi, dkk., 2018).



Gambar 44. Pemakaman Hasanuddin Madjedi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unlam yang gugur saat unjuk rasa di Banjarmasin. Sumber: koleksi Wajidi.

Pada masa itu itu, tercatat cukup banyak mantan pejabat yang pernah bertugas di Kalimantan Selatan segera ditarik ke pusat untuk memegang jabatan penting di Jakarta. Sebut saja seperti Jenderal M.Panggabean sebelumnya sebagai Deyah Koanda Kalimantan diangkat menjadi Panglima ABRI. Panglima Kodam X Lambung Mangkurat Brigjen Amir Machmud diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri yang kemudian pernah dipercaya sebagai Ketua MPR dan DPR-RI, yang sempat pula menganugerahi Soeharto dengan gelar Bapak Pembangunan. Begitu juga Kasdam X Lambung Mangkurat Kolonel Sutopo Juwono diangkat menjadi Kepala BAKIN serta A.E.Manihuruk yang juga sempat bertugas di Kalimantan Selatan dipercaya menjadi Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta.



Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah bertanggal 01 September 1965, maka nama Daswati I berubah menjadi Provinsi dan Daswati II menjadi Kabupaten/Kotamadya. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka dengan sendirinya Aberani Sulaiman tidak lagi Gubernur/Kepala Daswati I Kalimantan Selatan, melainkan menjadi Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan.

Sepeninggal H. Aberani Sulaiman, jabatan Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan dijabat oleh M. Yamani sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur.

M. Yamani dengan nama panggilan Anang Yamani adalah seorang karyawan Pemda berpangkat residen yang mendapat dukungan kuat berbagai pihak untuk dijadikan gubernur definitif (Said, 1999). Ia pelajar pertama OSVIA, anggota parlemen RIS, dan Wakil Dewan Kalimantan Tenggara, dan Kepala Pemerintahan Dewan Tanah Grogot-Pulau Laut (Kotabaru) atau Landschap Kalimantan Tenggara (Artha, 1975).

Pj. Gubernur M. Yamani menerima tugas antara tahun 1968 - 1970. Pada masa itulah ramai pengusaha meminta Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mengubah wajah Kalimantan Selatan dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Pada kepemimpinan M. Yamani, sempat membangun gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin, berdampingan dengan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan ketika itu. Ia juga membangun Gedung Pemuda Bina Satrya Banjarbaru, perumahan pegawai daerah dan guest house.

H.Aberani Sulaiman yang juga suami dari Hj.Siti Norma itu, akhirnya wafat pada tanggal 4 Desember 2001 bertepatan 18 Ramadhan 1422 H dan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Landasan Ulin Banjarbaru. Dari perkawinannya, dikaruniai 12 orang anak, yakni Amberani, Ramlani, Khairani, Dra.Risnaina, Hj.Nurul Aini, H.M.Nur Ahsani, Ir.H.Ahmad Husaini, MSc., Noormilyani A.S., SH., Nurfaridani, Zulfikrani, Ir.Zul Aflani, dan Nur Lailani.



**SUBARDJO SOEROSAROJO**  
**GUBERNUR KDH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**  
**(1970 – 1980)**

Gubernur Kalimantan Selatan yang satu ini berasal dari Tentara Nasional Indonesia. H. SUBARDJO SOEROSAROJO lahir di Solo pada tanggal 28 Februari 1928. Ia diangkat sebagai gubernur termuda pada saat itu dan baru berpangkat Kolonel. Beliau menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dari tahun 1970 hingga 1980.

Nama beliau adalah Subardjo dilahirkan sebagai anak pertama dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Slamet Soerosaroyo adalah pensiunan Polisi dan ibunya bernama Marsijah. Pada saat jadi Gubernur atau kedinasan, hanya disebut dengan nama Subardjo, namun untuk membedakan dengan nama yang sama seorang pengusaha terkenal di zamannya di Banjarmasin, maka ditulislah namanya dengan mengikutkan nama belakang ayahnya yaitu Subardjo Soerosaroyo.

Sebelum menjadi gubernur, calon kuat adalah M. Yamani yang saat itu adalah pj. Gubernur yang didukung banyak pihak untuk menduduki jabatan gubernur definitif. Namun ternyata pencalonannya gagal.

Di DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan ada dua nama yang muncul sebagai calon gubernur yaitu Kolonel Subardjo [yang didukung ABRI] dan H. Hassan Basry [bapak gerilya Kalimantan] yang didukung NU. Namun dari dua calon itu yang terpilih adalah Subardjo (Said, 1999; Artha, 1975).





Gambar 45. Gubernur Subardjo bersama Isteri. Sumber: koleksi Ibu Hj. Syahrizada.

Subardjo menikah dengan seorang wanita keturunan bangsawan yaitu Hj. Syahrizada binti Anang Alie Bassa bin Anang Djamain bin Tumenggung Kasuma Judhanegara bin Raden Adipati Danoeradja yang berasal kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **Riwayat Pendidikan**

Dalam hal pendidikan, H. Subardjo Soerosaroyo menempuh pendidikan sebagai berikut:

1. HIS tahun 1942
2. SGN Tahun 1945
3. SMA. C Extranea
4. Akademi Militer Yogyakarta tahun 1948

5. KOPLATU Pusat Infanteri tahun 1956-1957 di Bandung
6. Advance Course USA, US ARMY tahun 1961 – 1962 di USA.
7. Special Warfar School US ARMY tahun 1961 – 1962 di USA
8. Air Bone Course US ARMY tahun 1961- 1962 di USA
9. Kursus Atase Militer A.D Tahun 1964 – 1965 di Jakarta
10. SESKOAD tahun 1968 di Bandung

### Riwayat Pekerjaan/Jabatan

Berikut riwayat Pekerjaan yang sudah dijalani oleh H. Subardjo Soerosaroyo: 1. Anggota Misi Militer R.I untuk Kalimantan Tahun 1949; 2. Komandan KDM Tarakan pada tahun 1949-1950; 3. Komandan Kompi I/601 Balikpapan pada tahun 1950-1956; 4. Asisten IV KODAM XI/TB Sampit pada tahun 1957-1960; 5. Asisten V KODAM XI/TB Sampit pada tahun 1960-1961; 6. Wakil Asisten I Koanda Kalimantan Banjarmasin pada tahun 1963-1964; 7. Asisten I Koanda Kalimantan Banjarmasin pada tahun 1964-1965; 8. Asisten Atase Militer R.I di Tokyo pada tahun 1965-1966; 9. Atase Militer R.I di Tokyo pada tahun 1967-1968; 10. Penugasan ke Korea Selatan pada tahun 1967; 11. Direktur Counter Intel BAKIN pada tahun 1969-1970; 12. Penugasan ke Austria pada tahun 1969; 13. Gubernur KDH Tk. I Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1970-1975; 14. Gubernur KDH Tk. I Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1975-1980; 15. Anggota MPR RI pada tahun 1977; 16. Anggota DPR RI pada tahun 1987-1992.

Dalam riwayat perjuangannya, Subardjo Soerosaroyo ikut serta dalam beberapa aksi seperti Gerilya di Yogyakarta melawan Belanda, Anggota Misi Militer RI bersama dengan Jenderal Mayor R. Suhardjo Hardjowardoyo (kedatangan ke-

2) untuk mewujudkan *cease fire* antara pihak Belanda dan kesatuan ALRI Divisi IV pimpinan Letkol Hassan Basry di Kalimantan Selatan pada tahun 1949, dan penumpasan Gerombolan di Kalimantan Timur pada tahun 1953.

Berbekal otak encernya karir militernya cukup baik, Subardjo mampu menduduki sejumlah jabatan dan menapaki pangkat Brigadir Jenderal. Pada usia 42 tahun berkat skill kepemimpinan yang mumpuni, ia sudah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak tahun 1970.

### Gubernur Visioner

Di era kepemimpinannya Gubernur Subardjo, Kalimantan Selatan mengalami kemajuan signifikan terutama di sektor infrastruktur dan program transmigrasi. Dimasa pemerintahannya pula didatangkan sekitar 25 ribu transmigran



asal pulau Jawa ke Kalimantan Selatan. Meskipun sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, ia tetap menjunjung tinggi budaya Jawa yang tercermin dari kebijakannya.

Banyak ide besar beliau yang dipersembahkan untuk daerah Kalimantan Selatan yang dipimpinnya. Beberapa contoh seperti peremajaan perkebunan karet melalui Program Inti Rakyat atau PIR. Begitu juga dengan program swasembada ternak potong, yang dipelopornya

sendiri dengan membuka usaha peternakan sapi di kawasan Imban.

Subardjo juga meneruskan program Murdjani Plan, memperbanyak bibit itik Alabio, bibit padi unggul PB V/VII, penambahan bibit kelapa dan cengkih, membuka dan meresmikan gedung KONI dan Olahraga Stadion Mulawarman yang diberi nama Stadion 17 Mei, meresmikan gedung dan lapangan Youth Centre-Gelanggang Remaja di Banjarmasin (Artha, 1975). Menurut Ibu Syahrizada, Gubernur Subardjo pula yang membangun Gedung Wanita di Kayu Tangi namun kemudian diresmikan di masa Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo, dan membangun Desa Pemuda di Pelaihari.

Mengingat pada mula menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tahun 1970, Subardjo harus menempati kantornya di jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin, yang masih merupakan bangunan kayu peninggalan zaman sebelum kemerdekaan. Maka, oleh Gubernur Subardjo, di lokasi kantor gubernur peninggalan Belanda itu dibangun kantor gubernur yang baru (Barjie B, ed., 2020).

Bangunan Kantor Gubernur Kalsel beratap bubungan tinggi di nol kilometer Banjarmasin yang tersisa sekarang ini sempat direnovasi dan dipakai Gubernur Ir. H. M. Said. Subardjo juga melakukan program pembangunan sarana dan prasarana perkantoran seperti bangunan belakang dan samping kiri-kanan Kantor Gubernur Kalsel berlantai tiga dan melengkapi berbagai fasilitas Pemda lainnya.

Pada saat kepemimpinannya, Subardjo juga membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappemda) dengan menunjuk Rektor Unlam Prof. Anwari Dilmy sebagai Ketua Bappemda, dan Drs. M. Kustan Basri (Dosen Fakultas Ekonomi Unlam) sebagai Wakil Ketua.

Menurut pandangan Drs. M. Kustan Basri, Gubernur Subardjo adalah seorang yang visioner. Pada waktu periode

kepemimpinan Gubernur Subardjo ini pula, dilakukan pembangunan Stadion 17 Mei, pembangunan Gelanggang Remaja Hasanuddin HM, dan dimulai pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin (Barjie B, ed., 2020).



Gambar 46. Gubernur Subardjo Soerosaroyo saat menyambut kedatangan Presiden Soeharto di Kalimantan Selatan. Sumber: koleksi Wajidi.

Gubernur Subardjo pula lah yang membangun prasarana jalan raya yang membuka Kota Banjarmasin yaitu jalan Kayu Tangi (sekarang Jalan Brigjen H. Hassan Basry)

yang kemudian terhubung Kampus Baru Unlam Kayu Tangi dan seterusnya menuju Barito Kuala, dan oleh generasi berikutnya dihubungkan dengan jalan menuju Kalimantan Tengah (Barjie B, ed., 2020).

Ketika Unlam ingin membangun kampus baru, maka Gubernur Subardjo pulalah yang memberikan hibah berupa tanah di Sungai Miai yang kini adalah Kampus Unlam Kayu Tangi. Demikian kesaksian, Drs. M. Kustan Basri yang kala itu sebagai dosen Unlam sekaligus Plt. Ketua/Wakil Ketua Bappeda dalam autobiografinya (Barjie B, ed., 2020).

Menurut Kustan Basri, Gubernur Subardjo pernah turun tangan mengatasi persoalan Fakultas Teknik Unlam yang karena persoalan yang pelik namun tak dapat diatasi karena belum adanya bantuan pemda, sehingga Rektor Prof. Anwar Dilmy sempat ingin membubarkan, namun Gubernur Subardjo turun tangan sehingga fakultas itu tidak jadi dibubarkan.



Gambar 47. Gubernur Subarjo didampingi Mendikbud RI Dr. Daed Joesoef meresmikan selesainya pembangunan gedung Museum Lambung Mangkurat, 10 Januari 1979. Sumber: koleksi Museum LM.

Walau berlatar belakang militer, Subardjo sangat memperhatikan dunia kesenian. M.P. Lambut mengisahkan tentang perhatian Subardjo yang mendorong agar ibu-ibu membentuk paduan suara untuk berkontes di lomba paduan suara tingkat nasional. Tercatat saat itu pernah menduduki peringkat harapan I.

Subardjo berperan mengangkat lagu-lagu Banjar untuk dinyanyikan dalam paduan suara atau di berbagai kesempatan. Ia antara lain telah berbuat memajukan kesenian daerah dengan menyelenggarakan even Pekan Kesenian Daerah (PKD) tahun 1973 (Santang, 2011).

Subardjo seringkali membantu para seniman untuk berkarya atau mementaskan lagu Banjar di pentas nasional. Melalui peran para seniman dan didukung Subardjo, maka lagu-lagu Banjar seperti lagu ampar-ampar pisang, lagu Paris Barantai, dan lainnya semakin dikenal di masyarakat banua, nasional maupun internasional.

Beliau juga ikut mengukuhkan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dengan menyumbangkan anjungan Kalimantan Selatan, beliau membangun Rumah Banjar beserta perangkat budaya lainnya di Taman Mini Indonesia Indah.

Serta tidak kalah pentingnya upaya Gubernur Subardjo mengintensifkan produksi beras, dengan kerja sama semua aparat dan masyarakat petani, berhasil membawa Kalimantan Selatan mencapai surplus produksi beras pertama pada masa itu. Ini tentunya membawa kebanggaan sendiri untuk masyarakat Kalimantan Selatan.

### **Pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin**

Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah proyek monumental yang dicita-citakan sejak Gubernur H. Maksid

dengan Pangdamnya pada waktu itu Kolonel H. Hassan Basry, dan ini merupakan kehendak kaum muslimin dan para pejuang Kalimantan (Said, 1999).

Nama Sabilal Muhtadin mengambil nama kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari seorang ulama besar Kesultanan Banjar di abad ke-18. Tujuan pembangunan masjid ini adalah membuat sebuah mesjid raya yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Islam dalam arti yang luas, di kota Banjarmasin.



Gambar 48. Masjid Raya Sabial Muhtadin, Banjarmasin. Sumber: anonim.

Namun, dalam perencanaan dan pembangunannya terdapat beberapa kendala, seperti pemilihan lokasi dan peristiwa bersejarah yang terkait seperti peristiwa G30S/PKI. Namun pada dalam periode Repelita I, dipimpin Gubernur H. Subardjo, maka diperoleh lokasi yang terbaik dengan tukar menukar Komplek Asrama Tatas seluas 10, 35 hektar (komplek tentara) dan berujung pada pemancangan tiang pertama Mesjid Raya pada tanggal 10 Nopember 1974.



Sebagai pengganti Asrama Tatas yang saat itu menjadi asrama tentara, maka disediakan tanah seluas 25 hektar di daerah Pengambangan (Komplek Gatot Subroto) sekarang.

Dalam melaksanakan pembangunan Masjid Raya Sabibal Muhtadin, penandatanganan kontrak dilakukan langsung oleh Gubernur Subardjo dengan kontraktor dari BUMN yaitu BARATA M & E. Konsultan perencananya adalah PT. Griya Cipta Sarana dari Jakarta, dan konsultan interior dari ITB (Said, 1999).

Pemimpin Proyek untuk periode ke-2 ini adalah Ir. M. Said (di kemudian hari Gubernur KDH Tk. I Kalsel) yang menggantikan Ir. H. A. Tamdjid. Untuk mengakomodir para pihak yang ingin menyumbang maka dibentuk pula panitia pengumpul sumbangan diketuai oleh Ketua Harian yaitu K.H. Hasan Mugeni Marwan dengan Sekretarisnya Ustadz H.M. Rafie Hamdie (Said, 1999).



Gambar 49. Penandatanganan kontrak pembangunan Masjid Sabibal Muhtadin oleh Gubernur Subardjo dengan kontraktor. Sumber: H.M. Said, dkk, 1981.

Pada tahun 1980, pembangunan Masjid Raya selesai dibangun. Masyarakat sangat bangga, dan Gubernur Subardjo dinilai sangat berjasa dan begitu pula Ir. H.M. Said sebagai Pemimpin Proyeknya serta Ir. Muziah dari pelaksana (BARATA M & E). Sayangnya Subardjo tidak hadir dalam peresmian oleh Presiden RI Soeharto tanggal 9 Februari 1981, walau sudah dibujuk Ir. H.M. Said, mungkin karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan ketika itu.



Gambar 50. Gubernur Subardjo dan teks prasasti pemancangan tiang pertama Masjid Raya Sabibal Muhtadin. Sumber: H.M. Said, dkk, 1981.



Gambar 51. Penentuan arah kiblat saat pembangunan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin. Sumber: H.M. Said, dkk, 1981.

## Tanda Jasa dan Penghargaan

Atas dedikasi dan pengabdianya, H. Subardjo Soerosaroyo menerima berbagai tanda jasa dan penghargaan:

1. Bintang Geril R.I;
2. Bintang Kartika Eka Paksi;
3. Bintang Bhayangkara Naraya;
4. *The Order of Service Merit Fourth Class Republic of South Korea* dari Korea Selatan;
5. Medali Sewindu Angkatan Perang R.I;
6. Medali Perjuangan Angkatan 45;
7. Satyalancana Kesetiaan 24 tahun;
8. Satyalancana Panca Warsa;
9. Satyalancana Kesetiaan;
10. Satyalancana Peristiwa Aksi Militer ke Satu;
11. Satyalancana Peristiwa Perang Kemerdekaan ke Dua;
12. Satyalancana Gerakan Operasi Militer ke-1;
13. Satyalancana Gerakan Operasi Militer ke-IV;
14. Satyalancana Wira Dharma;
15. Satyalancana Penegak.



Gambar 52. H. Subardjo dan isteri, Hj. Syahrizada. Sumber: koleksi Ibu Hj. Syahrizada.

### **Akhir Hayat**

Selepas tidak lagi menjabat sebagai gubernur, H. Subardjo Soerosaroyo tetap mendarmabaktikan dirinya untuk bangsa dan negara melalui jalur parlemen sebagai anggota DPR RI periode tahun 1987-1992.

H. Subardjo Soerosaroyo meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1999 karena sakit. Beliau lalu dimakamkan dengan penuh hormat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, DKI Jakarta. Almarhum meninggalkan istri Hj.Syahrizada dan 4 orang anak yakni Ari Setiadi, Titiiek Setiawati, Agus Setianto dan Taufiq Susetio BS BA.

Banyak jasa Subardjo yang ditorehkan selama menjabat gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan. Untuk mengenang jasa-jasanya, maka nama Gubernur Subardjo diabadikan sebagai nama kanal yang dibangun di masa Jepang dengan nama Anjir Subardjo dan nama jalan lingkar selatan Banjarmasin, Jalan Gubernur Subardjo.



Gambar 53. Putra-putri H. Subardjo-Hj.Syahrizada yakni Ari Setiadi, Titiiek Setiawati, Agus Setianto dan Taufiq Susetio BS BA. Sumber: koleksi Ibu Hj. Syahrizada.



**MISTAR TJOKROKESOEMO**  
**GUBERNUR KDH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN**  
**(1980 – 1984)**

Gubernur Kalimantan Selatan yang satu ini juga berasal dari Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat. Saat diangkat menjadi Gubernur, pangkatnya Brigadir Jenderal, yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) X Lambung Mangkurat, yang ketika itu berkedudukan di Banjarmasin.

Putra kelahiran Pare, Kediri, Jawa Timur, 13 September 1926, sudah menjadi tentara sejak tahun 1945 di kesatuan Infantri dengan Nomor Pokok Prajurit 10298.

Namun sebelumnya telah menjalani pendidikan formal mulai dari HIS Mardi Tresno (1935-1942). Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Teknik Surabaya (1942-1944).

Setelah menjadi tentara, berbagai pendidikan juga sempat diikutinya seperti Aplikasi Kursus Komandan KOMPI (Danki) 1952. Kursus Persiapan Pendidikan Perwira Lanjutan I (1956). Kursus Perwira Lanjutan I (1959-1960). Kursus Perwira Lanjutan II (1961-1962). Dan sempat pula mengikuti Sekolah Komando Angkatan Darat (SESKOAD) 1967-1968.



Gambar 54. Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo (paling kanan), Ketua DPRD Provinsi Rahmatullah, dan Sekda Provinsi Gt. Syamsir Alam saat mendampingi Mendagri Soepardjo Roestam. Sumber: Ahmad Barjije B (ed.), 2020.

Berbagai jenjang jabatan dan pekerjaan di lingkungan TNI Angkatan Darat pernah ditekuninya mulai dari Komandan Peleton (Danton) di Sidoarjo (1945-1946). Selanjutnya dipercaya menjadi Komandan Kompi pada Batalyon Infantri di Kediri (1946).



Gambar 55. Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo (peci hitam) dan Wakil Gubernur H. M. Said (baju batik) saat serah terima gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat bantuan Presiden pada tanggal 21 Mei 1981 kepada Rektor Drs. M. Kustan Basri. Sumber: Ahmad Barjie B (ed.), 2020.

Pernah menjadi Kepala Seksi di Batalyon Infantri di Kediri. Kemudian berlanjut menjadi Gumil Pusdikif selama 5 tahun antara tahun 1962-1968. Karier Mistar Tjokrokoesoemo terus meningkat menjadi Kepala Staf Brigade Infantri 16. Juga pernah diangkat dalam jabatan Wakil Asisten Operasi Kepala Staf Kodam VIII Brawijaya. Kemudian berlanjut menjadi Komandan Brigade Infantri 16.



Setelah sekian lama bertugas di pulau Jawa, tentara yang satu ini juga bertugas dan dipindahkan ke pulau Kalimantan untuk menduduki jabatan sebagai Danrindam IX Kaltim (1968).

Seiring dengan pangkat yang diterimanya, karir tentaranya juga terus meningkat menjadi Aspers Kasdam VIII/Brawijaya (1968-1970). Kemudian menjadi Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya (1970-1974) dan sebagai Kepala Staf Kodam VIII Brawijaya (1974-1975). Puncak karir militernya ketika itu, saat dipercaya menjadi Panglima Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat (1976-1979) berkedudukan di Banjarmasin.

Sebagai salah seorang anggota TNI-AD, tentu Mistar Tjokrooesoemo tidak pernah absen dari riwayat perjuangan yang dilakukannya seperti Operasi Clash I, PKI Affair, Clash II/APRA, DI/TII Sulsel, PERMESTA Sulut, G.30S/PKI Kediri, dan Trikora Kalbar.

Dengan perjuangan dan penugasannya itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang satu ini, juga memiliki tanda jasa Bintang Gerilya, Kartika Eka Paksi, Sewindu, Setya Lencana 24 Tahun, PK I, PK II, GOM I, GOM II, GOM III, GOM IV, Sapta Marga, Wira Dharma, Penegak, dan Dwija Sistha.

Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Selatan periode 1980-1984 ini dikenal sebagai orang yang murah hati. Dimasa kepemimpinannya pula, para karyawan di lingkungan Kantor Gubernur ketika itu sempat berkali-kali mendapatkan santunan berupa pembagian kain bahan untuk perempuan.

Dalam memimpin daerah Kalimantan Selatan pada masa itu, Gubernur yang mantan Pangdam X Lambung Mangkurat tersebut, didampingi pula oleh seorang Wakil Gubernur yang berasal dari kalangan sipil, yakni Ir.H.M.Said terhitung 19 Agustus 1980 dan dilantik Mendagri RI H. Amir Machmud di Gedung Wanita Kayu Tangi.

Drs. M. Kustan Basri menceritakan bahwa dalam sebuah kesempatan, mungkin di tahun 1983, Kustan, Gubernur Mistar Tjokrokoesomo serta wakil Gubernur Ir. H.M. Said bertemu dalam sebuah acara. Ketiganya berdiskusi kemungkinan Unlam mendirikan Fakultas Kedokteran (Barjie B, ed., 2020). Mereka bertiga membangun tim persiapan (Said, 1999).

Pendirian Fakultas Kedokteran dalam lingkungan Universitas Lambung Mangkurat akhirnya dapat terwujud ketika Ir. H.M. Said menjabat sebagai Gubernur KDH Tingkat Kalimantan Selatan (Said, 1999). dengan turun tangannya Bapak Prof. Dr. Fuad Hassan, dan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi berupa pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) tahun 1989 (Said, 1999).

Perhatiannya terhadap bidang pendidikan dan mental spiritual cukup menonjol, sehingga berbagai bantuan selalu diarahkan beliau untuk pembangunan rumah ibadah, pesantren dan madrasah.

Karena beliau dikenal sebagai Gubernur yang murah hati dan selalu memberikan perhatian dalam hal bantuan untuk masyarakat. Tercatat berkali-kali ketika ada agenda kunjungan kerja ke daerah, rombongan Gubernur terkadang dicegat warga masyarakat di tengah jalan dengan maksud untuk meminta bantuan bagi keperluan pembangunan.

Tak ayal lagi, setiap kali pergi mengunjungi suatu daerah, Gubernur Mistar sudah mempersiapkan segala keperluan untuk acara penyerahan bantuan. Begitu pula jika sudah sampai di suatu daerah, rombongan Gubernur sering menerima titipan proposal dari pimpinan daerah atau tokoh masyarakat yang pada intinya bermaksud ingin meminta bantuan bagi keperluan pembangunan.

Rupanya dari dalam diri mantan Pangdam X Lambung Mangkurat ini, ada keinginan beliau untuk membangun kota

satelit di antara kawasan Gambut dan Liang Anggang, yang ketika itu dikenal sebagai areal yang tidak produktif. Diluar areal pertanian yang selama ini hanya menghasilkan padi lokal dan dipanen sekali setahun.

Untuk memulai pembangunan kota satelit tersebut, dibangunlah satu monumen di kilometer 17 Gambut. Ini untuk menandai pula penghormatannya terhadap perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan, yang telah melahirkan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Dari monumen itulah diharapkan akan menjadi titik sentral pembangunan sebuah kota satelit yang diinginkan.



Gambar 56. Penandatanganan prasasti peresmian Gedung Wanita yang awal mula dibangun Gubernur Subardjo di Jalan Brigjen H. Hassan Basri, Banjarmasin, kini dinamakan Gedung Hj. Gusti Noorsehan Djohansjah. Sumber: Ahmad Barjie B (ed.), 2020.

Mengingat pada masa itu, Gubernur Kalimantan Selatan masih belum memiliki rumah jabatan yang representatif. Dimulailah rencana pembangunan dengan memilih areal bekas rumah sakit jiwa Banjarmasin, yang posisinya dinilai strategis karena tetap berada di tengah kota. Untuk bangunan rumah jabatan tersebut, diinginkannya mengambil desain rumah Banjar bubungan tinggi.

Sayangnya keinginan Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo belum sempat terwujud secara nyata untuk mendiaminya. Pak Mistar mulai sakit-sakitan sejak kelelahan bermain tenis sehingga dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan (Said, 1999).

Kesehatan Pak Mistar semakin menurun. Pada tanggal 22 September 1984 sore hari Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo berpulang ke rahmatullah di kediaman resmi Gubernur karena mendapat serangan jantung. Beliau wafat ketika masih menjabat sebagai gubernur, dan jenazahnya dimakamkan di Kediri Jawa Timur, sedangkan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal TNI (Purn).



**MUHAMMAD SAID**  
**GUBERNUR KDH TK.I KALIMANTAN SELATAN**  
**(1984-1995)**

Ir. H. MUHAMMAD SAID kelahiran Kandangan 8 September 1936, ayahnya bernama H. Bahar dan ibunya bernama Hj. Banjariah. Ayahnya bekerja sebagai supir taksi di Kandangan dengan menggunakan satu-satunya mobil milik sendiri. Sewaktu masih sekolah SR, Muhammad Said bersama keluarga besar sudah naik haji tahun 1948, saat usianya kanak-kanak. Banyak orang Banjar saat itu naik haji sekaligus bertahan untuk bekerja di Saudi. Said dan ayahnya pun ingin seperti itu, namun ibunya memaksa pulang. Menurut Pak Said, sekiranya ia dan keluarganya jadi tinggal di Saudi, pasti akan menjadi ulama. Seperti beberapa ulama asal Banjar, Syekh Abdul Karim al-Banjari, Syekh Husni Thamrin (Guru Misfalah), dan banyak lagi.

Pengalaman berhaji waktu kecil, saat kota Makkah dan Madinah belum semodern sekarang, terus berkesan pada diri Pak Said. Ia tumbuh besar menjadi orang yang alim. Menjadi penceramah, khatib dan imam shalat jamaah, bukan asing bagi beliau. Masjid At-Taqwa Banjarmasin biasa menjadi tempat beliau menjadi khatib dan imam shalat Jumat dan hari raya. Selain menjadi Ketua Pembangunan masjid-masjid besar seperti Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Pak Said juga bersedia ikut membina masjid-masjid yang relatif kecil.

M. Said adalah alumni Fakultas Teknik Sipil Universitas Gajah Mada tahun 1963. Tidak banyak yang lulus dari perguruan tinggi saat itu, terlebih dari jurusan teknik. Maka wajar dengan latar belakang pendidikan ini ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis di birokrasi pemerintahan, memimpin sejumlah proyek pembangunan yang jadi bekal dia sebagai gubernur yang banyak melakukan terobosan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung-gedung yang bisa dinikmati hingga sekarang.

Pak Said dilantik menjadi Gubernur pada hari Senin 25 Februari 1985 dalam usia yang relatif muda, 49 tahun, oleh

Mendagri RI. H. Soepardjo Rustam, setelah beberapa bulan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur KDH merangkap sebagai Wakil Gubernur KDH menggantikan almarhum Mayor Jenderal H. Mistar Tjokrokoesoemo yang wafat tanggal 22 September 1984, sehingga otomatis beliau menggantikannya sebagai penjabat gubernur untuk sisa masa jabatan, dan kemudian gubernur definitif dua periode sesudahnya (1985-1995). Jika dihitung sejak beliau sebagai pelaksana tugas, maka dari deretan Gubernur Kalimantan dan Kalimantan Selatan selama ini, Pak Said paling lama menorehkan pengabdianya, yaitu 11 tahun (1984-1995).

Usai menjadi gubernur dan ketika masih sehat, Pak Said juga sempat menjadi anggota DPD-RI bersama H Ahmad Makkie dan beberapa tokoh Kalimantan Selatan lainnya.



Gambar 57. Gubernur Ir. H. Muhammad Said bersama isteri Hj. Noorlatifah Said.  
Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Karir jabatan H.M. Said dimulai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1964. Namun kemudian ia ditarik oleh Gubernur H. Aberani Sulaiman ke Provinsi. Pak Said menceritakan bahwa saat Gubernur Aberani Sulaiman ke Kandangan, beliau heran ada insinyur di Kabupaten. Maka ditariklah Ir. H.M. Said ke Propinsi, berkantor di Banjarbaru (Said, 1999).

Berikut ini perjalanan karir jabatan H.M Said di pemerintahan:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1964;
2. Kepala Bagian Pembangunan Kalimantan Selatan, 1964-1966;
3. Anggota BPH merangkap Ketua Harian Bappeda Kalimantan Selatan, 1966-1967;
4. Kepala Biro Pembangunan, 1971-1981;
5. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 1981-1984;
6. Pj. Gubernur Kalimantan Selatan 1984-1985;
7. Gubernur Kalimantan Selatan 1985-1995 (dua periode);
8. Anggota MPR-RI Utusan Daerah 1984-1995;
9. Penasihat PP Kawasan Timur Indonesia, 1995-1998;
10. Anggota DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) 1998-2004;
11. Anggota DPD RI/MPR RI, 2004-2009.

Beberapa organisasi yang pernah ditangani adalah: Sekretaris Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan Yogyakarta 1958-1963, Anggota Dewan Pengawas PBSI Pusat 1972-1970, Ketua KONI Kalimantan Selatan 1982-1988, Ketua Pembina Inkai Kalimantan Selatan 1981 – Pensiun, Ketua Majelis Pembimbing Pramuka Kalimantan Selatan 1982-1995, Ketua Yayasan Jantung Sehat 1984-1990, Ketua/Anggota Persatuan Insinyur Indonesia 1972, Ketua



Pembina/Anggota Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Kalimantan Selatan 1973, Ketua Dewan Pakar ICMI Kalimantan Selatan 1996-2000, Anggota Dewan Penasihat ICMI Pusat 1996-2000, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kalimantan Selatan 1984-1995.



Gambar 58. Ir. H.M. Said mendampingi Presiden Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko. Sumber: buku Profil Kalimantan Selatan, 1992.



Gambar 59. Saat momen pelantikan Ir. H. Said sebagai gubernur periode kedua (1990-1995). Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Mengingat lama dan banyaknya pengabdian beliau, H. M. Said memperoleh sejumlah penghargaan dan tanda jasa, diantaranya:

1. Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI 1988;
2. Satya Lencana Karyasatya dari Presien RI 1989;
3. Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI 1990;
4. Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden RI 1992;
5. Pena Mas dari Persatuan Wartawan Indonesia 1991;
6. Lencana Melati dari Kwartir Nasional Pramuka 1987;
7. Manggala Karya Kencana dari BKBN 1987;
8. Medali Perjuangan dari DHD 45 1990;
9. Bintang LVRI dari LVRI 1988;
10. Tanda Jasa KL I dari Yayasan Jantung 1994;
11. Penghargaan Alumni dari Universitas Gajah Mada 1994;
12. Pinisepuh dari DPP Golkar 1996;
13. Datu Setia Negeri Utama dari Kesultanan Banjar 2010.

## **Komitmen Membangun**

Banyak hal perlu digarisbawahi ketika mengenang kepemimpinan Pak Said sebagai kepala daerah. Para tokoh, mantan pejabat, wartawan dan orang-orang yang pernah dekat dengan beliau tentu memiliki catatan masing-masing. Beliau patut disebut sebagai Bapak Pembangunan Kalimantan Selatan, sesudah predikat yang sama pernah diberikan kepada gubernur pertama dan pahlawan nasional asal Kalimantan Selatan Ir. P.M. Noor (1901-1979).

Pengabdian Pak Said membangun Kalimantan Selatan tidak mudah, sebab di masa lalu selain dana pembangunan kurang, juga masih bercampur dengan aroma dan kepentingan politik. Sekian lama Kalimantan Selatan dianggap daerah perlawanan terhadap pusat, karena salah seorang tokoh Kalimantan Selatan yang juga pahlawan nasional

Brigjen TNI Purn. H. Hassan Basry sebagai Pangdam X Lambung Mangkurat dulu cenderung berposisi terhadap Presiden Soekarno, karena Hassan Basry berani membekukan PKI di Kalimantan Selatan lebih dahulu tanpa restu pusat.

Masuk era Orde Baru, Kalimantan Selatan juga menjadi lumbung suara Partai NU yang kemudian menjadi PPP yang di Pusat diketuai tokoh Kalimantan Selatan yang belakangan juga menjadi pahlawan nasional DR. KH. Idham Chalid. Akibatnya, perolehan suara Golkar sebagai partai pemerintah, di Kalimantan Selatan cenderung stagnan bahkan kalah dibanding Partai NU dan PPP. Akibatnya sejumlah gubernur Kalimantan Selatan dan bupati/walikota direkrut dari kalangan tokoh militer dari Jawa dan sisi lain pembangunan cenderung terabaikan.



Gambar 60. Gubernur Said dan Ibu saat berjabat tangan dengan Presiden Soeharto. Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Pak Said sebagai tokoh sipil Kalimantan Selatan agaknya menjadi taruhan. Apabila berhasil menaikkan suara Golkar, maka selain gubernur-gubernur ke depan akan diberikan kepada putra-putra daerah, pembangunan juga akan lebih ditingkatkan. Dalam posisi sulit ini, Pak Said menghadap DR. KH. Idham Chalid di Jakarta. Idham Chalid sebagai tokoh nasional dan juga putra daerah memaklumi keadaan ini. Sebagai strateginya, Idham tidak lagi berkampanye untuk NU-PPP di Kalimantan Selatan dan mempersilakan Golkar menjadi pemenang. Hasilnya pemerintah pusat sangat senang dan tidak ragu lagi menggelontorkan dana pembangunan untuk Kalimantan Selatan. Sejak itu dan seterusnya sampai harini, semua gubernur Kalimantan Selatan adalah putra-putra terbaik daerah sendiri. Terlepas dari kontroversi ini, Pak Said memang seorang gubernur yang benar-benar mumpuni.



Gambar 61. Gubernur Ir. H.M. Said (tengah), mendampingi Prof. Dr. Emil Salim (kiri) saat berbincang dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Drs. H.M. Kustan Basri (kanan). Sumber: Ahmad Barjie B (ed.), 2020.

Jabatan beliau dimulai dari nol dan sangat memahami berbagai pekerjaan yang dikerjakan oleh anak buahnya, karena sudah pernah dijalani dalam jabatan-jabatan sebelumnya. Sebagai insinyur teknik, beliau tahu persis teknis membuat jalan aspal atau bangunan beton sampai ke detil materialnya. Oleh karena itu selama kepemimpinannya sebagai gubernur, beliau dikenang banyak membangun infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan jembatan disamping pembangunan non fisik. Beliau sangat disiplin, pekerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas.



Gambar 62. Gedung Bundar Sultan Suriansyah yang dibangun di masa kepemimpinan Gubernur Ir. H.M. Said. Sumber: koleksi Wajidi.

Pada awal ia ditarik ke Provinsi tahun 1964, pak Said sudah terlibat dalam proyek-proyek nasional di Kalimantan Selatan antara lain Proyek Jalan Kalimantan (PROJAKAL) bantuan pemerintah Rusia, Proyek Pabrik Kertas Martapura, Proyek Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Proyek PLTA Riam Kanan [kini PLTA Ir. P.M. Noor], Proyek Pembukaan

Persawahan Pasang Surut Kalimantan (P4S), Proyek Air Minum Banjarmasin (Said, 1999).

Di masa Pak Said banyak sekali pembangunan yang dilaksanakan, fisik maupun non fisik. Banyak bangunan strategis yang masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Sekadar menyebut diantaranya Gedung Bundar Sultan Suriansyah (diresmikan oleh Gubernur Gusti Hasan Aman tahun 1997), Mahligai Pancasila dan Rumah Jabatan Gubernur di lokasi eks bangunan Rumah Sakit Jiwa, Jalan Trans Kalimantan dan Jembatan Barito, Pengaspalan jalan nasional dari Banjarmasin ke Tanjung dengan “Aspal Hotmix Korea”, pembangunan pabrik semen di Tarjun, Kotabaru, membangun jaringan jalan ke Loksado dan Batulicin.

Beliau juga yang pertama membuka jalan dari Kandangan ke Loksado sehingga kawasan alam Loksado bisa dijalan untuk wisatawan yang ingin menikmati *bamboo rafting* di sepanjang aliran sungai sambil menikmati keindahan alamnya.

Di masa Gubernur M. Said juga dilakukan pembangunan jalan dari Pelaihari menembus ke Pagatan yang pada masa-masa gubernur sebelumnya tidak pernah berhasil (Said, 1999). Dan di masa kepemimpinan Gubernur Said juga berhasil dibangun jalan yang menembus Kalimantan Timur dari pantai timur (Batulicin) Kalimantan Selatan.

Gubernur H. M. Said juga berhasil mewujudkan pendirian Fakultas Kedokteran dalam lingkungan Universitas Lambung Mangkurat yang diidamkan sejak lama bersama yakni dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi berupa pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) tahun 1989 (Said, 1999).

Pak Said juga yang berinisiatif memugar Masjid Quba di Amawang Kanan yang didukung banyak warga dalam hal pendanaannya. Selain itu beliau juga menjadikan rumah warisan orang tuanya menjadi Wisma Amawang sebagai

penginapan untuk umum sekaligus sebagai bentuk pelestarian rumah adat Banjar dan cagar budaya.



Gambar 63. Jembatan Barito salah satu ikon Kalimantan Selatan yang dibangun Pemerintah Pusat pada masa pemerintahan Gubernur Ir. H.M. Said, namun diresmikan oleh Presiden Soeharto pada masa pemerintahan Gubernur Drs. H. Gusti Hasan Aman. Sumber: Anonim.

## Intelek dan Religius

Banyak pembangunan fisik dilakukan semasa pemerintahan H. M. Said, baik sewaktu menjadi Wakil Gubernur maupun Gubernur, bahkan sejak masa sebelumnya. Di antaranya adalah pembangunan masjid terbesar di Kalimantan Selatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang dimulai di masa kepemimpinan Gubernur Subardjo. Proses pembangunannya dilakukan secara periodik. mulai sejak Periode I Tahun 1973-1978 dengan Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek: Ir. H. A. Tamdjid, H. Asnawi. Periode II



Tahun 1978-1980 Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek Ir. H. M. Said, Haderansyah. Badan Pengawas Pekerjaan/Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota: A. Gaffar Hanafiah, Drs. Yuderin, Ir. Djohansyah Hasyim, A. Hamid Zaini B.Sc, Drs. Horman Bachtiar. Staf Teknik/Tata Usaha H. Masrin Chuzairin, Hasbullah Hapip, Abdul Hadi, A. Saruji BBA., Gusti Syamsuri Jumberiansyah, M. Ridwan Hamdi.



Gambar 64. Pak Said dan ibu Hj. Noorlatifah Said berhalal bil halal dengan karyawan/karyawati di gubernuran. Sumber: buku Profil Kalimantan Selatan, 1992.



Gambar 65. Ir. H.M. Said saat memberikan arahan dalam sebuah acara pertemuan. Sumber: buku Profil Kalimantan Selatan, 1992.

Panitia Pengumpul Dana: Penasihat, Gubernur KDH Tk. I Kalimantan Selatan, Pangdam X Lambung Mangkurat, Kadapol XIII/Kalra, Kejati Kalimantan Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Tk. I Kalimantan Selatan, Walikotamadya Banjarmasin, Rektor IAIN Antasari, KH. Badruddin, KH. Gurdan Hadi, KH. Gusti Abdul Muis, KH. M Hanafie Gobit. Ketua Harian: K.H. Hasan Mugeni Marwan, Wakil-wakil Ketua KH. Mukeri Gawith MA, KH. Saifuddin Birhasani, Drs. Kasyful Anwar, Drs. H.A. Muchtar Sofyan. Sekretaris H. Muhammad Rafi'ie Hamdie, Wakil-wakil Sekretaris Drs. Ahmad Rabbani, Drs. M. Aini Hagan, M. Nurdin Yunus. Bendahara H. A. Madjedi (Dir. BPD Kalimantan Selatan), Wakil Bendahara H. Gusti Ideham. Pembantu-pembantu Umum KH Muchyar Usman, Drs. KH. Zhafury Zumry BA., KH. Abdurrasyid Nasar, KH.A. Muin Hidayatullah, Drs. H. Adnani Iskandar, H. Sjachrul, Tadjuddin Noor, Goesti Soeleiman, K.H Herman, H. Saberi Razak dan Taufiq Abidarda. Masjid ini selesai tahun 1980 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1981, saat H. M. Said menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mendampingi Gubernur Mistar Tjokrokoesoemo.

Selepas peresmian, H. M. Said dipercaya sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan ustaz H.M. Rafie Hamdie sebagai Sekretaris. Di kemudian hari jabatan beliau digantikan oleh H. Maksid dan beliau menerimanya dengan gembira (Said, 1999).



Gambar 66. Ir. H.M. Said menerima penghargaan dari Presiden Soeharto.  
Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Di luar urusan kedinasan, Pak Said seorang pecinta ilmu dan religius. Usai menjadi gubernur beliau rajin menulis, khususnya di Harian BPost ini, juga berupa buku. Tulisannya enak dibaca oleh generasi muda yang ingin mentransfer ilmu dan pengalaman orang-orang tua, terutama di masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Nuansanya beda, karena berangkat dari pengalaman hidup suka dan duka. Di antara buku karangannya adalah *Buah Pena Bung Mantan*, *Intisari Kisah Gerilya Kalimantan*, *Menuju Kursi Nomor 1*, *Raja Diraja Kesultanan Banjar*, dan *Renungan Seorang Kakek*.



Gambar 67. Ir. H.M. Said menerima penghargaan dari Presiden Soeharto.  
Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Di masa Pak Said, ICMI, dan ISEI Kalimantan Selatan sebagai wadah para intelektual juga berkembang. Begitu juga LPP TKA BKPRMI bertumbuh pesat hingga menyebar luas ke pelosok Nusantara dan beberapa belahan dunia. Karena keberhasilan Kalimantan Selatan ini, Ust. Chairani Idris pernah dipercayai sebagai Direktur Nasional LPP TKA BKPRMI yang berkantor pusat di Masjid Istiqlal. Semua ini menjadi subur tak lepas dari dukungan Pak Said dan Ibu Noor Latifah.



Gambar 68. Syekh Abdul Karim al-Banjari di kediaman beliau di Makkah, menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Selatan H. M. Said dan Ust Chairani Idris, 1991. Sumber: koleksi Ahmad Barjie B.

Di masa Pak Said pula pertumbuhan pers di daerah sangat subur. Kerjasama Pemprov dengan pers sangat intensif, diantaranya dalam bentuk pertemuan rutin bulanan dengan awak medis dan adanya edisi khusus Koran Membangun Desa (KMB) setiap hari Ahad. Dengan begitu pemerintah daerah dapat menyosialisasikan program-program pembangunan dan masyarakat luas hingga ke pedesaan pun dapat mengikuti perkembangan pembangunan di daerah. Penghargaan Pena Mas dari PWI Pusat suatu bukti betapa Pak Said memang sangat *welcome* terhadap dunia pers.

Usai menjadi gubernur, Pak Said sempat menjadi Penasehat Presiden Untuk Kawasan Timur Indonesia pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie 1995-1998, anggota DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) 1998-2004 dan kemudian pada Pemilu tahun 2004 terpilih menjadi

Anggota DPD RI untuk periode 2004-2009 dengan memperoleh suara terbanyak yaitu 249.888, bersama H.Ahmad Makkie, Sofwat Hadi dan H.M. Ramli.



Gambar 69. H.M. Said bersama Prof. Nurcholish Madjid didampingi KH. M Rafi'i Hamdie, Chairani Idris, di Banjarmasin, 1985. Sumber: koleksi Ahmad Barjie B.



Gambar 70. Pasangan muda, Ir. H.M. Said dan isteri. Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Sultan Haji Khairul Saleh menjadikan H. M. Said sebagai *tetuha* Banjar, sebab Pak Said memiliki komitmen sejarah dan budaya yang tinggi. Peraih gelar Datu Setia Negeri Utama dari Kesultanan Banjar ini sangat ingin sejarah dan budaya Banjar terus digali dan

dihidupkembangkan sebagai salah satu jatidiri banua dalam menopang budaya dan kekuatan NKRI.



Gambar 71. Pengantin baru, Ir. H. Said dan Noorlatifah. Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.



Dari perkawinannya dengan Hj. Noorlatifah Said (2 Maret 1967), pasangan ini memiliki empat orang anak, yaitu 1. Drs. H. Faisal Rizani, M.Si, lahir 1969, pekerjaan ASN; 2. Prof. Hj. Laila Refiana, S.Psi, M.Si, Ph.D, lahir 1970, pekerjaan Dosen dan Psikolog; 3. Dr. Hj. Dewi Damayanti, SE, MM, lahir 1972, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Kalsel; 4. Dr. Hj. Meldasari, S.I.P, M.Si., lahir 1975, pekerjaan Dosen dan Konsultan. Dikaruniai 12 orang cucu.



Gambar 72. Ir. H.M. Said bersama isteri dan empat putra-putrinya. Sumber: koleksi keluarga H.M. Said.

Ir. H. Muhammad Said meninggal Rabu 16 Februari 2022 dan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Jalan Jenderal Ahmad Yani km 26 banjarbaru, berdekatan dengan almarhumah istrinya yang meninggal dunia tahun 2016, enam tahun sebelumnya.



**GUSTI HASAN AMAN**  
GUBERNUR KDH TK. I KALIMANTAN SELATAN  
(1995 – 2000)

Drs. H. GUSTI HASAN AMAN. Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan yang satu ini berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi. Begitu juga jabatan sebagai Wakil Gubernur, berpasangan dengan Ir. H.M Said. Gusti Hasan Aman pernah pula dipercaya menjadi Penjabat Bupati Hulu Sungai Tengah di Barabai pada tahun 1999. Dia dilahirkan pada tanggal 26 Juli 1938 di Banjarmasin, anak dari pasangan Gusti Aman Sa'ad dan Gusti Mastora, yang merupakan keturunan ke-10 dari Sultan Banjar Pangeran Suriansyah.

Dari pernikahannya dengan Hj. Siti Farida, dikaruniai 4 orang anak. Tiga laki-laki dan satu perempuan, yakni Gusti Farid Hasan Aman, Gusti Nata Hasan Aman, Gusti Rizal Hasan Aman, dan Gusti Rizsa Hasan Aman.



Gambar 73. Gusti Hasan Aman bersama isteri, Hj. Siti Farida. Sumber: koleksi keluarga H. Gusti Hasan Aman.

## Pendidikan

Sementara pendidikan formal terakhirnya dari Gusti Hasan Aman adalah Sarjana Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 1965, yang pada saat itu hanya segelintir putra Kalsel yang meraihnya. Oleh karena pendidikannya itu ia bersama rekannya sesama alumni UGM, Ir. H.M. Said, pernah diminta mengajar sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat (1965-1968). Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diselesaikannya di Banjarmasin. Kemudian SMA dan perguruan tinggi dia selesaikan di Yogyakarta.

Sedangkan pendidikan dan pelatihan jabatan banyak yang telah diikutinya, baik di dalam maupun luar negeri diantaranya, Policy Analysis di USA tahun 1989 dan Pengelolaan Lingkungan di Jerman 1993.

Kariernya di pemerintahan dimulai dari sebagai staf ahli Pepelrada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) tahun 1966 di Kodam VI Tanjungpura. Selanjutnya Kepala Bagian Distribusi Pemda Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum 1969 menjabat Kepala Bagian Perdagangan Pemda Provinsi. Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi 1973. Kepala Biro Perekonomian Setwilda Provinsi Kalimantan Selatan 1977.



Gambar 74. Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman di Banjarmasin atas nama Presiden RI menyematkan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Jabatan lainnya adalah Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Pemda Provinsi 1981. Dan pada tahun 1987 menjabat sebagai Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Pada tahun 1992 menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan pada tahun 1995 dipercaya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

### **Capaian dan Prestasi**

Beberapa catatan gagasan besar yang dilahirkan Gusti Hasan Aman. Mengutip buku “5 tahun Pengabdian Gusti Hasan Aman” ada beberapa capaian dan terobosan antara lain Gerakan Banjar Lima Ratus Rupiah (GB500) setiap warga Kalimantan Selatan dimana pun diharapkan ikut menyumbang

Rp.500,- per orang per bulan, meniru gerakan sumbangan seribu rupiah warga Minang yang sukses.

Melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional secara konsekuen antara lain dibidang lalu lintas berupa penertiban truk batubara. Memerangi kekumuhan di Kotamadya Banjarmasin. Menertibkan bangunan liar di jalan-jalan protokol. Penertiban *sawmill* liar terkait usaha penebangan liar. Gerakan Sasangga Banua yang diluncurkan pada tanggal 14 Agustus 1996 sebagai penyempurnaan dari Gerakan Gawi Sabumi.



Gambar 75. Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman didampingi Bupati Hulu Sungai Utara H. Suhailin Muchtar dan sejumlah pejabat di daerah meninjau pembangunan infrastruktur fisik yang masih dalam tahap penyelesaian. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Gagasan tersebut seperti halnya sederhana, namun sebenarnya suatu gerakan besar yang perlu perencanaan yang matang dan cermat. Perlu kekompakan dalam penanganan antar instansi dan yang lebih penting perlu disiplin dengan memberikan contoh dari atas.

Gerakan menyumbang lima ratus (GB500) misalnya perlu ada organisasinya atau badan yang menangani seperti Gebu Minang yang berhasil menghimpun dana sehingga mampu mendirikan beberapa puluh BPR (Bank Perkreditan Rakyat) di Sumatera Barat.

Penertiban angkutan truk batubara yang terlihat ketika itu masih seperti kucing-kucingan, memerlukan koordinasi yang baik antar instansi termasuk dalam pengambilan tindakan. Tidak kalah pentingnya ketika itu, bagaimana mencari jalan keluar, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Diingatkan Gusti Hasan Aman, kepentingan pribadi harus dibuang sejauh-jauhnya. Beliau mengeluarkan kebijakan 1 Januari 2000 yang selain menegakkan aturan perusahaan pertambangan batu bara dan juga pelarangan penggunaan jalan negara untuk angkutan batubara.

Persoalan penertiban *sawmill* liar dan penebangan liar, bukanlah hal yang baru, dan menjadi monopoli provinsi Kalimantan Selatan. Pengalaman pernah menunjukkan ketika menertibkan *sawmill* liar, hasilnya yang terjadi adalah pengangguran besar-besaran hingga pemerintah belum bisa mengatasinya. Itulah sebagian gelintir tantangan yang dihadapi Gubernur Gusti Hasan Aman, dalam memimpin daerah Kalimantan Selatan.



Gambar 76. Gubernur Kalimantan Selatan H. Gusti Hasan Aman, foto bersama para pelajar usai mengikuti upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI di Banjarmasin. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Apa yang menjadi tantangan tersebut, seolah merujuk pada beberapa pengalaman pribadi ketika Gusti Hasan Aman yakni bergabung dan memimpin HMI Yogyakarta, SKDN Banjarmasin, Ketua KAGAMA Kalimantan Selatan, Ketua IPHI Kalimantan Selatan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Kalimantan Selatan, menjadi Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Kalimantan Selatan yang dalam beberapa periode berhasil mendapatkan medali emas.

Di masa pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Hasan Aman bersama pasangannya Bachtiar Murad yang juga dikenal sebagai seorang militer, sudah memikirkan ingin mengembangkan program pembangunan wilayah metropolitan di benua Banjar. yang akhirnya dijuluki "Banjarbakula". Kawasan Banjarbakula itu sendiri, kini meliputi Banjarmasin – Banjarbaru – Banjar – Barito Kuala – Tanah Laut. Sekarang sebagian langkah-langkahnya sudah mulai terwujud, terutama dalam hal memenuhi kepentingan



transportasi publik. Diketahui ini ide yang satu ini asalnya memang bersumber dari program pemerintah pusat, melalui Peraturan Presiden.



Gambar 77. Berjabat tangan dengan Mendagri RI, Jenderal TNI Rudini. Sumber: koleksi keluarga H. Gusti Hasan Aman.

Selama menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan banyak pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilakukan. Salah satu prasarana yang strategis adalah pembangunan Jembatan Margasari sepanjang 275 meter yang menghubungkan Kecamatan Candi Laras Utara dan Kecamatan Candi Laras Selatan.

Pada masa jabatan Gusti Hasan Aman juga dibangun infrastruktur yang bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang antara lain adalah pembangunan Jembatan Merdeka, pembangunan Jembatan Basirih, dan pembangunan Jembatan Banua Anyar. Di masa beliau, Jembatan Barito sebagai proyek Pusat diresmikan Presiden Soeharto (23 April 1997) dan meraih Rekor MURI sebagai Jembatan Gantung terpanjang di Indonesia saat itu.

H. Gusti Hasan Aman juga melanjutkan perintisan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Rektor UGM. Saat itu beliau selaku Ketua KAGAMA Kalimantan Selatan dan selaku Wakil Ketua KAGAMA Pusat.

Dalam dunia politik, H. Gusti Hasan Aman telah merintis benih reformasi demokratisasi pemilihan kepala daerah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD kabupaten tanpa intervensi apapun dalam prosesnya. Kepala daerah yang terpilih dengan mekanisme itu antara lain Bupati Barito Kuala, Bupati Tabalong, Bupati Hulu Sungai Utara dan Bupati Tapin.

Gusti Hasan Aman sangat peduli dengan perlindungan masyarakat terutama generasi muda dari ancaman miras. Beliau mengeluarkan Perda Kalsel No. 1/2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol.



Gambar 78. Bersama Presiden Pertama RI, Soeharto. Sumber: koleksi keluarga H. Gusti Hasan Aman.

Selama kariernya dalam pemerintahan sampai kemudian menjabat gubernur, banyak penghargaan yang diterima oleh H. Gusti Hasan Aman, diantaranya: Penghargaan Sebagai Warga Kehormatan dari Kantor Walikota Harrisburg Pennsylvania 1989; Tanda Penghargaan berupa Lencana dan Piagam Ksatria Bakti Husada Kartika dari Menteri Kesehatan tahun 1995; Piagam Pernyataan Terima Kasih dari Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia Kalimantan Selatan tahun 1995; Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia tahun 1997; Penghargaan Adimanggala Karya dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tahun 1997; Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat tahun 2000; Bapak Tani dan Nelayan Kalimantan Selatan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan Kalimantan Selatan tahun 2000, Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2000; Penghargaan dari Pengurus Daerah Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Propinsi Kalimantan Selatan Periode 1996-2000 tahun 2000; Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2000.

### **Gejolak Pasca Reformasi 1998**

H. Gusti Hasan Aman menduduki jabatan gubernur di tengah situasi pergolakan politik sebelum dan pasca reformasi 1998, yaitu jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto dan naiknya B.J. Habibie yang membuka kran demokratisasi.

Di masa jabatannya ada peristiwa memilukan yang terjadi di Banjarmasin yaitu peristiwa berdarah Jum'at Kelabu 23 Mei 1997. Awal kerusuhan bermula pukul 13.15 Wita sesaat umat muslim sedang menjalankan salat Jumat, seorang warga dengan menggunakan kostum OPP,

menjalankan motornya dan dianggap mengganggu ketenteraman umat yang lagi salat. Dengan kejadian itu, spontan saja umat yang habis salat Jumat langsung mengeroyok warga berbaju OPP sehingga babak belur, kemudian disusul dengan munculnya massa membakar ban mobil, serta meneriakkan yel-yel, serta diiringi dengan melempari batu ke arah Junjung Buih Plaza. Pukul 14.00 Wita Junjung Buih Plaza hancur di bagian timur (Lippo Bank). Massa di depan Masjid Noor nampak membakar ban motor dan terus bergerak ke jalan Lambung Mangkurat, namun diblokir pasukan huru-hara. Amukan massa meluas merusak dan membakar bangunan pemerintah, hotel, pusat perbelanjaan, bank, bioskop, rumah, mobil, motor dan lainnya. Korban berjatuhan sebagian besar tewas terbakar sebanyak 131 orang, di samping ratusan korban luka-luka bakar yang dirawat di rumah sakit.



Gambar 79. Dengan Presiden ketiga RI, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, pada saat pembukaan seminar 23 Maret 1999 . Sumber: koleksi keluarga H. Gusti Hasan Aman.

Guna mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban, Gubernur Gusti Hasan Aman bersama unsur Muspida, dan aparat keamanan aktif melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan sukubangsa khususnya di Kota Banjarmasin agar peristiwa yang memilukan itu tidak terulang lagi.

Mengutip leafleat “H. Gusti Hasan Aman Biografi Gubernur Kalsel 1995-2000”, dukungan terhadap otonomi daerah sesuai UU No.22 tahun 1999 diraih dengan keberhasilan melahirkan Kota Banjarbaru dari asalnya Kota Administratif menjadi Kota Banjarbaru. Dengan itu maka gagasan para pendahulu untuk menjadikan Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi menjadi semakin terbuka.

Selaras era keterbukaan pasca gerakan reformasi 1998, Gusti Hasan Aman adalah sosok yang peduli dengan perkembangan pers. Di masa kepemimpinannya, berbagai kantor berita dan media pers tumbuh dengan pesat, diantaranya hadirnya Studio Mini TVRI Banjarmasin (1998) dan pembangunan TVRI Produksi Banjarmasin (1999).

## **Akhir Hayat**

Setelah tidak lagi menjabat gubernur, tidak banyak kegiatan menonjol yang dilakukan Gusti Hasan Aman. Beliau lebih banyak menghabiskan masa tuanya bersama keluarga, beramal soleh dan beribadah mendekatkan diri kepada sang Pencipta.



Gambar 80. H. Gusti Hasan Aman bersama K.H. Zaini Abdul Ghani (Guru Sekumpul)

Bagaimana kesan sang isteri terhadap H. Gusti Hasan Aman? “Bapak orangnya jujur, disiplin dan sederhana. Sangat menyayangi keluarga. Sebagai seorang pimpinan sangat mengayomi dan melindungi bawahan. Selalu tepat waktu dalam segala kegiatan termasuk dalam rutinitas sehari hari. Sebagai salah satu contoh pengalaman pada saat acara yang seharusnya undangan jam 16.00 sedangkan beliau sudah berhadir jam 15.30 sampai saya nyeletuk kita ini tamu atau panitia?” kenang ibu Hj. Siti Farida Hasan Aman.

Besan Gubernur M. Said ini meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004 di Jakarta, dan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Banjarbaru. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman di Banjarmasin.



Gambar 81. Gusti Hasan Aman bersama isteri, Hj. Siti Farida. Sumber: koleksi keluarga H. Gusti Hasan Aman.



**M. SJACHRIEL DARHAM**  
GUBERNUR KDH TK.I KALIMANTAN SELATAN  
(2000 - MARET 2005)



Nama lengkapnya adalah ANANG MUHAMMAD SJACHRIEL BIN ANANG DARHAM, kemudian lebih dikenal dengan Drs. H.M Sjachriel Darham, lahir di Amuntai HSU 3 April 1945. Beliau bermarga “Anang”, jadi masih ada garis keturunan dengan para bangsawan Kesultanan Banjar. Memang di Amuntai Hulu Sungai Utara daerah asal almarhum, banyak Gusti, Antung, Anang, dan Andin.

Ayah Sjachriel Darham yaitu Anang Darham seorang guru SD di masanya. Keluarga beliau dahulu tinggal di Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah, dekat pusat kota Amuntai. H. M. Sjachriel Darham hidup dalam keluarga guru yang sederhana dan taat beragama. Belakangan Allah SWT menakdirkan kedua orang tuanya, yaitu H. Anang Darham dan Hj. Ratna serta adik bungsunya Hj. Fatimah meninggal dalam kecelakaan pesawat di Kolombo tahun 1978, sepulang dari menunaikan ibadah haji dan dimakamkan di Taman Makam Syuhada Haji Banjarbaru bersama ratusan syuhada lainnya. “Ini adalah musibah paling berat yang saya alami bersama keluarga, tapi saya ikhlas menerimanya”, ujar Sjachriel Darham saat itu.



Gambar 82. H.M. Sjachriel Darham mendampingi Mendagri dan Otonomi Daerah, Soerjadi Soedirdja saat kunjungan ke Kalimantan Selatan. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Setelah di Amuntai, keluarga Sjachriel Darham selanjutnya pindah ke Banjarmasin, tinggal di Sungai Baru, Kelayan, kemudian di Bukit Raya, di sebuah rumah dinas guru yang kecil. Sempat terkumpul dengan alm KH. Hasan Basri (Ketua MUI Pusat). Di kota ini Sjachriel menyelesaikan pendidikan SRN Nagasari (1958), SMPN 1 (1961) dan SMEAN 1 Mulawarman (1964). Selanjutnya Sjachriel yang tertarik mendalami bidang ekonomi keuangan, kuliah ke Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jakarta. Ia dikirim sebagai mahasiswa tugas belajar oleh Pemda Tk.I Provinsi Kalimantan Selatan.

Saat itu Dr. KH. Idham Chalid, tokoh Banjar yang ada di ibukota sangat memperhatikan kalau ada putra daerah yang berbakat untuk dikembangkan potensinya. Berbekal secarik nota dari Idham Chalid, Sjachriel langsung menghadap Mohammad Hasan, yang kala itu menjadi Menteri Urusan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Pengalaman tersebut cukup berkesan bagi Sjachriel sebab di usia baru 19 tahun sudah menghadap menteri di Jakarta dan hal itu semakin memacu semangat dan cita-citanya untuk belajar (Barjije B, 2015).



Gambar 83. H.M. Sjachriel Darham bersama staf ketika meninjau proyek di lapangan. Sumber: buku H.M. Sjachriel Darham.

Sambil menjalani perkuliahan, Idham Chalid kembali mengirim telex kepada Gubernur Kalimantan Selatan saat itu H. Aberani Sulaiman, untuk mengangkat Sjachriel sebagai pegawai pemerintah daerah, karena pendidikan yang dijalannya mengharuskannya berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar (Ikatan Dinas). Sjachriel pun diangkat sebagai pegawai negeri sampai menyelesaikan perkuliahan. Di Jakarta Sjachriel tinggal di asrama mahasiswa Banjar/Kalimantan Selatan, sebelumnya kamar tersebut ditempati Kustan Basri yang baru menyelesaikan kuliah di FE-UI dan memutuskan pulang ke Kalimantan Selatan awal 1965. Menurut Pak Kustan, Sjachriel rela menunggu kamar asrama itu kosong guna menghemat biaya saat kuliah di Jakarta. Sepulang tugas belajar, pangkat dan jabatan Sjachriel langsung disesuaikan. Tak lama kemudian, 1974, Sjachriel menikahi Hj. Herlinawati binti H. Utuh Darham, seorang pengusaha Kalimantan Selatan yang sangat terkenal saat itu. Jadi, Sjachriel punya nama ayah kandung dan ayah mertua yang sama-sama ujunghnya, yaitu Darham (Barjie B., ed., 2020).



Gambar 84. H.M. Sjachriel Darham saat berdialog dengan masyarakat. buku H.M. Sjachriel Darham.

Sejumlah posisi penting diduduki Sjachriel dalam usia masih muda, di antaranya:

1. Kepala Bagian Pendapatan Pemda Kalimantan Selatan;
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan;
3. Ketua Bappeda Kalimantan Selatan;
4. Kepala BKPM Kalimantan Selatan;
5. Kepala Inspektorat Kalimantan Selatan;
6. Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Asisten III Bidang Kesra dan sebagainya.

Diklat Kepemimpinan pun diraihinya dalam usia muda seperti Sespa dan Lemhannas, dan tercatat sebagai peserta dan lulusan termuda. Selama menjalani karir banyak negara dikunjungi, di antaranya Korea dan Jepang, Australia dan New Zealand, Inggris, Jerman dan Amerika, Singapura dan Malaysia, India dan sebagainya. Kunjungan ke korea selatan dilakukannya tahun 1976 saat ia baru berusia 31 tahun, selama 1 bulan di sana yang dibiayai oleh Kodeco untuk melakukan peninjauan. Pada tahun 1978, ia melakukan Comparative Study ke negara-negara anggota ASEAN dan Jepang selama 1 bulan yang dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri. Seminar tentang Keuangan Daerah juga diikutinya di Australia dan New Zealand tahun 1981. Selanjutnya ia mengikuti studi pemerintahan di Inggris tahun 1989, Widya wisata Lemhannas ke Malaysia dan Australia tahun 1990, program Local Government and Development Study di Pitsburg University 1991, Temu Karya Pembangunan TKW sektor informal di India, Konferensi Environmexasia/ Watermexasia di Singapura 1993 dan mengikuti Training Course Technic and Method Environment di Berlin Jerman tahun 1995. Semua itu semakin memperluas wawasannya tentang keuangan, pembangunan dan berbagai hal terkait dengan pemerintahan.



Gambar 85. Gubernur H.M. Sjachriel Darham atas nama Presiden RI di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin menyerahkan Anugerah Satya Lencana Karyasetya kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat

Sjachriel Darham senang berorganisasi sejak muda. Di antara organisasi yang pernah dilakoninya adalah Ketua Harian Wanhat KNPI Kalimantan Selatan, Pembina Pemuda Pancasila, Ketua KI Hasanuddin Laskar Ampera Arief Rahman Hakim, Ketua PMKS Jakarta dan Ketua Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Jakarta. Selain itu sebagai Ketua Biro Ketenagaan Lembaga Studi Pengembangan Wilayah, Anggota Dewan Penasihat ICMI Kalimantan Selatan, Wakil Ketua KAHMI Kalimantan Selatan, Ketua Yayasan Pesantren Rakha Amuntai. Di bidang Olahraga Ketua Pembina Inkai, Ketua Persatuan Kempo Indonesia Kalimantan Selatan, Pengurus Daerah Percasi Kalimantan Selatan, Ketua Harian KONI, Pengda IPSI dan IMI Pengda Kalimantan Selatan. Di bidang

pendidikan Yayasan Swadaya SMEA, Yayasan Pemuda SMP KNPI, Yayasan Bur Anwar (SMA), Anggota Dewan Penyantun Institut Ilmu Administrasi Bina Banua, Anggota Dewan Kurator Universitas Islam Kalimantan, dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin.



Gambar 86. Gubernur H.M. Sjachriel Darham dan isteri berinteraksi dengan warga. Sumber: buku H.M. Sjachriel Darham.

Sebelum dan sesudah menjadi Gubernur, Sjachriel Darham juga sering memfasilitasi kegiatan ilmiah seperti seminar dan sejenisnya. Di masanya didirikan Yayasan Abdi Persada yang dulu bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana pembangunan tempat-tempat ibadah agar jangan lagi *bapintaan* di jalanan, hal ini sesuai dengan pesan Guru Sekumpul yang disampaikan saat awal Sjachriel Darham menjabat Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2000.

## Kaya Prestasi

Sjachriel Darham seorang tokoh fenomenal Kalimantan Selatan yang kaya prestasi sejak masa muda. Sejak muda dan setelah padat dengan kesibukan jabatan ternyata Sjachriel tetap aktif dalam berbagai organisasi, baik kepemudaan, kemahasiswaan, kepramukaan, kependidikan, keagamaan, sosial dan sebagainya. Lebih 30-an organisasi pernah ditanganinya. Semua dapat dijalankan dengan baik dan penuh pengabdian, karena Sjachriel senang berorganisasi dan bergaul dengan siapa saja.

Berbekal banyak pengetahuan, keahlian dan pengalaman jabatan yang matang, tidak heran Sjachriel Darham terpilih dan dipercaya menjadi Gubernur Kalimantan Selatan periode 2000-2005, berpasangan dengan H Husin Kasah (alm). Saat itu pemilihan gubernur masih melalui DPRD I Kalimantan Selatan. Para calon yang berkompetisi terdiri dari Ismet Ahmad berpasangan dengan Thamrin Anward, Sjachriel Darham - Husin Kasah, Knach Noor Ajie - Bahrudin Syarkawi, dan Syamsul Muarif - Syarifuddin Basri.

Banyak hasil pembangunan, fisik atau pun non fisik, yang dapat dinikmati masyarakat dalam masa jabatan Sjachriel Darham, sebelum maupun ketika menjadi gubernur. Pembangunan ruang VIP RSUD Ulin, apron, dan landasan pacu Bandara Syamsuddin Noor, pengembangan bandara Syamsuddin Noor menjadi Embarkasi Haji tahun 2003, Gedung IQRA Mahligai Alquran, pengerukan Ambang Barito, peningkatan kelas RSUD Ulin tipe A dan pendidikan, dan lain sebagainya.

Dalam hal pengembangan prasarana jalan, pada masa kepemimpinannya telah dibangun jalan Kandungan-Batulicin, jalan Lingkar Utara (kini Jalan Gubernur Sarkawi), jalan Lingkar Selatan (kini Jalan Gubernur Subardjo), dan jalan

Lingkar Dalam Banjarmasin (kini Jalan Pangeran Hidayatullah), jalan Awayan-Ninian dan Awayan-Batu Mandi-Barabai (Anonim. 2004).



Gambar 87. Proyek jalan dan jembatan yang dibangun di era Gubernur H.M. Sjachriel Darham. Sumber: buku H.M. Sjachriel Darham.



Tidak ketinggalan jasanya di bidang pengembangan pembelajaran Alquran, karena di masa jabatan beliau, Pemrov Kalimantan Selatan bersama DPRD berhasil menggelontorkan dana APBD miliaran rupiah untuk membantu pembangunan Gedung Mahligai Alquran. Gedung ini dibangun di atas tanah yang dibeli dari KH. Idham Chalid yang semula adalah hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di masa Gubernur H.M. Said kepada ulama politik Banjar di kancah nasional itu. Menurut Ust. Chairani Idris, Sjachriel Darham bersama Ibu Herlinawati Darham sangat perhatian dan besar kontribusinya terhadap pengembangan pembelajaran Alquran khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda (Barjie B., 2015).



Gambar 88. Gedung Mahligai Alquran. Dibangun pada masa Syachriel Darham. Sumber: koleksi Ahmad Barjie B.

Kebijakan lain yang patut diingat dari Sjachriel Darham adalah ketika mengeluarkan kebijakan menutup arena judi

berupa adu ketangkasan bingo sehingga Kalimantan Selatan merupakan provinsi satu-satunya yang bebas bingo (Anonim. 2004).

Pada masa kepemimpinannya, pada tahun 2001 provinsi tetangga (Kalbar dan Kalteng) terjadi konflik antar etnis. Namun konflik tersebut tidak menjangar ke Kalimantan Selatan, karena Sjachriel Darham dengan sigap mengeluarkan kebijakan konkrit sebagai langkah antisipasi dan rekonsiliasi seperti membantu pengungsi asal Madura menggunakan Pelabuhan Trisakti untuk kembali ke Pulau Madura (Jawa Timur), fasilitas penampungan, makanan, obat-obatan, dan perlindungan keamanan, juga memprakarsai pertemuan berbagai paguyuban etnis di Kalimantan Selatan untuk menciptakan iklim kondusif, aktif melakukan upaya pertemuan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tokoh-tokoh Madura di Gedung Grahadi 1-3 Maret 2001, serta sebagai penggagas dan peserta aktif Musyawarah Damai Bumi Kalimantan dalam merespon konflik etnis di Kalbar dan Kalteng diselenggarakan di Jakarta, 22 Maret 2003 (Anonim. 2004).



Gambar 89. H.M. Sjachriel Darham dalam momen panen jagung. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Sjachriel Darham adalah orang yang berjasa besar memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk menjadi kabupaten, sebuah aspirasi yang sudah dipendam berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Kala itu Syachriel mengangkat Zairullah Azhar sebagai Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Tanah Bumbu. Sedangkan jabatan yang sama diberikan jabatan yang sama untuk Balangan diberikan kepada Drs. H. Muhammad Arsyad, saat itu menjadi Asisten III Sekretariat Daerah. Kalau di Kabupaten Hulu Sungai Utara Bupati Suhailin Muchtar rela melepas Balangan, berbeda dengan Tanah Bumbu, Bupati Syachrani Mataya tidak mau melepasnya. Tetapi Sjachriel Darham dengan kekuatan lobi dan jaringan politik bisa menggoalkan Kabupaten Tanah Bumbu (Makkie dan Kamarul Hidayat, 2007).



Gambar 90. Gubernur Sjachriel Darham memimpin rombongan Tanah Bumbu dan Balangan menghadap Mendagri Hari Sabarno di Jakarta menyampaikan usul pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat



Gambar 91. Ketua PPKB Syachrani Ahing bersama Teras Narang, H. Baderani, H. Jayadi Hasan saat di Gedung DPR RI. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat



Gambar 92. Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan (PPKB) saat foto bersama di Gedung MPR RI Jakarta. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat

Akhirnya pada tanggal 27 Januari 2003 dilangsungkan Sidang Paripurna DPR-RI untuk membahas pembentukan dan pemekaran kabupaten, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Undang-Undang ini kemudian dikukuhkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan berlaku sejak 25 Februari 2003.



Gambar 93. H.M. Sjachriel Darham bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X.  
Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Di mata Zairullah, Sjachriel Darham betul-betul *all-out* dan berjasa mendukung terwujud pemekaran ini. Dan satu lagi, Anton Gunadi, telah meminjamkan uang Rp. 800.000.000,- kala itu, jumlah yang tidak sedikit, yang ternyata kemudian dihibahkan beliau, sebagai biaya operasional memperjuangkan Tanah Bumbu.

Sjachriel Darham terkenal sebagai orang yang "*baik*" dengan semua orang; atasan, sesama, bawahan, juga dengan

masyarakat umum. Seperti kesan Ketua MUI Kalimantan Selatan H Ahmad Makkie yang lebih senior, Sjachriel Darham suka memuji dan menghargai posisi orang. LK3 Banjarmasin pernah meminta penulis menyampaikan makalah perihal masalah “bapintaan di jalanan untuk membangun masjid” di Hotel Iranugraha Banjarmasin, kala itu Pak Sjachriel belum menjadi gubernur, beliau memfasilitasi dan sangat memperhatikan tema bahasan. Belakangan, setelah menjadi gubernur, dan sesuai dengan pesan Guru Sekumpul KH. Zaini Abdul Ghani, masalah ini pun beliau perhatikan dan dicarikan solusinya melalui Yayasan Abdi Persada.

Sjachriel seorang yang suka memberi dan meminta maaf, bahkan hingga ujung usia. Meskipun di masa pemerintahannya sempat terjadi dinamika politik yang cukup panas, namun seiring dengan perjalanan waktu semua dapat diselesaikan dan dicairkan. Ini menjadi pengalaman berharga bagi berbagai pihak. Dengan para tokoh seperti Aliansyah Effendi (Haji Acut alm.), kita melihat beliau saling bersangkulan dalam suasana haru. Kita juga saksikan Pak Sjachriel selalu mengusahakan hadir setiap ada undangan atau hajatan, atau ada kolega yang meninggal dunia, meskipun harus duduk di kursi roda dengan didampingi istrinya yang setia. Misalnya ketika beliau bertakziah saat meninggalnya KH. Ahmad Bakeri Februari 2013, atau ketika menghadiri ulang tahun Pangeran H. Rusdi Effendi 8 Mei 2013, orang selalu merubung, menghormati, menyalami dan mencium tangannya. Dengan kehangatan dan kerendahan hati itu tak heran orang tetap menghormatinya.



Gambar 94. H.M. Sjachriel Darham saat melantik Walikota Banjarmasin, Sofyan Arpan. Sumber: koleksi H. Kamarul Hidayat.

Drs. H.M. Sjachriel Darham, Gubernur Kalimantan Selatan periode 2000-2005 meninggal dunia di RS Suaka Insan Banjarmasin Rabu 7 Mei dan dimakamkan di alkah Kerukunan Warga Amuntai Banjar (KWAB) Landasan Ulin Banjarbaru, Kamis 8 Mei 2014. Sjachriel Darham meninggal di usia 69 tahun, meninggalkan seorang istri Hj. Herlinawati Darham dan tiga orang anak; H. M. Herlan Ariesyah Putra, Hj. Ira Erlianti Putri dan H. M. Tri Nugraha Ariesyah Putra. Sejumlah tokoh, pejabat, ulama dan warga masyarakat baik dari Banjarmasin, Hulu Sungai, Kalteng, Jakarta dan sebagainya berdatangan, memberikan doa, simpati dan penghormatan pada almarhum dan keluarga. Kembali mengutip karya H. Kamarul Hidayat dan H. Ahmad Makkie dalam buku "Apa & Siapa dari Utara", mantan gubernur Kalimantan Selatan ini terkadang memang kontroversial, tapi banyak orang mengakui bahwa ia adalah anak banua yang dibanggakan. Menurut Rudy Ariffin saat memimpin upacara

resmi pemakaman, Sjachriel Darham adalah seorang pekerja keras dan inspirator pembangunan di daerah.



Gambar 95. H.M. Sjachriel Darham bersama keluarga. Sumber: buku H.M. Sjachriel Darham.





**RUDY ARIFFIN**  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**(2005 -2015)**

Drs. H. RUDY ARIFFIN, M.M. adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dari 2005 hingga 2015. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Bupati Banjar dari 1999 hingga 2005. Saat peralihan dari Gubernur H. Sjachriel Darham ke Gubernur H. Rudy Ariffin, pimpinan pemerintahan dipegang oleh pejabat sementara Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Drs. H. Tursandi Alwi, M.M. seorang birokrat dan politikus Indonesia yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Wakil Presiden Indonesia dan sebagai pejabat gubernur di daerah lainnya.

## Pendidikan

Mengutip tulisan H. Kamarul Hidayat, “Apa & Siapa dari Bumi Murakata”, Rudy Ariffin adalah Urang Barabai kelahiran Banjarmasin pada 17 Agustus 1952 Ayahnya bernama H. Bakhrun Arifin seorang guru dan ibunya bernama Hj. Puspa Ningrat. Pendidikannya dimulai di Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun di Barabai tamat tahun 1964. Tahun 1968, lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri di Banjarmasin. Tahun 1971, lulus Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri di Banjarmasin. Tahun 1975, lulus sarjana muda Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Banjarbaru. Tahun 1980, lulus sarjana Fakultas Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, dan tahun 2002, lulus pasca sarjana Jurusan Manajemen.



Gambar 96. H. Rudy Ariffin bersama isteri, Ir. Hj. Hayatun Fardah. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

Karir di pemerintahan dimulai saat menjabat sebagai MPP Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 1979-1982. Selanjutnya, menjabat sebagai Pd. Selaputda Banjarbaru selama satu tahun. Perlahan namun pasti, karir Rudy mulai merangkak naik. Berbagai jabatan di dunia politik pernah ia duduki hingga ia duduk melenggang di kursi Gubernur Kalimantan Selatan.

Rudy Ariffin dikaruniai tiga orang putra-puteri, yakni Hj. Adistyia Dewi Ariffin, SE, H.M. Aditya Mufti Ariffin (kini Walikota Banjarbaru), dan Setya Persada Ariffin (alumni Akademi Militer Magelang).

## Karier Birokrasi

Setelah diangkat menjadi pegawai bulanan (1 November 1975), ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat. Namun sebelum kelulusan, ia diangkat sebagai Mantri Pamong Praja di Kecamatan Sungai Tabuk, 1979-

1981. Setelah itu Rudy diperbantukan pada Selaputda Banjarbaru, 1981-1982. Jabatan struktural pertama yang dipangkunya adalah sebagai Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan BP7 Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, 1982-1983. Kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Administrasi Pendidikan BP7 Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, 1983-1985. Berikutnya selama lima tahun, Rudy menjabat sebagai Kepala Bidang Pengajaran Diklat Provinsi Kalimantan Selatan, 1985-1990.



Gambar 97. H. Rudy Ariffin saat menerima lencana penghargaan. Sumber: buku 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan.

Rudy Ariffin yang dikenal kalem dan tenang ini, antara tahun 1990-1991 dipercaya menjadi Kepala Bidang Pembangunan pada Kantor Pembantu Gubernur Wilayah I di Banjarbaru. Sesudah itu, ia kembali bekerja di Diklat Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kepala Bidang Penjenjangan, tahun 1991-1993. Ia juga pernah dipercaya menduduki

jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, 1993-1996. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, 1996-1997. Sesudah itu, karirnya melejit menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Banjar, 1997-2000. Jabatan Bupati Banjar dipangkunya tahun 2000-2005. Pada tahun 2000 ia sudah mengajukan pensiun dipercepat dengan pangka terakhir Pembina Utama Muda (IV/c).



Gambar 98. H. Rudy Ariffin dalam keseharian. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

Puncak karirnya adalah sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak tanggal 5 Agustus 2005 yang ia jalani selama dua kali hasil pemilihan (10 tahun). Lima tahun jabatan pertama (2005-2010), ia berpasangan dengan H. Rosehan NB, dan lima tahun jabatan kedua (2011-2015) berpasangan

dengan H. Rudy Resnawan. Ia menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dengan PPP sebagai kendaraan politiknya. Di PPP ia menjabat sebagai Ketua DPW Kalimantan Selatan.



Gambar 99. Rudy Ariffin bersama anak-anak Pramuka. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

Berbagai kegiatan pelatihan yang pernah diikuti Rudy Ariffin antara lain Indasmil di Rindam X Lambung Mangkurat, 1972. MPP Prajaksa di Banjarmasin, 1977. Penataran P4 Tipe B di Martapura, 1978. Training of Trainer Umum Departemen Dalam Negeri di Jakarta, 1981. Penataran Calon Penatar P4 di Banjarmasin, 1983. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya di Yogyakarta, 1988. Penataran

Pengawasan Melekat di Banjarmasin, 1989. Penataran Peradilan Tata Usaha Negara di Banjarmasin, 1989. Pendidikan Komputer di Banjarmasin, 1991. *Training of Trainer* Sistem Manajemen Proyek di Jakarta, 1992. Penataran Kewaspadaan Nasional di Jakarta, 1992. Orientasi Hukum Pegawai Negeri Sipil di Banjarmasin, 1995. Orientasi Keuangan, pendapatan & Perpajakan Negara Asean di Singapura, Malaysia, Thailand, 1995. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah di Jakarta, 1996. Kursus Pendapatan Daerah Tipe A di Jakarta, 1997. Kursus Singkat Khusus Angkatan II Lemhanas di Jakarta, 2001.



Gambar 100. Rudy Ariffin bersama pimpinan perusahaan EG Group. Sumber: Buku 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan.

Selain itu, suami dari Ir. Hj. Hayatun Fardah ini menerima berbagai tanda jasa dan penghargaan antara lain dari Kepala BKKBN Pusat berupa Manggala Karya Kencana, 2002. Satya Lencana Pembangunan dari Presiden Republik

Indonesia, 2002. Satya Lencana Pembangunan Pertanian, dari Presiden Republik Indonesia, 2003. Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, 2004. Peniti Emas Abdi Bhakti Tani & Nelayan dari KTNA Nasional, 2004. Penghargaan Bupati Peduli Hutan dari Presiden Republik Indonesia, 2004. Tokoh Pelopor Pembinaan Remaja Masjid Indonesia dari Presiden Republik Indonesia (Depag), 2005.



Gambar 101. Rudy Ariffin bersama Gusti Rusdi Effendi, Pimpinan Umum SK Banjarmasin Post Grup. Sumber: Buku 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan.

Dalam masa kepemimpinannya sebagai Bupati Banjar, ia telah berusaha keras membangun daerah ini. Salah satu karya monumentalnya yang mendapat pujian warga Kabupaten Banjar ialah pemugaran Masjid Agung Al Karomah Martapura dan dalam awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan ia berhasil menyelesaikan



pembangunan siring sungai Martapura yang telah lama terkatung-katung.



Gambar 102. H. Rudy Ariffin dikenal umara yang dekat dengan ulama. Sumber: Buku 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan.

Rudy Ariffin adalah umara yang dekat dengan ulama. Saat menjabat Bupati Banjar dia seringkali mengikuti pengajian berbaur bersama masyarakat. Ia diangkat sebagai anak angkat oleh ulama kharismatik, Guru Zaini Abdul Ghani (Guru Sekumpul).

Selama karirnya ia sempat melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka tugas kedinasan antara lain ke Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, Belanda, dan Jepang. Sedangkan ke Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Rudy yang dikenal suka bergaul itu, pada waktu kuliah di Universitas Lambung Mangkurat, sempat menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa. 1978-1980. Disamping itu dalam bidang keolahragaan pernah menjadi Ketua FORKI, 1998-sekarang,

Ketua Umum DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah seorang yang merintis terbentuknya organisasi KBB (Kerukunan Bubuhan Banjar) Sedunia, sebuah organisasi yang bertujuan mempererat silaturahmi, komunikasi dan pemberdayaan masyarakat banjar di Banua dan juga di perantauan.



Gambar 103. H . Rudy Ariffin di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) yang dibangun di masa jabatannya sebagai gubernur. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

## Capaian Prestasi

Selama 10 tahun menjabat Gubernur Kalimantan Selatan, banyak prestasi yang ditorehkan oleh Rudy Ariffin melalui berbagai pembangun di semua bidang, fisik maupun non fisik, baik yang dilakukan dengan cara menyempurnakan hasil pembangunan gubernur terdahulu maupun pembangunan baru. Diantara bangunan fisik yang bisa dirasakan sampai sekarang antara lain adalah pembangunan Rumah Sakit Gigi Hasan Aman, pelarangan resmi jalan umum dari Anggota batubara dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008, memberikan bantuan pembangunan Gedung Pascasarjana

Universitas Lambung Mangkurat, perbaikan perbaikan Jalan trans Kalimantan yang rusak, pembangunan SMA Banua [misi semula dibangun seperti SMA Taruna Nusantara], pembangunan Pusat Perkantoran Gubernur di Banjarbaru, pendirian Fakultas Kedokteran Unlam.



Gambar 104. Rudy Ariffin bersama Bupati Tanah Bumbu saat peresmian selesainya proyek pembangunan. Sumber: Buku 2 Tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan.

Capaian lainnya diantaranya menuntaskan pengerukan alur ambang sungai Barito, mendorong PLN membangun PLTU 2 x 65 Megawatt di Asam-asam untuk mengatasi byar pet listrik di wilayah Kalselteng, membangun industri besi baja, dan berhasil membawa APBD Kalimantan Selatan menembus angka RP. 2,2 Triliun.

Ada hal yang dirasa paling menggembirakan bagi masyarakat adalah melarang truk batubara melintasi jalan negara sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus

Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. Dengan perda ini, perusahaan batubara diwajibkan juga membangun jalan sendiri.



Gambar 105. Gubernur H . Rudy Ariffin saat pada saat pemancangan tiang proyek pembangunan. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

## Perpindahan Perkantoran ke Banjarbaru

Rudy Ariffin adalah gubernur yang merealisasikan perpindahan perkantoran pemerintah provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru yang sejak lama sudah dirintis oleh Gubernur M. Moerdjani dan R.T.A. Milono.

Dalam Visi dan Misi Gubernur terpilih 2005-2010 (Drs. H. Rudy Ariffin) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2005 tentang RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2006-2010 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2006-2010 adalah: Mempersiapkan dan merealisasikan proses pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.



Gambar 106. Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Sumber: Youtube najibnaa

Rencana perpindahan perkantoran pemerintah provinsi merupakan salah satu tahapan untuk rencana perpindahan ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Skenarionya adalah: untuk memindah ibukota maka yang perlu dipindah terlebih dahulu adalah perkantorannya.

Sebagai salah satu pelaksanaan RPJM tersebut risetpun dilakukan. Tanggapan pro dan kontra di kalangan pemerintahan, akademisi, maupun masyarakat luas bermunculan. Berbagai opini di surat kabar yang mengusulkan beberapa lokasi sebagai lokasi perkantoran maupun calon

ibukota provinsi. Namun Rudy Ariffin bergeming dengan rencananya itu, dengan membangun perkantoran di lokasi terpilih: daerah Trikora – Palam - Guntung Upih Kecamatan Banjarbaru Kota.



Gambar 107. Kantor Gubernur di Banjarbaru. Sumber: koleksi Wajidi.

Setelah berbagai perkantoran dibangun, maka para pegawai sekretariat daerah provinsi, dinas, dan badan lingkup pemerintah provinsi kini sudah berkantor di Banjarbaru.

Meski tak lagi menjabat gubernur, perjuangan Rudy Ariffin dan gagasan para gubernur terdahulu tidak terhenti pada perpindahan perkantoran. Pemindehan Ibukota Provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru terus bergulir. Sebagai program legislasi, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah diusulkan pada tanggal 1 September 2021. Kemudian RUU itu disahkan oleh DPR-RI tanggal 15 Februari 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang memuat penempatan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota

Banjarbaru. Pada bab II pasal ke-4 undang-undang tersebut dinyatakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru.



Gambar 108. H. Rudy Ariffin menghadiri Pengukuhan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

Berdasarkan kesaksian Ahmad Arifin, mantan Kabid Perlindungan Masyarakat pada Bakesbang & Linmas, bahwa Gubernur Rudy Ariffin adalah seorang yang sangat peduli terhadap bencana daerah maupun bencana yang berskala nasional misalnya bencana di Aceh dan Yogyakarta. Ketika terjadi bencana Gempa Bumi dan Tsunami meluluhlantakkan Aceh 26 Desember 2004 Rudy Ariffin memerintahkan penggalangan bantuan dari berbagai cara dan sumber yang dikoordinir oleh Bakesbang & Linmas, ditambah dengan bantuan Pemprov. dari Pos Belanja Tak Terduga, di samping membuka dompet kemanusiaan di SKH Banjarmasin Post yang digagas oleh H. Pangeran Gusti Effendi AR sehingga

terkumpul dana keseluruhan bantuan sebesar Rp.1,2 Miliar, selain juga mengirim 50 relawan ke Aceh.



Gambar 109. H. Rudy Ariffin dan H. Anang Ardiansyah pada acara “Batnam Karya Baharum Banua” tahun 2008 di Banjarmasin. Sumber: koleksi keluarga H. Rudy Ariffin.

Pak Rudy Ariffin juga sangat memperhatikan para seniman dan budayawan. Di masa kepemimpinannya, ia memberikan Anugerah Seni kepada Maestro Seni dan Anugerah Budaya kepada para seniman, sastrawan dan budayawan yang konsisten dalam berkarya. Suatu ketika dalam sambutan pada acara “Batnam Karya Baharum Banua” tahun 2008 di Banjarmasin, Rudy Ariffin prihatin dengan budaya Banjar termasuk lagu-lagu Banjar dengan menyebutnya ibarat “batang tarandam” (Santang, 2011).





Gambar 110. Gubernur H. Rudy Ariffin menyerahkan beberapa buku sejarah/budaya lokal kepada Ketua Kerukunan Keluarga Banjar Yogya (Kakabayo) H. Bukhari di Yogyakarta. Sumber: koleksi Wajidi.

Pak Rudy mendorong dilaksanakan berbagai even pentas seni sebagaimana di sebut di atas, membentuk Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan, Festival Budaya Banjar, dan menyelenggarakan Kongres Budaya Banjar yang dihadiri masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan maupun yang berada di perantauan, dalam dan luar negeri.

Selama menjabat sebagai seorang gubernur, Rudy Ariffin juga dipercaya untuk memimpin sejumlah organisasi sosial dan politik. Ia adalah Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Kalimantan Selatan. Pak Rudy Ariffin juga dipercaya sebagai Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) yang pertama, Ketua Umum DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejumlah jabatan lainnya.



Gambar 111. H. Rudy Ariffin yang juga Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) bersama warga tokoh warga Banjar di Palangkaraya. Sumber: koleksi Ahmad Barjie B.



**SAHBIRIN NOOR**  
**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**(2016 - 2025)**

Dr. (H.C.) H. SAHBIRIN NOOR, S.Sos., M.H. lahir di Banjarmasin, tepatnya di kawasan Gagah Lurus Pekauman, tanggal 12 November 1967. Orangtuanya bernama Abdussamad bin H Arifin asal Martapura. Dan ibunya bernama Hj. Noorsyam binti Muilik asal Sungai Andai Banjarmasin. Mereka beralamat di kawasan Sungai Jingah RT 01 Nomor 24 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara. Mengutip tulisan Hatmansyah Ismail dkk. (2014), diketahui bahwa nama Sahbirin diambilkan oleh ibunya dari nama depan Pangdam X Lambung Mangkurat saat itu yaitu Brigjen Sabirin Muchtar. Sedangkan Noor, yang artinya cahaya, diharapkan kehidupan kehidupan Sahbirin Noor dapat menjadi cahaya, yang menerangi dan berguna bagi masyarakat.



Gambar 112. H. Sahbirin Noor selaku Pembina Upacara dalam Apel Gabungan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Sahbirin Noor merupakan keturunan dari salah seorang ulama Banjar. Ayahnya memiliki hubungan keluarga dengan pendiri NU di Kalimantan Selatan dan sekaligus pimpinan

Pondok Pesantren Darussalam Martapura yaitu KH. Abdul Qadir Hasan atau yang lebih dikenal dengan panggilan Guru Tuha. Kakek beliau sebelah ayah yaitu H. Arifin (Pesayangan) bersaudara dengan Fatimah ibunda dari KH. Abdul Qadir Hasan. Sedangkan nenek dari Sahbirin Noor dari pihak ayah, yaitu Sapinah adalah *urang* Tunggul Irang

Orangtua Sahbirin Noor adalah keluarga sederhana. Ayahnya pedagang kecil dan ibunya mengurus rumah tangga. Sahbirin Noor kecil sangat akrab dengan sungai. Semula orangtuanya bermukim di Pekauman, kemudian pindah ke Pasar Lama, dan kemudian pindah lagi ke Sungai Jingah, yang semuanya berdekatan dengan sungai. Baginya berenang dan menyeberangi sungai-sungai sudah biasa.

Karena kemudian orangtuanya bercerai, Sahbirin Noor banyak diasuh oleh ibunya, dan tergantung pada usaha ibunya untuk menafkahi keluarga. Untuk membiayai sekolah ia harus membanting tulang dan bekerja dengan keringat sendiri. Bahkan menjelang masuk SMA, ia tidak punya uang. Ketika itu ada lomba baca puisi dan Sahbirin keluar sebagai juara pertama dengan hadiah *tape recorder*. Hadiah itu ia jual Rp. 22.000.- dan dengan uang itulah ia bisa masuk SMA.

Keterbelakangan ekonomi tidak membuatnya menyerah. Ia tetap belajar dengan penuh semangat, kerja keras, disiplin, bergaul dengan siapa saja, rajin berorganisasi dan selalu berdoa. Ia sangat yakin dengan pertolongan Allah. Sesuai dengan bunyi surah al-Mu'min ayat 60, Allah berfirman: "Berdoalah kepadaKu, niscaya Kuperkenankan doamu". Kedisiplinannya tambah kuat, karena ibunya kawin lagi untuk kedua kalinya dengan anggota TNI Sertu H. Muhammad Aini, yang terakhir berdinasi di Seksi I Kodim 1007 Banjarmasin. Walaupun bukan ayah kandung, Muhammad Aini banyak membentuk kepribadiannya.

Sahbirin Noor menempuh pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Taman Pendidikan Islam (MI TPI) Budi Mulia Sungai Jingah 1982, SMPN 10 Banjarmasin 1985, SMA 5 Banjarmasin 1988, S1 Uniska Muhammad Asyad al-Banjari 1995 dan S2 Universitas Putra Bangsa Surabaya 2005. Dari pernikahannya dengan Hj. Raudatul Jannah, yang berasal dari Teluk Selong Martapura, mereka dikaruniai tiga orang anak, yaitu Sandi Fitriani Noor, Noor Azizah Zaimah dan Noor Azkya Alimma.



Gambar 113. H. Sahbirin Noor (Paman Birin) bersama isteri, Hj. Raudatul Jannah (Acil Odah), saat menghadiri Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Sejak muda sudah senang berorganisasi dan memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Ia menjadi Ketua OSIS SMPN 10, Ketua OSIS SMAN 5, Ketua Remaja Masjid al-Yaqin Sungai Jingah, Ketua BPM FISIP Uniska, Ketua SMPT Uniska, Danyon 604 Menwa Uniska, Kepala Staf Menwa Kalimantan

Selatan, Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua GM FKPPi Kota Banjarmasin, Wakil Sekretaris DPD KNPI Kota Banjarmasin, Ketua Tim Pelayanan Dakwah Kota Banjarmasin, Sekretaris GM FKPPi Kalimantan Selatan, Ketua IPRI Kalimantan Selatan, Ketua DPD KNPI Kalimantan Selatan, Pengurus Sabuk Hitam Dan IV Lemkari Kalimantan Selatan, Pengurus FORKI Kalimantan Selatan, Sekretaris FKDM Kalimantan Selatan, Sekretaris Pemuda Pancasila Kalimantan Selatan, Ketua Yayasan Ponpes Syaikhona Muhammad Chalil Cabang IV Gambut Kalimantan Selatan, Pembina Pengembangan Budaya Tradisional Kalimantan Selatan, Ketua Gema KMKS Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Setelah menjadi gubernur semakin banyak lagi jabatan organisasi yang dipercayakan kepadanya, termasuk organisasi politik sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Selatan.



Gambar 114. H. Sahbirin Noor saat menggunting pita penyerahan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH). Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Riwayat pekerjaan dan jabatannya sebelum menjadi Gubernur Kalimantan Selatan adalah Staf Dinas Kesehatan Banjarmasin Utara, Kasi PMK Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur, Lurah Pemurus Baru Banjarmasin Selatan, Lurah Kelayan Luar Banjarmasin Tengah, Sekretaris Camat Banjarmasin Barat, dan Dirut PT. Jhonlin Sasangga Banua. Perusahaan ini adalah milik Haji Isyam (Andi Syamsuddin Arsyad) yang tak lain adalah keponakan Sahbirin Noor. Haji Isyam memanggil Sabirin Noor Paman Birin. Itu sebabnya kemudian ia lebih dikenal akrab dengan panggilan Paman Birin.

Ia menjabat Gubernur Kalimantan Selatan selama dua periode, sejak 2016. Saat peralihan dari Gubernur H. Rudy Ariffin ke Gubernur H. Sahbirin Noor, pimpinan pemerintahan dipegang oleh penjabat sementara Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Dr. Ir. Tarmizi Abdul Karim, M.Sc. seorang birokrat Indonesia yang berasal dari Aceh.



Gambar 115. Salah satu even hiburan menyambut Hari Kemerdekaan RI.  
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.



Lima tahun pertama ia berpasangan dengan Wakil Gubernur H. Rudy Resnawan, dan lima tahun kedua berpasangan dengan Wakil Gubernur H. Muhidin. Selain pembangunan fisik Sahbirin Noor juga memiliki perhatian terhadap pembangunan nonfisik. Gubernur yang akrab dengan para ulama dan habaib ini dikenal menyukai seni budaya, sejarah, seni baca Alquran, olahraga, dan sebagainya. Di masanya banyak digelar even-even penting bertaraf nasional seperti penyelenggara Hari Pangan Sedunia, MTQ Nasional, Ijtima Ulama MUI, Kongres Budaya Banjar, bahkan Sahbirin menjadi Presiden Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Sedunia, dan lain-lain.

Dengan seringnya Provinsi Kalimantan Selatan menjadi penyelenggara even-even berskala nasional, maka diharapkan ekonomi Kalimantan Selatan menjadi bergerak karena dengan adanya even itu merupakan peluang bagi bisnis perhotelan dan pemasaran produk UMKM selain Kalimantan Selatan semakin dikenal di kancah nasional.



Gambar 116. H. Sahbirin Noor saat pencaanangan gerakan menanam untuk antisipasi dampak elnino. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Paman Birin yang piawai dalam puisi, pantun, mampu berakting dalam drama dan film, ini juga telah menyusun lagu BERGERAK sebagai penyemangat pembangunan di banua. Di masa kepemimpinannya, berhasil dibuat film kolosal Pangeran Antasari, film *biopic* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Dalam mengabdikan kepada masyarakat, Sahbirin Noor menjadikan empat sahabat setia sebagai prinsip pengabdianannya. Pertama, *Si Atun* maksudnya *niatun*, segala yang dilakukan diniatkan secara ikhlas sebagai ibadah kepada Allah swt. Kedua, *Si Rahmat*, tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, berusaha tidak kenal lelah dan *waja sampai kaputing*. Ketiga, *Si Sabar*, selalu bersikap sabar terhadap tantangan dan hambatan, dan *Si Syukri*, maksudnya selalu bersyukur dengan hasil yang diperoleh. Paman Birin kuat dalam memegang prinsip, sebagai peribahasa Banjar: *bila wani manimbai lunta wani jua manajuni*.



Gambar 117. H. Sahbirin Noor bersama Wakapolri saat ditapungtawari oleh Guru Wildan Salman pada penganugerahan sebagai warga Banjar. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Paman Birin mencanangkan Kalimantan Selatan sebagai Babussalam, artinya Pintu Keselamatan, menjadi pintu menuju provinsi-provinsi lain, dan nantinya akan menjadi gerbang ibukota. Kalau Aceh merupakan Serambi Makkah, Brunei sebagai Darussalam, maka Kalimantan Selatan akan menjadi Babussalam, ujarnya. Itu adalah harapan kita semua. Kita ingin selamat dunia dan akhirat.

Paman Birin yang menganggap tugas dan kerja sebagai ibadah terbuka terhadap kritik membangun dari pihak manapun, ia mengajak segenap komponen masyarakat di benua bersama-sama untuk memajukan benua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia berusaha untuk memajukan akses transportasi dan komunikasi dari dan ke Kalimantan Selatan, sehingga Kalimantan Selatan mudah dilalui melalui jalur sungai, darat, laut dan udara. Tingginya mobilitas masyarakat akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan.

Paman Birin dikenal sebagai pemimpin yang memiliki semangat tinggi dalam membangun benua. Paman Birin sangat aktif melakukan turun ke desa mengunjungi dan menyapa masyarakat dari berbagai pelosok dan kalangan. "BERGERAK" adalah jargon kepemimpinannya dan juga judul lagu mars yang ia ciptakan.

## **MARS BERGERAK**

Cipt: H. Sahbirin Noor

BERGERAK BERJUANG KALIMANTAN SELATAN  
BERSATU... MAJU BERSAMA  
BERGERAK BERSAMA, GELORAKAN RAKYAT  
UNTUK SEJAHTRA.  
KOBARKAN SEMANGATMU  
WUJUDKAN IMPIANMU  
TUK MEMBANGUN BANUA...

SATUKANLAH LANGKAHMU  
BULATKANLAH TEKADMU  
TUK RAIH RIDHO ILLAHI...  
BERGERAK - BERGERAK, BEKERJA DAN BERDOA  
BERJUANG MENANG...  
BERJUANG  
BERGERAK - BERGERAK, BEKERJA DAN BERDOA  
BERJUANG– BERJUANG MENANG...



Gambar 118. H. Sahbirin Noor selaku Gubernur Kalimantan Selatan membuka Banua Ekonomi Syariah Expo tahun 2023. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Sebagai orang yang berangkat dari rakyat kecil, ia berkomitmen untuk membangun berbagai sektor yang berkaitan dengan kehidupan dan hajar hidup orang banyak. Oleh karena itu, Paman Birin tidak menyenangi duduk di

belakang meja. Paman seringkali melakukan kegiatan Turun ke Desa (Turdes) untuk menemui masyarakat, mendengar keluhan dan harapan masyarakat secara langsung.



Gambar 119. Kegiatan Turdes ke desa-desa bersama jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber: koleksi H. Supiyannoor.

Di bidang pertanian, Paman Birin menggalakkan pembukaan lahan baru untuk pertanian, Melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi), lahan yang digarap seluas 250 ribu hektar. Tersebar di Kabupaten Tapin

35 ribu hektar, HSU 20 ribu hektar, HSS 30 ribu hektar, Tanah Laut 30 ribu hektar, Kabupaten Banjar 35 ribu hektar dan Barito Kuala paling luas yakni seluas 100 ribu hektar. Produktivitas lahan-lahan itu terus ditingkatkan, sehingga Kalimantan Selatan dikenal sebagai lumbung padi. Data yang tercatat pada Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan tahun 2017 produksi padi hanya sekitar 2 juta ton setahun, dapat ditingkatkan menjadi 2,4 ton.

Dari total produksi padi di Kalimantan Selatan, hanya Rp. 700.000,- yang menjadi konsumsi warga, jadi ada surplus 1,7 juta ton, yang dapat didistribusikan kepada provinsi tetangga. Oleh karena itu tidak heran apabila nanti IKN terwujud, Kalimantan Selatan dapat dijadikan atau berfungsi sebagai provinsi penyangga pangan, seperti yang selama ini sudah mampu dilakukan.

Di bidang peternakan dan perkebunan, juga mendapatkan prioritas dari Paman Birin. Inovasi yang dilakukan adalah di bidang peternakan sapi. Diterapkan sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma atau disingkat Siska Ku Intip. Ini dianggap program unggulan daerah yang memenuhi aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan, Ir. Suparmi, formulasi program Siska Ku Intip ini adalah dengan melibatkan masyarakat pekebun dan peternak di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit untuk membudidayakan sapi di lahan kelapa sawit hingga menghasilkan keuntungan secara simbiosis mutualis.

Program Siska Ku Intip ini merupakan inisiatif langsung dari Paman Birin, yang dikenal visioner dan kreatif. Tujuannya untuk meningkatkan populasi dan produksi daging sapi, dan menjadi nilai tambah bagi petani. Inovasi program ini telah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia. Dan telah ditiru oleh beberapa daerah di Indonesia, seperti Riau, Bengkulu, Kalbar dan Kaltim. Oleh Kementerian Pertanian akan dikembangkan di seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tahun 2023, program Siska Ku Intip mendapatkan verifikasi dan kunjungan dari Setmispres Kementerian Sekretaris Negara untuk pemberian Setya Lencana Wira Karya Untuk Gubernur Kalimantan Selatan. Setelah diterapkan dan terbukti berhasil, program ini diharapkan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Indonesia Australia Red A Meat And Cattle Partnership (IARMCP).



Gambar 120. H. Sahbirin Noor dan Kapolda Kalimantan Selatan dalam kegiatan pemusnahan narkoba. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan, stabil, positif dan terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,84 pada 2023, dan tingkat inflasi dapat dikendalikan. Sektor UMKM sudah pulih pasca Covid-19. Juga sudah dicapai surplus beras, dan sedang diupayakan swasembada daging melalui program Siska Ku

Intip sebagaimana disebutkan di atas. Investasi terus ditingkatkan. Potensi strategis investasi di Kalimantan Selatan diantaranya di kawasan industri Jorong, Batulicin. Di samping itu dikembangkan Erocity, Syamsuddin Noor, Sport City dan pembangunan tenaga listrik dengan jumlah investasi yang besar. Di sektor lingkungan hidup Paman Birin melakukan Revolusi Hijau, yang dimulai tahun 2017, yang dikuatkan dengan Perda Kalimantan Selatan tahun 2028, hingga program cukup berhasil signifikan. Ditargetkan 32 ribu hektar pertahun dapat dilakukan selama 20 tahun untuk merehabilitasi 640 ribu lahan kritis yang ada di Kalimantan Selatan. Sejak 2017 telah dapat direalisasikan 50 persen, yaitu 16.188 Ha, 2018 direalisasikan 29.591 dari target 32 ribu Ha. Dari 2018 sampai 2019 sudah terealisasi 53.996,43 Ha. Hingga saat ini telah terjadi penurunan lahan kritis dari 604.709 Ha (2013) menjadi 511.594 Ha di tahun 2018. Selain itu dilakukan pula program reklamasi dari dana Jamrek (Jaminan Reklamasi) dari perusahaan tambang. Pengusaha tambang terus dituntut dengan tegas untuk menyetor dana Jamrek. Yang tidak memenuhi kewajibannya langsung dibekukan izinnya.

Paman Birin menolak semua permohonan Izin Lingkungan dan Amdal. Sehingga pengusaha tambang tidak bisa melakukan aktivitas. Namun pemberian izin itu telah diberikan oleh pemerintah pusat sebelum dirinya menjadi gubernur. Jadi bukan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencabut izin. Apa yang keinginan menjadi keinginan rakyat itulah yang dilaksanakan.

Paman Birin menegaskan, ketika masyarakat banyak berteriak *Save Meratus*, ia dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah bergerak, tak hanya melakukan upaya penyelamatan, tapi juga menanam pohon melalui gerakan Revolusi Hijau. Pemerintah bahkan mengundang



KPK untuk datang dan melihat sendiri bagaimana kondisi di lapangan, sehingga tak ada yang ditutup-tutupi. Pemerintah Provinsi telah membuat *roadmap* pengelolaan tambang yang lebih baik dari provinsi lain dan hal ini diapresiasi oleh KPK.



Gambar 121. H. Sahbirin Noor saat mendampingi Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang selama ini banyak terjadi di Kalimantan Selatan juga menjadi perhatiannya. Paman Birin melalui BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kalimantan Selatan melakukan berbagai upaya antisipasi seperti melakukan penyuluhan tentang bahaya karhutla, melakukan pencegahan dan pemadaman, serta penanganan pasca kebakaran hutan. Paman Birin melibatkan TNI/POLRI dalam upaya ini serta segenap masyarakat, khususnya generasi muda. Angka Karhuta terus diupayakan dikurangi, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun kelalaian manusia.



Gambar 122. Gubernur H. Sahbirin Noor menerima penghargaan dari Bapak Presiden saat Musrenbangnas tahun 2024. Sumber: koleksi H. Supiyannoor.

Paman Birin yang sejak muda senang olahraga, tentu tidak melupakan pembangunan di sektor olahraga. Sarana dan prasarana olahraga banyak dibangun. Di antaranya yang terbesar adalah Gelanggang Olah Raga (GOR), yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi, yang dijadikan sebagai gedung serba guna olahraga. Daya tampung 3.133 kursi dan 20 kursi untuk VVIP. Tribun VIP berkapasitas 266 kursi dan tribun untuk penonton sebanyak 2.847 kursi. GOR bertipe B ini dapat digunakan untuk berbagai even olahraga.

Sekarang Indeks Pembangunan Olahraga di Kalimantan Selatan berada di peringkat yang semakin baik. Indeks

Perkembangan Personal peringkat 15, kesehatan olahraga peringkat 24, kebugaran di peringkat 20, dan Sumber Daya Olahraga peringkat 26 se-Indonesia.



Gambar 123. Foto sketsa Paman Birin dan Acil Odah. Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kalsel.

Paman Birin menyadari bahwa pengembangan sektor pariwisata adalah sektor yang ramah lingkungan dan banyak

mendatangkan keuntungan bagi masyarakat. Oleh karena itu berbagai destinasi wisata yang ada di daerah dalam segala bentuknya terus dikembangkan, baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan sebagainya.



Gambar 124. Gubernur H. Sahbirin Noor yang juga Ketua Umum DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan saat menerima penghargaan dari DHN 45. Sumber: koleksi H. Supiyannoor.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTASP) Kalimantan Selatan, destinasi wisata yang terus dikembangkan di daerah ini diantaranya:

1. Pasar Terapung sungai Barito, Muara Kuin dan Siring Sungai Martapura Banjarmasin;
2. Pulau Kembang, sebuah delta yang berada di sungai Barito yang kaya akan spesies monyet dan burung;
3. Loksado, yang kaya akan keindahan alam;

4. Pantai Angsana di Tanah Bumbu yang terkenal dengan pasir putih yang panjang;
5. Pulau Sumber Gelap di Kotabaru yang memiliki pemandangan laut dengan terumbu karang yang menawan;
6. Air Terjun Lembah Kahung di waduk Riam Kanan Kabupaten Banjar yang mempesona dengan ketinggian 25 meter;
7. Makam Datu Kalampayan, Makam Guru Sekumpul, dan lain-lain yang menjadi wisata religi dan sebagainya.

Selama kepemimpinannya, Paman Birin membangun infrastruktur jalan wisata di kawasan Kiram dan sekitarnya, membangun Masjid Bambu, dan membangun Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dan di Banjarmasin, ia juga membangun Tugu Nol Kilometer. Selain itu, di masa pemerintahannya, Jembatan Alalak dibangun oleh pemerintah pusat. Ia juga memprakarsai pembangunan jalan Hayupi Banjarbaru - Batulicin sehingga bisa memangkas jarak tempuh perjalanan yang sebelumnya 6-7 jam menjadi 3 jam perjalanan. Atas arahan Paman Birin juga dibangun Jalan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sangat membantu memperlancar para peziarah.

Di masa kepemimpinan Paman Birin, Provinsi Kalimantan Selatan juga berhasil menjadikan Geopark Meratus yang dikelola oleh Badan Pengelola menjadi Geopark Nasional pada tahun 2018 dan seterusnya diperjuangkan untuk ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark (UGGp).

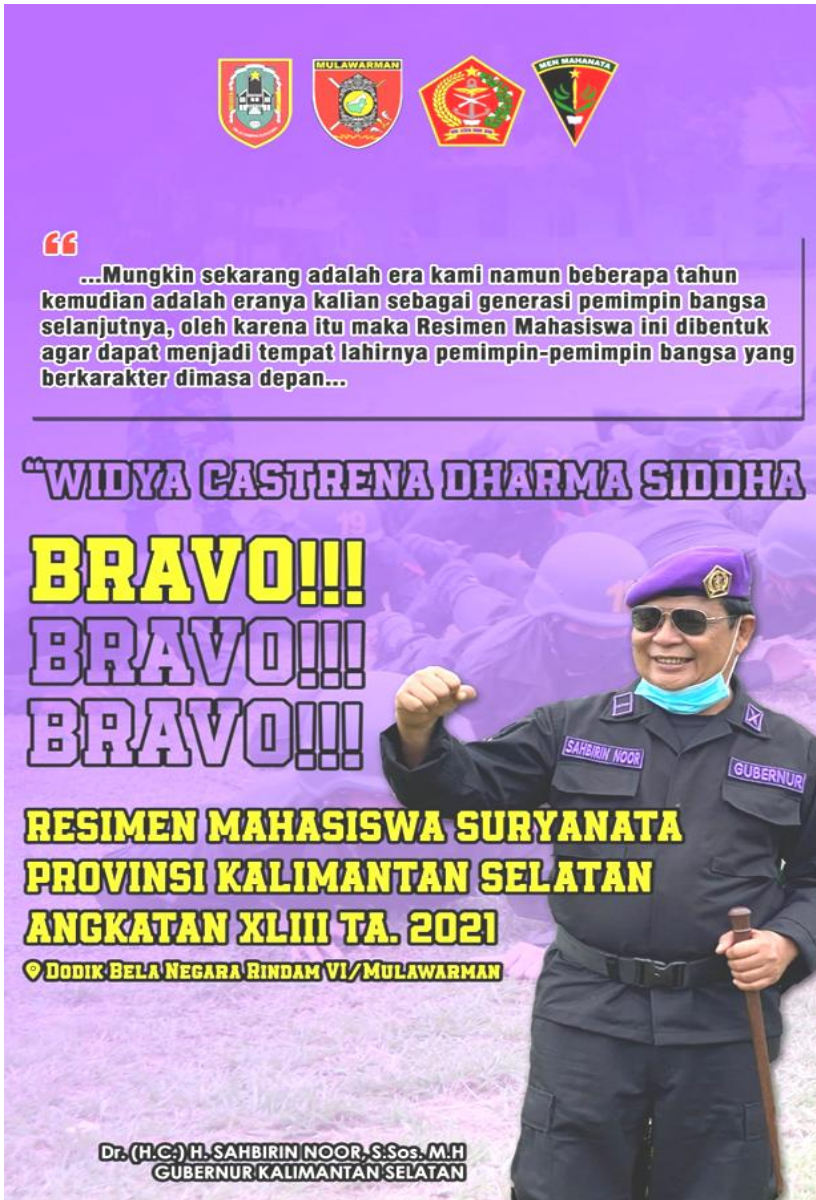


Gambar 125. Gubernur H. Sahbirin Noor menerima penghargaan TPID Award Tahun 2024 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat, 14 Juni 2024. Sumber: koleksi H. Supiyannoor.

Pada tahun 2024, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menerima anugerah TPID Award 2024 yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat 14 Juni 2024. TPID Award 2024 yang diterima gubernur 2024 adalah kali kedua secara berturut-turut dari tahun 2023, sebagai hasil kerja bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Keberhasilan itu tentu tidak lepas dari dukungan stakeholder seperti Bank Indonesia, BPS, Bupati/ Wali Kota, dunia usaha, pedagang, TNI/ POLRI dan segenap komponen masyarakat Kalimantan Selatan.



Gambar 126. Paman Birin saat melakukan penutupan 200 siswa Diksar Menwa di eks Lokasi Hari Pangan Sedunia.  
Sumber: koleksi H. Supiyannoor.



Gambar 127. Pesan H. Sahbirin Noor kepada Resimen Mahasiswa. Sumber: koleksi H. Supiyanoor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, M., Darmansyah, D., Wardoyo, K., Sugi Winarti, S., & Misman, M. 2006. *Jong Islamieten Bond Pergerakan Pemuda Islam 1925-1942*. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.
- Aman, Gusti Hasan. 1996. *Gerakan Sasangga Banua*. Banjarmasin.
- Anonim. 2004. *H.M. Sjachriel Darham, Anak Guru yang berupaya Membangun Banua*.
- Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*. Amuntai: Mega Sapura.
- Artha, Artum. 1975. *Album Pembangunan Kalimantan*. Banjarmasin: Penerbit Yayasan Pendidikan Seni Budiman-Percepatan RAPI.
- Bahar, S., Hudawati Sinaga, N., & B. Kusuma, A. 1992. *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=301192>
- Barjie B, Ahmad. 2015. *Dr. KH. Ideham Chalid Ulama Politisi Banjar di Kancah Nasional, Undas Nang Tahan Pidakan*. Banjarbaru: Penakita.

- Barjie B, Ahmad. Editor. 2020. *85 Tahun Prof. Drs. H.M. Kustan Basri Mengabdikan Banua Hingga Ujung Usia*. Banjarbaru: Penakita.
- Erwin H. Al-Jakartaty. 2023. *Bergerak Berjuang Gelorakan Banua. Sebuah Biografi Sahbirin Noor*. Klaten: Nas Media Indonesia.
- Hassan, A. Moeis. 1994. *Ikut Mengukir Sejarah*. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.
- Hatmansyah Ismail. 2014. *Sahbirin Noor Sang Anak Sungai Martapura*. Banjarmasin: Relawan Balicak.
- Hidayat, Kamarul dan Ahmad Makkie. Tanpa Tahun. *Apa dan Siapa & Siapa Dari Utara*. Dicitak oleh CV. Suryagarini, Jakarta.
- Ideham, M. Suriansyah., Sjarifuddin, Usman, A. Gazali., Anis, Muhammad Zainal Arifin & Wajidi (Ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Irfanudin T, M., dkk., Penyunting. 2000. *5 Tahun Pengabdian Gusti Hasan Aman*. Banjarmasin: Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kodam X/LM. 1962. *Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun*. Banjarmasin.
- Laily Mansur, M., 2018. *Zafry Zamzam, Kehidupan, Kegiatan dan Pemikiran*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Makkie, Ahmad dan Kamarul Hidayat. 2006. *Apa & Siapa Dari Bumi Murakata, Kepahlawanan dan Keberdayaan Anak Banua*. Barabai: HKKB Murakata Kalimantan Selatan.

- Makkie, Ahmad dan Kamarul Hidayat. 2007. *SANGGAM Perjalanan Panjang Menuju Otonomi Balangan 1963 - 2003*. Editor H. Ahmad Makkie. Banjarmasin: Diterbitkan dan dicetak Perum Percetakan Negara RI Cabang Surabaya.
- Mansyur, M. 2017. Pangeran Kesuma Giri, Bangsawan & Birokrat Serambi Mekah Halaman 1—Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/istorya/5a34b7205e13735d2e48ba33/pangeran-kesuma-giri-bangsawan-birokrat-serambi-mekah>.
- Mansyur, Mursalin, Wajidi. 2019. *Terima kasih Untukmu Pahlawan, Biografi 4 Pahlawan dari Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nawawi, Ramli (ed.). 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Kalimantan Selatan.
- Nawawi, Ramli, dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nawawi, Ramli, Tamny Ruslan, Yustan Aziddin. 1986. *Sejarah Kota Banjarmasin*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
- Pemda Tk. I Kalsel. 1995. *Sejarah hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Panitia Peringatan Hari Jadi Propinsi Kalimantan Selatan.
- Pernanda, Ferry. Tanpa Tahun. *Profil Sarkawi, Gubernur Pertama Kalimantan Selatan (Bapak Pemuda Kalimantan Selatan)*. Diterbitkan oleh Yayasan Yudha Negara.

- Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Said, H. M. 1999. *Meniti Karier Melaksanakan Amanah*. Banjarmasin.
- Said, H.M. 2000. *Musyawahar Besar Pembangunan Banua Banjar Kalimantan Selatan, Pembangunan Banua sekarang dan di masa Mendatang*. Banjarmasin.
- Said, H.M., dkk. 1981. *Sabilal Muhtadin, Mesjid Raya Banjarmasin*. Bandung: Seni Budaya Offset.
- Saleh, M. Idwar, Asnawi, A., Koroh, A. A., Yustian, D., & Syah, Y. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Saleh, M. Idwar, Jamal, B., Koroh, A. A., & Yustian, D. (1977). *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional (1900-1942) di Kalimantan Selatan*. Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat.
- Santang, Amien dan Thamrin Yunus. 2011. *Sang Maestro H. Anang Ardiansyah "Si Paris Barantai"*. Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sultan, Noor Hidayat, dkk. Penyunting. Tanpa tahun. *2 tahun Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Suriani. 1993. *"Perjuangan Pasukan MN 1001/MTKI Daerah Banjar dalam Menegakkan Kemerdekaan RI di Kalimantan Selatan (1945–1949)"*. Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Sejarah FKIP Unlam.

- Tim Penulis. 2014. *Curriculum Vitae Sahbirin Noor dalam Buku Satu Abad Pondok Pesantren Darussalam*. Martapura: Ponpes Pesantren Darussalam.
- Van Dijk, C. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Wajidi, dkk. 2018. *Sejarah Gerakan Kepemudaan Di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.
- Wajidi. 2015. *Revolusi Kemerdekaan Di Kalimantan Selatan 1945-1949*. Yogyakarta: Ombak.
- Wajidi. 2017. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950*. [Thesis]. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Wajidi. 2023. *Nasionalisme 3 Zaman: Jalan Panjang Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950*. Yogyakarta: Istana Agency.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapanca.
- Zuhri, A. (Ed.). 1981. *Ir. P.M. Noor: Teruskan Gawi kita balum tuntung*. Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45, Kalimantan Selatan.

PROFIL GUBERNUR  
**KALIMANTAN  
SELATAN**

DARI P. M. NOOR SAMPAI SAHBIRIN NOOR

**P**rovinsi Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sejarah Indonesia, telah menjadi tempat berkembangnya banyak tokoh yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Buku ini merupakan upaya untuk mengabadikan jejak-jejak mereka dalam membangun dan melayani bangsa dan negara.

Tokoh-tokoh ini tidak hanya mempengaruhi secara lokal, tetapi juga nasional, menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mengikuti jejak positif mereka. Meskipun banyak dari mereka yang tidak terpublikasi secara luas dalam media cetak, elektronik, atau maya, buku ini berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan menyajikan profil tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan.

Dimulai dari masa-masa awal setelah proklamasi kemerdekaan, ketika wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Borneo dengan Ir. Pangeran Mohamad Noor sebagai Gubernur pertamanya. Proses pemekaran dan pengakuan kedaulatan Indonesia terhadap wilayah ini memunculkan Provinsi Kalimantan dengan dr. Mas Moerdjani sebagai Gubernurnya, sebelum akhirnya terbentuk Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal saat ini.

Selanjutnya buku ini mengisahkan perjalanan gubernur-gubernur yang memimpin Kalimantan Selatan dari masa ke masa, dari Sarkawi hingga Sahbirin Noor. Setiap profil gubernur disusun dengan cermat, mencakup kontribusi mereka dalam memajukan dan mengelola daerah ini, serta peran mereka dalam konteks sejarah nasional.

Seiring dengan berjalannya waktu, tokoh-tokoh yang memegang tanggung jawab sebagai gubernur, terlibat dalam berbagai inisiatif pembangunan yang memberi dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu, para penjabat gubernur dan wakil gubernur yang turut mencatat sejarah dalam kepemimpinannya juga disinggung dalam narasi ini, menunjukkan berbagai dinamika politik dan perkembangan administratif provinsi.

Meskipun tidak mungkin mencatat semua prestasi dan kontribusi yang dilakukan oleh setiap gubernur, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca yang ingin memahami lebih dalam perjalanan dan kontribusi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Provinsi Kalimantan Selatan.



PENERBIT & PERCETAKAN  
ARTI BUMI INTARAN



Diterbitkan atas kerjasama Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45)  
Provinsi Kalimantan Selatan & Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan  
dengan Penerbit Arti Bumi Intaran

ISBN 978-623-8026-64-7



9 786238 026647